



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2025—2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025—2029;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 7. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Perindustrian 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Kementerian Perindustrian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Pasal 2

Renstra Kementerian Perindustrian 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Kementerian Perindustrian 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kementerian Perindustrian 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2025

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 1182

Salinan sesuai dengan aslinya

Secretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

Ikana Yossye Ardianingsih



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN TAHUN 2025—2029

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2025—2029

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- A. Kondisi Umum
 - 1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Industri
 - 2. Capaian Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian pada Rencana Strategis 2020—2024
 - 3. Aspirasi Masyarakat
- B. Potensi dan Permasalahan
 - 1. Potensi
 - 2. Permasalahan

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan
- D. Sasaran Strategis

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

- A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
- B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian
- C. Kerangka Regulasi
- D. Kerangka Kelembagaan

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- A. Target Kinerja
- B. Kerangka Pendanaan

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

TABEL 1	PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) INDONESIA PER TRIWULANAN 2020—2024 (DALAM PERSEN)
TABEL 2	PERKEMBANGAN DAN PROGNOSA PDB BEBERAPA NEGARA ASEAN TAHUN 2020—2024 (DALAM PERSEN)
TABEL 3	PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN PDB BEBERAPA NEGARA LAIN DI DUNIA TAHUN 2020—2024 (DALAM PERSEN)
TABEL 4	PERTUMBUHAN PDB INDONESIA BERDASARKAN LAPANGAN USAHA TAHUN 2020—2024 (Y TO Y) TAHUN DASAR 2010 (DALAM PERSEN)
TABEL 5	PERTUMBUHAN INDUSTRI PENGOLAHAN NONMIGAS TAHUN 2020—2024 MENURUT CABANG INDUSTRI TAHUN DASAR 2010 (DALAM PERSEN)
TABEL 6	SASARAN STRATEGIS DALAM RENSTRA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2020—2024
TABEL 7	DAFTAR KI RPJMN YANG BEROPERASI TAHUN 2019—2024
TABEL 8	CAPAIAN KINERJA SASARAN RENSTRA KEMENPERIN 2020—2024
TABEL 9	LAJU PERTUMBUHAN PDB TAHUN 2011—2024
TABEL 10	INDIKASI RISIKO SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025—2029
TABEL 11	KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025—2029
TABEL 12	NOMENKLATUR ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN BESERTA DENGAN TUGASNYA
TABEL 13	SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025—2029
TABEL 14	SASARAN PROGRAM KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025—2029
TABEL 15	KEBUTUHAN PENDANAAN PROGRAM KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025—2029 (DALAM MILIAR RUPIAH)
TABEL 16	KEBUTUHAN PENDANAAN PROGRAM KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025—2029 BERDASARKAN UNIT ESELON I (DALAM MILIAR RUPIAH)

DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 1 PERDAGANGAN SEKTOR INDUSTRI TAHUN 2020—2024
- GAMBAR 2 SEPULUH BESAR NEGARA TUJUAN EKSPOR & ASAL IMPOR SEKTOR INDUSTRI (USD MILIAR)
- GAMBAR 3 IMPOR INDONESIA MENURUT PENGGUNAAN BARANG TAHUN 2024
- GAMBAR 4 REALISASI INVESTASI SEKTOR INDUSTRI TAHUN 2024
- GAMBAR 5 GRAFIK *REVEALED SYMMETRIC COMPARATIVE ADVANTAGE* (RSCA)/ *TRADE BALANCE INDEX* (TBI) INDONESIA
- GAMBAR 6 PERTUMBUHAN PER SEKTOR (2011—2024)
- GAMBAR 7 PERBANDINGAN SUKU BUNGA ANTARA INDONESIA DENGAN TIGA NEGARA LAINNYA TAHUN 2010—2024
- GAMBAR 8 PERBANDINGAN RESTRIKSI FDI ANTARA INDONESIA DENGAN VIETNAM
- GAMBAR 9 PERBANDINGAN PRODUKTIVITAS PER PEKERJA ANTARA INDONESIA DAN 4 NEGARA LAINNYA
- GAMBAR 10 PERBANDINGAN PARTISIPASI INDONESIA, MALAYSIA, FILIPINA, SINGAPURA, THAILAND, DAN VIETNAM DALAM *GLOBAL VALUE CHAIN* (2010 DAN 2019)
- GAMBAR 11 STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Kondisi perekonomian periode tahun 2020—2024 menjadi fase penuh dinamika yang secara signifikan memengaruhi arah pembangunan nasional, termasuk di sektor industri. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang melanda secara global pada awal tahun 2020 memberikan dampak multidimensi terhadap perekonomian Indonesia. Penurunan permintaan domestik dan global, terganggunya rantai pasok, pembatasan aktivitas produksi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi tantangan besar bagi keberlangsungan sektor industri manufaktur.

Pelaksanaan pembangunan industri pada periode tahun 2020—2024 didasarkan atas Rencana Strategis Kementerian Perindustrian tahun 2020—2024 (Renstra Kementerian Perindustrian 2020—2024) yang mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015—2035, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020—2024, dan Kebijakan Industri Nasional (KIN) tahun 2020—2024. Substansi utama Renstra Kementerian Perindustrian 2020—2024 merupakan turunan dari RPJMN tahun 2020—2024. Di sisi lain, secara kerangka waktu penyusunan dokumen, RPJMN tahun 2020—2024 disusun sejak tahun 2019 dan ditetapkan pada 17 Januari 2020, sehingga asumsi yang digunakan dalam penyusunannya belum terpengaruh oleh kondisi pandemi Covid-19. Kondisi ini tentu membuat target pembangunan nasional yang ada dalam RPJMN masih sangat optimis. Kementerian Perindustrian telah menetapkan Renstra Kementerian Perindustrian 2020—2024 yang mengacu pada RPJMN sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020—2024.

Dengan adanya penyesuaian organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian dan kondisi pandemi Covid-19, telah dilakukan perubahan atas Renstra Kementerian Perindustrian. Perubahan Renstra Kementerian Perindustrian dituangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020—2024. Perubahan tersebut diantaranya adalah penambahan dan perubahan atas indikator dan target kinerja yang disesuaikan dengan dampak yang terjadi akibat penyebaran Covid-19.

Guna kelancaran pencapaian Renstra Kementerian Perindustrian 2020—2024, Kementerian Perindustrian melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi pada Renstra Kementerian Perindustrian 2020—2024. Arah kebijakan yang dimaksud yaitu melalui 6 (enam) kebijakan pembangunan sektor industri meliputi:

1. kebijakan pengembangan sumber daya industri yang dilakukan melalui pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam (SDA), pengembangan dan pemanfaatan teknologi, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, dan penyediaan sumber pembiayaan.
2. kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri yang diimplementasikan dengan pengembangan sumber daya manusia

- industri, pengembangan infrastruktur industri, dan pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
3. kebijakan pemberdayaan industri yang dilakukan melalui pengembangan industri kecil dan industri menengah, pengembangan industri hijau, pengembangan industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), kerja sama internasional di bidang industri, dan pemberdayaan industri halal.
 4. kebijakan pengembangan perwilayahan industri yang bertujuan untuk membangun pusat-pusat industri baru dalam rangka penyebaran dan pemerataan pembangunan industri melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), dan Kawasan Industri (KI) serta pembangunan atau revitalisasi sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM).
 5. kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal diarahkan pada sasaran utama mempercepat pembangunan industri melalui kegiatan akselerasi pertumbuhan sektor industri dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas (peningkatan kinerja ekspor dan kemampuan substitusi impor, serta penyiapan SDM Industri yang kompeten), penguatan dan pendalaman struktur industri nasional bagi investasi baru sektor industri (khususnya industri pionir) atau perusahaan industri *existing* yang melakukan perluasan komoditi baru, mendorong industri melakukan inovasi, invensi dan penguasaan teknologi baru, dan pemerataan pembangunan sektor industri di seluruh wilayah Indonesia.
 6. kebijakan reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat (*level*) tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*).

Capaian pelaksanaan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020—2024 merupakan cerminan kinerja jangka menengah Kementerian Perindustrian. Secara garis besar, capaian tersebut mencakup hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan industri dan capaian Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020—2024.

1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Industri

Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan industri meliputi hasil evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan yang didasarkan pada sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Kemenperin 2020—2024. Pada periode tahun 2020—2024, Kementerian Perindustrian telah melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan dengan hasil capaian sebagai berikut:

a. Kondisi perekonomian global pada tahun 2024

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan yang mencerminkan dampak pandemi Covid-19 dan proses pemulihan ekonomi nasional. Indonesia mengalami kontraksi ekonomi yang cukup besar pada tahun 2020, terutama pada triwulan II dengan kontraksi sebesar -5,32 persen. Pemulihan mulai terlihat pada tahun 2021 meskipun pada triwulan I

masih terlihat kontraksi sebesar -0,69 persen, namun pada triwulan II terjadi lonjakan pertumbuhan ekonomi menjadi 7,08 persen yang dipengaruhi oleh efek *low base* (anggaran terbatas) tahun sebelumnya serta peningkatan aktivitas ekonomi dan konsumsi dalam negeri. Setelah pandemi Covid-19 pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil di kisaran 5 persen yang mencerminkan pemulihan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Perkembangan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Per Triwulanan 2020—2024 (Dalam Persen)

Tahun	Triwulan			
	I	II	III	IV
2020	2,97	-5,32	-3,49	-2,17
2021	-0,69	7,08	3,53	5,03
2022	5,02	5,46	5,73	5,01
2023	5,04	5,17	4,94	5,04
2024	5,11	5,05	4,95	5,02

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) diolah 2025

Berdasarkan data *International Monetary Fund* (IMF) dan *Asian Development Bank* (ADB), pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 dan beberapa negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) mengalami kontraksi yang cukup besar akibat penerapan pembatasan mobilitas dan penurunan permintaan global (lihat Tabel 2). Namun demikian, hanya Vietnam yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,9 persen yang merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia dengan pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2020. Pemulihan mulai terlihat pada tahun 2021 dengan Singapura yang mengalami pertumbuhan tinggi sebesar 8,9 persen. Pada tahun 2023 dan tahun 2024 pertumbuhan ekonomi negara ASEAN cenderung stabil dimana Indonesia diperkirakan tumbuh konsisten sebesar 5,05 persen dan 5,03 persen. Berdasarkan Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa negara-negara ASEAN memiliki resiliensi ekonomi yang cukup kuat meskipun terdampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020.

Tabel 2 Perkembangan dan Prognosa PDB Beberapa Negara ASEAN Tahun 2020-2024 (Dalam Persen)

No	Negara	PDB (Dalam Persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indonesia	-2,1	3,7	5,3	5,05	5,03
2	Singapura	-4,1	8,9	3,6	1,1	2,6
3	Malaysia	-5,6	3,1	8,7	3,6	4,5
4	Thailand	-6,1	1,5	2,6	1,9	2,3
5	Vietnam	2,9	2,6	8,0	5,1	6,0
6	Filipina	-9,5	5,7	7,6	5,5	6,0

Sumber: *IMF World Economic Outlook 2024*, *ADB Asian Development Outlook 2024*, dan BPS diolah 2025

Sedangkan dari sisi perekonomian global tergambar pada Tabel 3, dimana hanya Tiongkok yang menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 2,3 persen pada tahun 2020. Tahun 2021 menjadi titik balik bagi sebagian besar negara dimana Tiongkok sebesar 8,1 persen dan Inggris sebesar 7,4 persen mengalami pertumbuhan tertinggi. Sedangkan pada tahun 2023 dimana sebagian besar negara mengalami perlambatan pertumbuhan, Indonesia tetap tumbuh stabil di angka 5,05 persen dan tetap konsisten hingga tahun 2024.

Tabel 3 Perkembangan dan Pertumbuhan PDB Beberapa Negara Lain di Dunia Tahun 2020—2024 (Dalam Persen)

No	Negara	PDB (Dalam Persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Amerika Serikat	-3,4	5,9	2,1	2,5	2,7
2	Rusia	-2,7	5,6	-2,1	3,0	2,6
3	Tiongkok	2,3	8,1	3,0	5,2	4,6
4	Jepang	-4,5	2,2	1,0	1,9	0,9
5	Inggris	-9,9	7,4	4,1	0,1	0,5
6	Perancis	-7,9	6,8	2,5	0,9	1,0
7	Australia	-2,2	4,9	3,7	1,8	2,2

Sumber: *IMF World Economic Outlook database 2024*

b. Pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2020—2024

Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2020—2024 sesuai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan 2010 mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar -2,07 persen. Pada tahun 2021 dan 2022 perekonomian Indonesia berhasil bangkit dan tumbuh hingga mencapai 5,31 persen di tahun 2022. Tetapi kemudian mengalami perlambatan pada tahun 2023 menjadi sebesar 5,05 persen dan cenderung stagnan pada tahun 2024 sebesar 5,03 persen. Data selengkapnya tersaji pada Tabel 4 dibawah.

Tabel 4 Pertumbuhan PDB Indonesia Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2020—2024 (Y to Y) Tahun Dasar 2010 (Dalam Persen)

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,77	1,87	2,25	1,31	0,67
2	Pertambangan dan Penggalian	-1,95	4,00	4,38	6,12	4,90
3	Industri Pengolahan	-2,93	3,39	4,89	4,64	4,43
	a. Industri Migas	-6,81	0,57	3,72	4,16	1,04
	b. Industri Nonmigas	-2,52	3,67	5,01	4,69	4,75
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-2,34	5,55	6,61	4,91	4,77
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,94	4,97	3,23	4,90	1,56
6	Konstruksi	-3,26	2,81	2,01	4,91	7,02

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,79	4,63	5,53	4,85	4,86
8	Transportasi dan Pergudangan	-15,05	3,24	19,87	13,96	8,69
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,26	3,88	11,94	10,00	8,56
10	Informasi dan Komunikasi	10,61	6,82	7,73	7,59	7,57
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,25	1,56	1,93	4,77	4,74
12	Real Estate	2,32	2,78	1,72	1,43	2,50
13	Jasa Perusahaan	-5,44	0,73	8,77	8,24	8,38
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,03	-0,33	2,52	1,51	6,40
15	Jasa Pendidikan	2,61	0,11	0,55	1,77	3,75
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,56	10,45	2,75	4,67	8,11
17	Jasa lainnya	-4,10	2,12	9,47	10,52	9,80
	PDB	-2,07	3,70	5,31	5,05	5,03

Sumber: BPS diolah 2025

Dari 17 sektor yang ada, terdapat 10 sektor yang mengalami perlambatan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Pertumbuhan tertinggi secara (Y-on-Y) pada sektor jasa lainnya sebesar 9,80 persen, transportasi dan pergudangan sebesar 8,69 persen, dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,56 persen.

Perkembangan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas tahun 2024 mengalami kenaikan dari periode sebelumnya, dimana pada tahun 2024 tumbuh 4,75 persen dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 4,69 persen. Namun, masih lebih rendah dibanding PDB tahun 2024 yang tumbuh sebesar 5,03 persen.

c. Perkembangan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Tahun 2020-2024

Pada tahun 2024 terdapat 3 (tiga) subsektor industri yang mengalami kontraksi dan 4 (empat) subsektor industri yang mengalami perlambatan. Adapun 3 (tiga) subsektor yang mengalami kontraksi pada tahun 2024, yaitu:

- 1) industri barang galian bukan logam sebesar -0,60 persen dari sebelumnya 4,11 persen;
- 2) industri mesin dan perlengkapan sebesar -0,42 persen dari sebelumnya -0,03 persen; dan
- 3) industri alat angkutan sebesar -2,10 persen dari sebelumnya 7,63 persen.

Subsektor industri yang mengalami perlambatan pada 2024, yaitu:

- 1) industri pengolahan tembakau yang tumbuh 3,49 persen dari sebelumnya 4,80 persen;
- 2) industri kertas dan barang dari kertas; percetakan dan reproduksi media rekaman yang tumbuh sebesar 2,61 persen dari sebelumnya 4,52 persen;
- 3) industri logam dasar yang tumbuh sebesar 13,34 persen dari sebelumnya 14,17 persen; dan

- 4) industri barang logam; komputer, barang elektronik, optik; dan peralatan listrik yang tumbuh sebesar 6,16 persen dari sebelumnya 13,67 persen.

Tabel 5 Pertumbuhan Industri Pengolahan Nonmigas
Tahun 2020—2024 Menurut Cabang Industri Tahun Dasar 2010
(Dalam Persen)

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Industri Makanan dan Minuman	1,58	2,54	4,90	4,47	5,90
2	Industri Pengolahan Tembakau	-5,78	-1,32	-2,34	4,80	3,49
3	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	-8,88	-4,08	9,34	-1,98	4,26
4	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-8,76	7,75	9,36	-0,34	6,83
5	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-2,16	-3,71	0,59	1,20	2,79
6	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,22	-2,89	3,73	4,52	2,61
7	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	9,39	9,61	0,69	0,11	5,86
8	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-5,61	1,08	-4,10	-3,63	1,75
9	Industri Barang Galian bukan Logam	-9,13	0,89	-2,00	4,11	-0,60
10	Industri Logam Dasar	5,87	11,50	14,80	14,17	13,34
11	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	-5,46	-1,62	6,71	13,67	6,16
12	Industri Mesin dan Perlengkapan	-10,17	11,43	11,37	-0,03	-0,42
13	Industri Alat Angkutan	-19,86	17,82	10,67	7,63	-2,10
14	Industri Furnitur	-3,36	8,16	-1,99	-2,04	2,07
15	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	-0,88	-1,64	6,08	-2,10	3,54
Industri Pengolahan Nonmigas		-2,52	3,67	5,01	4,69	4,75
PDB		-2,07	3,70	5,31	5,05	5,03

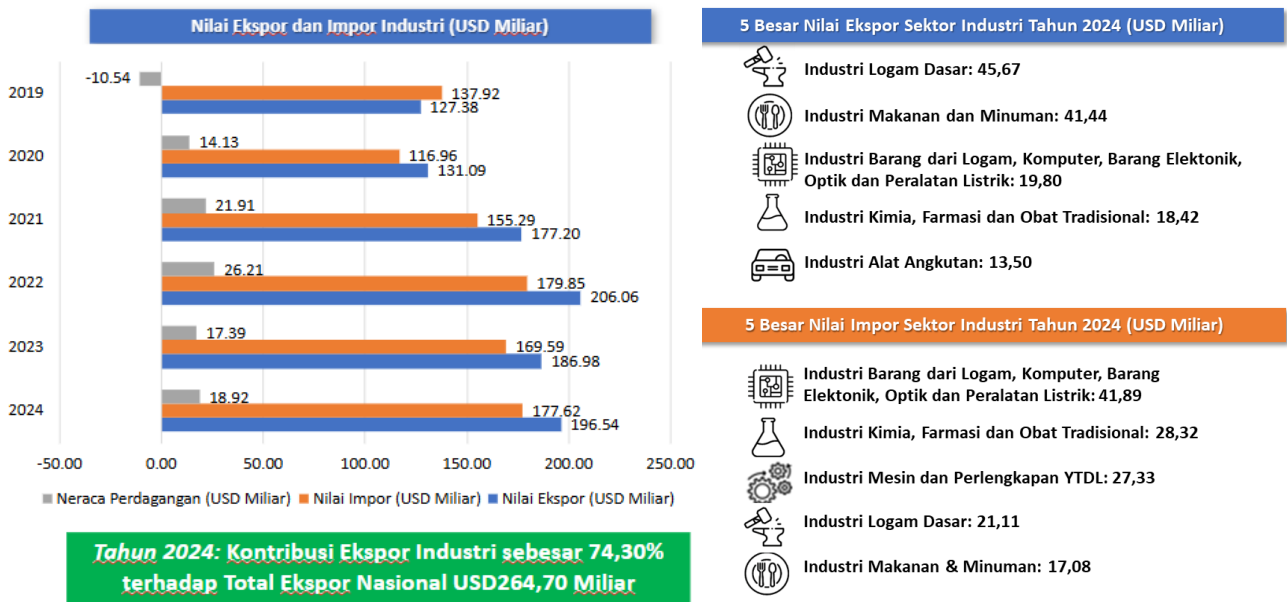
Sumber: BPS diolah 2025

Subsektor industri yang menunjukkan peningkatan pertumbuhan pada tahun 2024 antara lain:

- 1) industri makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 5,90 persen dari sebelumnya 4,47 persen;
- 2) industri tekstil dan pakaian jadi yang tumbuh sebesar 4,26 persen dari sebelumnya -1,98 persen;
- 3) industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki yang tumbuh sebesar 6,83 persen dari sebelumnya -0,34 persen;
- 4) industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya yang tumbuh sebesar 2,79 persen dari sebelumnya 1,20 persen;

- 5) industri kimia, farmasi dan obat tradisional yang tumbuh sebesar 5,86 persen dari sebelumnya 0,11 persen;
 - 6) industri karet, barang dari karet dan plastik yang tumbuh sebesar 1,75 persen dari sebelumnya -3,63 persen;
 - 7) industri furnitur yang tumbuh sebesar 2,07 persen dari sebelumnya -2,04 persen; dan
 - 8) industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan yang tumbuh sebesar 3,54 persen dari sebelumnya -2,10 persen.
- d. Perkembangan Ekspor dan Impor Industri Pengolahan Non-Migas Pada Tahun 2020—2024

Setelah neraca perdagangan mengalami defisit pada tahun 2019, kondisi pada tahun 2020 berbalik dimana terjadi surplus perdagangan sebesar USD14,13 miliar. Tren positif berlanjut pada tahun 2021 hingga tahun 2024. Puncak ekspor terjadi pada tahun 2022 dengan nilai sebesar USD206,06 miliar dengan surplus perdagangan sebesar USD26,21 miliar. Pada tahun 2023 dan 2024 nilai ekspor sedikit menurun namun Indonesia masih bisa menjaga surplus perdagangan. Hal tersebut menunjukkan ketahanan industri Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global seperti fluktuasi harga komoditas dan gangguan rantai pasok.



Gambar 1 Perdagangan Sektor Industri Tahun 2020—2024

Pada tahun 2024, sektor industri memberikan kontribusi ekspor sebesar 74,30 persen (data BPS diolah) dari total ekspor nasional yang nilainya sebesar USD264,70 miliar (data BPS diolah). Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat ekspor terbesar sektor industri ditempati oleh industri logam dasar dengan nilai ekspor sebesar USD45,67 miliar. Sedangkan nilai impor terbesar ditempati oleh industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik dengan nilai sebesar USD41,89 miliar.

EKSPOR TAHUN 2024				IMPOR TAHUN 2024			
1		Tiongkok	42,19	1		Tiongkok	69,03
2		Amerika Serikat	25,83	2		Jepang	14,77
3		India	12,71	3		Singapura	9,60
4		Jepang	11,96	4		Thailand	9,34
5		Filipina	7,48	5		Korea Selatan	8,55
6		Malaysia	7,35	6		Amerika Serikat	7,16
7		Singapura	7,23	7		Vietnam	6,26
8		Vietnam	7,19	8		Malaysia	5,90
9		Korea Selatan	5,84	9		India	4,70
10		Australia	4,79	10		Brazil	4,61

Sumber: BPS diolah 2025

Gambar 2 Sepuluh Besar Negara Tujuan Ekspor & Asal Impor Sektor Industri (USD Miliar)

Berdasarkan Gambar 2, dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 negara tujuan ekspor sektor industri terbesar Indonesia yaitu Tiongkok sebesar USD42,19 miliar, Amerika Serikat sebesar USD25,83 miliar, dan India sebesar USD12,71 miliar. Sedangkan, untuk negara asal impor sektor industri terbesar masih ditempati oleh Tiongkok sebesar USD69,03 miliar, Jepang sebesar USD14,77 miliar, dan Singapura sebesar USD9,60 miliar.

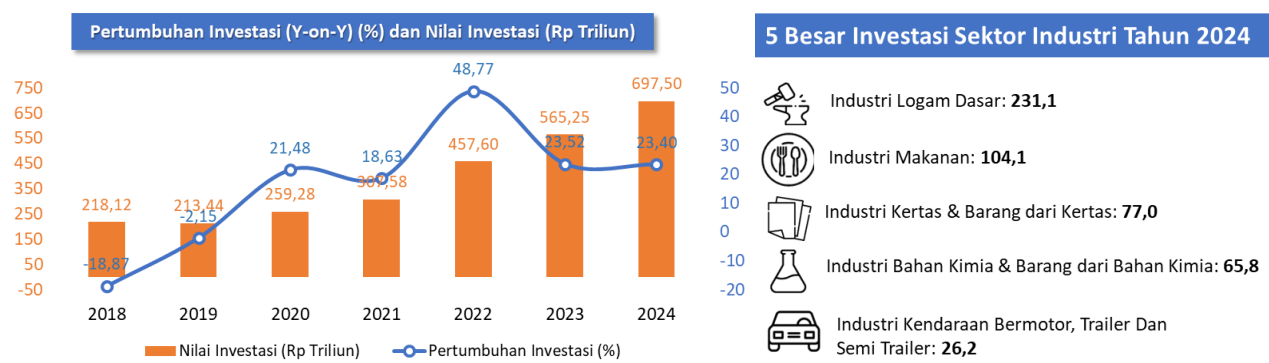
Impor Indonesia terbesar dilakukan untuk pembelian bahan baku/bahan penolong sebesar USD169,67 miliar atau sebesar 72,62 persen dari total impor, terbesar kedua dilakukan untuk impor pembelian barang-barang modal sebesar USD41,27 miliar atau sebesar 17,67 persen. Secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah.



Sumber: BPS diolah 2025

Gambar 3 Impor Indonesia Menurut Penggunaan Barang Tahun 2024

- e. Perkembangan investasi Indonesia pada tahun 2020—2024
- Capaian realisasi investasi pada Tahun 2024 yakni sebesar Rp697,5 triliun, tumbuh sebesar 23,4 persen dibanding tahun 2023. Berdasarkan data dari BPS yang diolah, 5 (lima) subsektor industri dengan nilai realisasi investasi terbesar tahun 2024 yaitu:
- 1) Industri Logam Dasar dengan nilai investasi sebesar Rp231,1 triliun;
 - 2) Industri Makanan dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp104,1 triliun;
 - 3) Industri Kertas dan Barang dari Kertas dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp77 triliun;
 - 4) Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp65,8 triliun; dan
 - 5) Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp26,2 triliun.



Sumber: BPS diolah 2025

- Gambar 4 Realisasi Investasi Sektor Industri Tahun 2024
2. Capaian Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian pada Rencana Strategis 2020—2024
- Sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Pada tahun 2023 dan 2024 terdapat penyesuaian terhadap target indikator kinerja pada Renstra Kementerian Perindustrian sejalan dengan perubahan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan 2024.
- Renstra Kementerian Perindustrian 2020—2024 terdiri dari satu Sasaran Tujuan (Tj) dan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) dengan total 51 (lima puluh satu) indikator kinerja. Berikut adalah matriks pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja periode tahun 2020—2024.

Tabel 6 Sasaran Strategis dalam Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024

No	Sasaran Tujuan/ Strategis	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024			Satuan
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	C	
Tj	Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional	1. Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	-2,22	-2,52	3,56	3,67	5,26	5,01	5,37	4,69	5,80	4,75	81,90	Persen
		2. Kontribusi industri pengolahan nonmigas	17,8	17,9	17,8	17,4	17,95	16,48	18,37	16,75	17,90	17,16	95,87	Persen

No	Sasaran Tujuan/Strategis	Indikator Kinerja		2020		2021		2022		2023		2024			Satuan
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	C	
			terhadap PDB												
SS1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	18,56	17,44	18,29	18,65	20,84	19,11	21,01	19,3	20,33	19,96	98,2	Juta Orang
		2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja	13,58	13,58	13,96	14,23	14,96	14,13	15,2	13,8	14,29	13,80	96,6	Persen
		3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas	115,5	115,1	115,5	111,6	115,8	114,3	117,5	118,6	122,3	120,0	98,1	Rp Juta /orang/ tahun
		4	Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas	245,9	266,3	255,3	307,6	334,9	457,6	501,6	565,3	630,6	697,5	110,6	Rp. Triliun
		5	Utilisasi Sektor Industri	Belum menjadi Indikator		61,6	63,4	64,5	69,5	69,9	70	70,2	65,3	92,9	Persen
		6	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	Belum menjadi Indikator		4	4	5	7,1	6	6,7	7	7,3	104,4	Persen
		7	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	50	48,3	77	91,4	79	100	81	91,4	83	98,7	118,9	Persen
		8	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	17.000	18.919	43.000	47.752	27.600	27.769	26.500	33.094	19.286	25.048	129,88	Orang
SS2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	Perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) > 3.0	30	31	36	46	44	59	52	74	80	113	141,25	Perusahaan
		2	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	12,63	12,77	12,83	12,28	13,15	11,81	13,4	11,83	13,70	11,95	87,23	Persen
		3	Tumbuh dan berkembangnya IKM <i>startup</i> berbasis teknologi	20	20	60	74	100	162	160	233	260	330	126,92	IKM
		4	Kemampuan sektor Industri Kecil Menengah melalui penerapan <i>Making Indonesia 4.0</i>	Belum menjadi Indikator		1.500	5.776	1.500	4.247	1.500	3.424	3.000	3.887	129,57	IKM
		5	SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	400	347	400	430	400	483	600	763	600	605	100,83	Orang
SS3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa serta Industri Halal Dalam Negeri	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Kemenperin	49	43,67	75	85,35	80	85,7	85	85,75	90	89,48	99,42	Persen
		2	Substitusi Impor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Belum menjadi Indikator		22	10,73	35	-5,72	35	-1,69	35	-4,58	0,00	Persen
		3	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang)	49	43,67	49,9	48,16	50,9	49,8	52	50,13	53,0	52,67	99,38	Persen
		4	Produk tersertifikasi TKDN ≥ 25% yang masih berlaku	6.200	9.845	6.630	17.820	7.130	30.163	22.000	56.858	50.000	73.504	147,01	Produk
		5	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan	5	7,19	7	8,56	10	5,6	6	6,15	6,50	9,80	150,73	Persen

No	Sasaran Tujuan/ Strategis	Indikator Kinerja		2020		2021		2022		2023		2024			Satuan
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	C	
		6	Tingkat efektivitas pelaksanaan promosi dan kampanye industri halal	Belum menjadi Indikator		2,75	3,31	3	3	3,25	3,69	3,70	3,73	100,76	Skala 1-4
		7	Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Belum menjadi Indikator		60	60	65	98,61	70	98,36	95	100	105,26	Persen
SS4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri	1	Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas	125,85	131,13	134,21	177,11	145,5	206,35	222,47	186,98	193,40	196,55	101,63	US\$ Miliar
		2	Pertumbuhan ekspor industri pengolahan nonmigas	-0,43	2,95	7,19	35,11	8,35	16,45	5,75	-9,27	3,76	5,33	141,76	Persen
		3	Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap total ekspor	80,19	80,3	74,9	76,49	75,47	70,67	75,97	72,24	73,46	74,25	101,08	Persen
		4	Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang diekspor	27	28,91	28	30,75	29	41	30	44,44	32	32,44	101	Persen
		5	Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri pengolahan nonmigas	40,22	56,08	39,07	43,99	38,05	48,09	37,03	38,9	36,21	40,61	87,85	Persen
SS5	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	1	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas	18,6	15,53	18,8	21,29	19,2	21,17	19,6	21,23	20	21,30	106,50	Persen
		2	Wirausaha industri kecil yang tumbuh	4.000	7.808	8.000	13.058	12.000	20.592	20.800	46.280	47.185	59.734	126,60	WUB
		3	IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	40	24	80	74	120	149	160	217	257	334	129,96	IKM
		4	Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM	2,4	10,55	2,75	10,5	3,35	10,22	4,05	10,08	9	9,94	110,44	Persen
SS6	Meningkatnya Persebaran Industri	1	KI prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi	11	12	13	13	15	14	16	15	17	16	94,12	KI
		2	KI yang dikembangkan	18	18	22	22	26	26	30	30	33	35	106,06	KI
		3	KI dengan zona tematik yang beroperasi	2	2	2	3	3	3	4	4	5	4	80,00	KI
		4	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa	32.3	29,51	30,7	31,04	31,5	31,96	32,3	32,02	33,1	32,30	97,58	Persen
SS7	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	1	Indeks Reformasi Hukum	Belum Menjadi Indikator								73	98,70	135,21	Nilai
		2	Indeks Kualitas Kebijakan	Belum Menjadi Indikator								65	65,00	100	Nilai
		3	Persentase kesesuaian jumlah peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian yang ditetapkan dengan program penyusunan	Belum Menjadi Indikator		60	61,82	65	66,67	67	72,22	67	79,74	119,01	Persen

No	Sasaran Tujuan/ Strategis	Indikator Kinerja		2020		2021		2022		2023		2024			Satuan
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	C	
			peraturan perundang-undangan												
SS8	Terselenggaranya a Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	1	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	33	37	37	46	46	66	61	96	125	154	123,20	Perusahaan
		2	Infrastruktur kompetensi industri	8	8	8	4	10	7	7	8	7	7	100	SKKNI
SS9	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Batas toleransi temuan pengawasan eksternal	1,5	0,15	1,4	0,033	1,3	0,033	1,2	0,037	0,80	0,051	193,6	Persen
		2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	91	67,57	91,5	93,76	92	86,52	92	98,33	92,20	90,95	98,64	Persen
		3	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	3	3	3	2,6	3	2,85	2,89	3,445	3	3,69	122,9	Level
SS10	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin	Belum menjadi indikator		71	73,24	73	56,87	71	71,69	72	81,27	112,88	Indeks
		2	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	Belum menjadi indikator		82	98,05	85	96,91	87	98,41	90	93,49	103,87	Persen
SS11	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas	1	Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan	2,8	3,54	3,1	3,17	3,12	3,34	3,13	3,24	3,18	3,18	100	Skala
		2	Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik	78	78,6	80	98,96	83	100	85	96,88	90	100	111,11	Persen
SS12	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	1	Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	Opini
		2	Indeks RB Kementerian Perindustrian	78	78,01	78,3	78,57	78,6	79,2	78,7	80,01	79,2	80,01	101,02	Nilai
SS13	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	1	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	95,5	95,9	95,7	98,1	95,9	97,96	96,1	98,25	96,3	98,53	102,32	Persen
		2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	78	78,04	78,2	78,58	78,4	78,7	78,6	79,2	79,3	79,38	100,10	Nilai

Pada tahun 2024, tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas adalah sebanyak 19,96 juta orang atau mencapai 98,2 persen dari target berdasarkan perjanjian kinerja Kementerian Perindustrian pada tahun 2024 yang sebanyak 20,33 juta orang. Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan RPJMN dan Renstra Kementerian Perindustrian adalah 21,94 juta orang. Sepanjang tahun 2024, gelombang PHK yang terjadi akibat dampak pandemi Covid-19, perlambatan ekonomi global, serta peningkatan produk impor ilegal menjadi tantangan besar bagi sektor industri padat karya. Kementerian Perindustrian melalui program pelatihan 3 in 1 diharapkan menjadi salah satu solusi dimana tidak hanya meningkatkan keahlian tenaga kerja, tetapi

juga membantu perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga dapat menekan angka pengangguran dan meningkatkan daya saing industri nasional.

Pada tahun 2024, persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja adalah sebesar 13,80 persen atau mencapai 96,6 persen dari target berdasarkan perjanjian kinerja Kementerian Perindustrian pada tahun 2024 yang sebesar 14,29 persen. Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan RPJMN dan Renstra Kementerian Perindustrian adalah 15,65 persen. Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas belum menunjukkan kenaikan yang sebanding. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penurunan permintaan global yang mempengaruhi produksi dan keputusan perusahaan untuk melakukan efisiensi tenaga kerja. Selain itu, tantangan seperti kesenjangan keterampilan antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja yang tersedia turut memengaruhi dinamika penyerapan tenaga kerja di sektor ini.

Pada tahun 2024, produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas adalah sebesar Rp120,00 juta per orang per tahun atau mencapai 98,14 persen dari target berdasarkan perjanjian kinerja Kementerian Perindustrian pada tahun 2024 yang sebesar Rp122,30 juta untuk setiap orang setiap tahun. Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian 2020—2024 adalah Rp124,73 juta per orang per tahun. Kementerian Perindustrian terus berupaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas guna menghadapi tantangan era Industri 4.0. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penyelenggaraan pelatihan 3 in 1 yang mencakup *skilling*, *upskilling*, dan *reskilling*. Program ini bertujuan untuk mencetak tenaga kerja yang lebih adaptif dan berdaya saing. *Skilling* difokuskan pada calon tenaga kerja yang belum memiliki pengalaman di industri. Sementara *upskilling* bertujuan meningkatkan kompetensi pekerja yang sudah berpengalaman agar siap untuk jenjang karier yang lebih tinggi. Sedangkan *reskilling* diberikan kepada tenaga kerja yang terdampak perubahan teknologi agar mereka dapat beradaptasi dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.

Salah satu indikator yang penting dalam pemantauan pemulihan sektor industri adalah utilisasi. Utilisasi menggambarkan perbandingan/rasio realisasi produksi terhadap kapasitas produksi. Data utilisasi berasal dari industri yang disampaikan melalui SIINas. Pada tahun 2024, utilisasi sektor industri adalah sebesar 65,28 persen atau mencapai 92,99 persen dari target berdasarkan perjanjian kinerja Kementerian Perindustrian pada tahun 2024 yang sebesar 70,20 persen. Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 adalah 77,52 persen. Belum tercapainya target utilisasi disebabkan oleh beberapa faktor utama, di antaranya keterbatasan bahan baku dan rendahnya permintaan pasar. Contohnya, industri pengolahan kelapa nasional menghadapi kesulitan akibat produksi kelapa yang turun hingga 31 persen pada 2024. Dampak *El Niño* yang berkepanjangan mengakibatkan tanaman kelapa kekurangan air,

sehingga produksi menurun drastis. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Perindustrian telah menyusun kebijakan tata niaga bahan baku kelapa agar dapat diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Selain itu, permintaan yang masih rendah untuk beberapa sektor industri aneka, seperti perhiasan, pakaian olahraga, dan mainan anak, turut menghambat peningkatan utilisasi.

Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi merupakan nilai ekspor dari sebanyak 1.530 produk industri yang masuk dalam kategori produk berteknologi tinggi berdasarkan *Harmonized System* (HS) dibagi dengan total nilai ekspor Indonesia. Pada tahun 2024, kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi adalah sebesar 11,95 persen atau mencapai 87,23 persen dari target berdasarkan Perjanjian Kinerja Kementerian Perindustrian pada tahun 2024 yang sebesar 13,70 persen. Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan RPJMN dan Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024 adalah 13,70 persen. Transformasi digital industri penting untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi ekspor produk teknologi tinggi. Namun, realisasi kontribusi ekspor tidak langsung mengikuti transisi ini karena beberapa kendala, seperti jeda waktu implementasi, keterbatasan kemampuan, dan persaingan pasar.

Pada tahun 2024, persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Kemenperin adalah sebanyak 89,48 persen atau mencapai 99,42 persen dari target berdasarkan perjanjian kinerja Kementerian Perindustrian pada tahun 2024 yang sebanyak 90 persen. Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 adalah 90 persen. Terdapat sejumlah kendala yang menghambat pencapaian target produk dalam negeri (PDN) dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perindustrian seringkali menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti alat laboratorium dan bahan kimia, yang produk dalam negerinya masih terbatas. Akibatnya, pengadaan alat-alat tersebut harus dilakukan melalui impor, yang memerlukan proses izin yang panjang dan kompleks, mulai dari pengiriman hingga instalasi serta pelatihan personel. Selain itu, perbedaan penggunaan akun anggaran untuk mengukur realisasi PDN dan TKDN, serta belum masuknya akun yang digunakan pada unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dalam pengukuran, menambah kompleksitas dalam pengelolaan penggunaan produk dalam negeri.

Pada tahun 2024, realisasi indikator substitusi impor produk industri pengolahan nonmigas adalah sebesar -4,58 atau tidak mencapai target berdasarkan perjanjian kinerja Kementerian Perindustrian pada tahun 2024 yang sebesar 35 persen. Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024 adalah 35 persen.

Berdasarkan daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri pada *website* (<http://tkdn.kemenperin.go.id>), data hingga akhir tahun 2024 tingkat komponen dalam negeri/TKDN (rerata tertimbang) adalah sebesar 52,67 persen atau mencapai 99,38 persen dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Kementerian Perindustrian tahun 2024 sebesar 53 persen. Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan RPJMN dan Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024 adalah 53,0 persen. Untuk mendukung pencapaian indikator TKDN, Kemenperin melakukan implementasi rantai alur bahan baku yang terintegrasi serta pengembangan sistem informasi pengawasan neraca komoditas, fasilitasi temu bisnis manufaktur (*business matching*), dan bimbingan teknis mengenai tata cara penghitungan TKDN bagi sektor industri serta *workshop* pendaftaran *e-catalog*.

Pada tahun 2024, rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri pengolahan nonmigas adalah sebesar 40,61 persen atau mencapai 87,85 persen dari target berdasarkan Perjanjian Kinerja Kementerian Perindustrian pada tahun 2024 yang sebesar 36,21 persen. Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024 adalah 36,12 persen.

Pada tahun 2024, Kawasan Industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi adalah sebanyak 16 (enam belas) KI (kumulatif) atau mencapai 94,12 persen dari target Perjanjian Kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2024 yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) KI (kumulatif). Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan RPJMN dan Renstra Kementerian Perindustrian adalah 17 (tujuh belas) KI (kumulatif). Target untuk tahun 2024 sebesar 17 (tujuh belas) KI (kumulatif) RPJMN yang terbit IKUI-nya, dengan target yang tercapai hingga Tahun 2024 sebesar 16 (enam belas) KI (kumulatif) dengan rincian pada tabel dibawah ini. Dari 9 (sembilan) KI Prioritas Luar Jawa yang ditargetkan untuk beroperasi, sampai dengan akhir tahun 2024 terdapat 1 (satu) KI yang masih belum terbit IUKI-nya yaitu KI Tanggamus.

Tabel 7 Daftar KI RPJMN yang Beroperasi Tahun 2019-2024

Tahun	Jumlah KI	Uraian
2019	8	KI Sei Mangkei, KI Dumai, KI Batu Licin, KI Bitung, KI Morowali, KI Palu, KI Bantaeng, dan KI Konawe
2020	4	KI Sadai, KI Ladong, KI Wedabay, dan KI Ketapang
2021	1	KI Tanjung Enim
2022	1	Kalimantan Industrial Park Indonesia di Kab. Bulungan, Kaltara/ KI Tanah Kuning
2023	1	KI Galang Batang di Kabupaten Bintan
2024	1	KI Takalar

Jumlah KI dengan zona tematik yang beroperasi pada tahun 2024 adalah sebanyak 4 (empat) KI (kumulatif) atau mencapai 80 persen dari target Perjanjian Kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2024 yaitu sebanyak 5 (lima) KI (kumulatif). Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan RPJMN dan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020—2024 adalah 3 (tiga) KI (kumulatif). Indikator ini belum dapat memenuhi target penambahan 1 (satu) KI karena calon pengelola KI Halal yaitu KI SIRIE dan KI Makassar belum dapat memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan surat keterangan sebagai KI Halal.

Pada tahun 2024, persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa adalah sebesar 32,30 persen atau

mencapai 97,58 persen dari target Perjanjian Kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2024 yaitu sebesar 33,1 persen. Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020—2024 adalah 33,1 persen.

Pada tahun 2024, hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh unit kerja adalah sebanyak 90,95 persen atau telah mencapai 98,64 persen dari target perjanjian kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2024 yang sebesar 92,20 persen. Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 adalah 93 persen. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator ini antara lain pemahaman yang kurang baik terhadap rekomendasi atau dampak dari rekomendasi yang dapat menyebabkan penundaan atau pelaksanaan yang tidak tepat, serta perubahan peraturan perundang-undangan yang dapat memengaruhi pelaksanaan rekomendasi.

Secara menyeluruh, capaian kinerja sasaran sesuai dokumen Renstra Kemenperin 2020—2024 adalah sebagaimana Tabel 7 berikut.

Tabel 8 Capaian Kinerja Sasaran Renstra Kemenperin 2020—2024

Tahun	Indikator Kinerja		Persentase Capaian
	Mencapai Target	Tidak Mencapai Target	
2020	31	11	73,81
2021	43	8	84,31
2022	35	16	68,62
2023	38	13	74,51
2024	36	15	70,59
Rata-rata capaian Renstra Kemenperin 2020-2024			74,37

Dalam mewujudkan fokus pengembangan industri pada periode tahun 2025—2029, maka diperlukan gambaran pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra Kemenperin 2020—2024 dan memperhatikan aspirasi masyarakat.

3. Aspirasi Masyarakat

Pembangunan industri nasional tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi juga menjadi perhatian dan harapan besar dari berbagai elemen masyarakat. Aspirasi masyarakat merupakan harapan dan tujuan dari masyarakat untuk kemajuan industri dimasa yang akan datang. Adapun aspirasi masyarakat telah dirangkum sebagai berikut:

a. Melanjutkan Hilirisasi Industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA)

Hilirisasi industri berbasis SDA diharapkan dapat menjadi jalan untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, membuka lapangan kerja lokal, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Fokus diarahkan pada penguatan industri berbasis nikel, bauksit, kelapa sawit, hasil laut, tekstil, serta pangan strategis. Melalui hilirisasi, diharapkan struktur industri nasional menjadi lebih

dalam dan kompleks, meningkatkan nilai ekspor, serta memperkuat daya saing manufaktur nasional di pasar global.

b. Persebaran Pembangunan ke Seluruh Wilayah Indonesia

Pemerintah diharapkan terus mendorong pemerataan industri antarwilayah, khususnya di luar Pulau Jawa. Pengembangan kawasan industri yang terintegrasi, berbasis klaster, dan memiliki infrastruktur pendukung lengkap menjadi kunci pemerataan pertumbuhan industri. Strategi ini mendorong pembentukan aglomerasi industri baru di luar Pulau Jawa, memaksimalkan peran kawasan industri hijau, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan pusat pertumbuhan industri berbasis potensi daerah.

c. Peningkatan Efisiensi Industri dengan Pemanfaatan Teknologi

Transformasi industri berbasis teknologi terus didorong dengan melakukan penguatan kebijakan, dukungan infrastruktur, maupun pengembangan sumber daya manusia digital. Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi di berbagai sektor industri yang akan meningkatkan produktivitas dan penggunaan energi dan bahan baku yang lebih optimal, kedepannya pemanfaatan teknologi pada sektor industri diharapkan mempercepat transformasi industri yang inovatif dan berkelanjutan.

d. Percepatan Transisi Menuju Industri Hijau

Pembangunan dan pengembangan industri yang inklusif dan berkelanjutan juga menjadi hal yang perlu diakselerasi, khususnya melalui penerapan prinsip industri hijau. Ada kesadaran yang semakin tumbuh di tengah masyarakat terhadap dampak industri terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumber daya. Aspirasi ini tercermin dari dorongan agar industri di masa depan menerapkan prinsip efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan pemanfaatan energi terbarukan.

e. Penguatan Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM)

Diperlukan kebijakan afirmatif dalam penguatan industri kecil dan industri menengah (IKM) agar tidak tertinggal dalam era transformasi digital dan globalisasi. Pelaksanaan program pemberdayaan IKM diharapkan dapat lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan lokal, mulai dari akses pembiayaan, pelatihan keterampilan teknis, hingga fasilitasi pemasaran berbasis digital. Digitalisasi IKM melalui platform *e-commerce* dan adopsi teknologi sederhana menjadi tuntutan nyata untuk meningkatkan daya saing sektor ini.

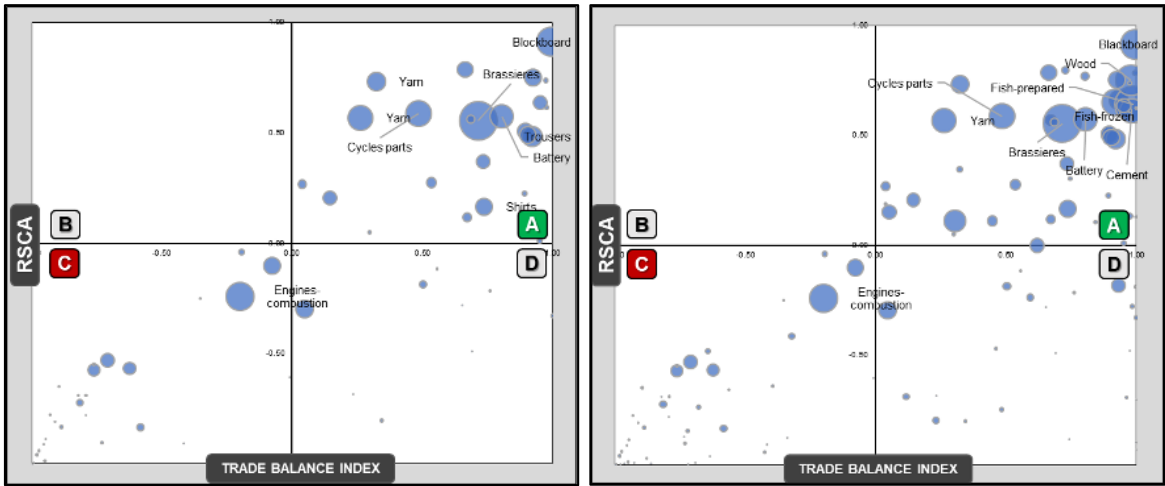
B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

- a. Indonesia memiliki beberapa perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement/FTA*) dengan beberapa negara mitra dagang utamanya, diantaranya *Regional Comprehensive Economic Agreement* (RCEP), *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA), *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA). Sejumlah FTA tersebut menawarkan manfaat penurunan tarif bea masuk, persyaratan *Rules of Origin* (ROO), dan *Non-Tariff Barrier* (NTB) yang dapat dimanfaatkan oleh industri dalam negeri untuk memperoleh komponen produksi maupun memperkuat eksportnya. Walaupun demikian, manfaat-

manfaat tersebut masih sangat bergantung pada tingkat utilisasi FTA yang ada oleh pelaku industri baik importir maupun eksportir.

- b. Pada perjanjian RCEP, produk-produk Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan tarif yang lebih rendah dalam jangka pendek. Terutama mengingat bahwa produk-produk tersebut merupakan produk unggulan ekspor tradisional Indonesia seperti produk kayu, tekstil, baterai, komponen sepeda, dan produk ikan.



(a) Pada tahun ke-1

(b) Pada tahun ke-10

Sumber: Estimasi berdasarkan data WITS (2022)

Gambar 5 Grafik *Revealed Symmetric Comparative Advantage (RSCA)/ Trade Balance Index (TBI)* Indonesia

- c. Indonesia sebagai salah satu negara berpenduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi pasar yang sangat menjanjikan. Populasi muslim di Indonesia mencapai 245,93 juta jiwa dengan potensi konsumsi diperkirakan mencapai Rp9.665,3 triliun per tahun. Sementara itu, populasi penduduk muslim di dunia diperkirakan akan terus bertambah hingga mencapai 2,2 miliar jiwa atau 26,5 persen dari total populasi dunia di tahun 2030. Berdasarkan Laporan *State of The Global Islamic Economy* (SGIE) Tahun 2023/2024, jumlah konsumsi produk halal diproyeksikan mencapai USD3,1 triliun pada tahun 2027 dengan tingkat pertumbuhan rerata tahunan sebesar 4,8 persen. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mencatat pada periode Januari-Oktober 2024 total ekspor produk halal Indonesia mencapai USD41,42 miliar. Oleh karena itu, ekspor produk halal Indonesia ke negara-negara mayoritas muslim dan anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berpotensi menjadi pasar alternatif bagi ekspor Indonesia. Letak geografis Indonesia yang dekat dengan negara-negara OKI menjadi Indonesia memiliki posisi strategis dalam rantai nilai halal global.
- d. Guna mendorong pertumbuhan dan penguatan industri dalam negeri, pemerintah mendorong pembelian barang dan/atau jasa yang diproduksi di dalam negeri melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Program tersebut bertujuan mengoptimalkan penggunaan produk, barang, dan jasa hasil produksi dalam

negeri, terutama pada pengadaan yang dibiayai oleh anggaran pemerintah.
Berdasarkan data *Bigbox* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pada tahun 2024 terdapat potensi belanja pemerintah sebesar Rp1.253,72 triliun dimana Rp854,88 triliun dikomitmenkan sebagai belanja PDN. Nilai tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2023 dimana potensi belanja pemerintah sebesar Rp1.209,34 triliun dimana sebesar Rp772,93 triliun diperuntukkan sebagai belanja PDN.

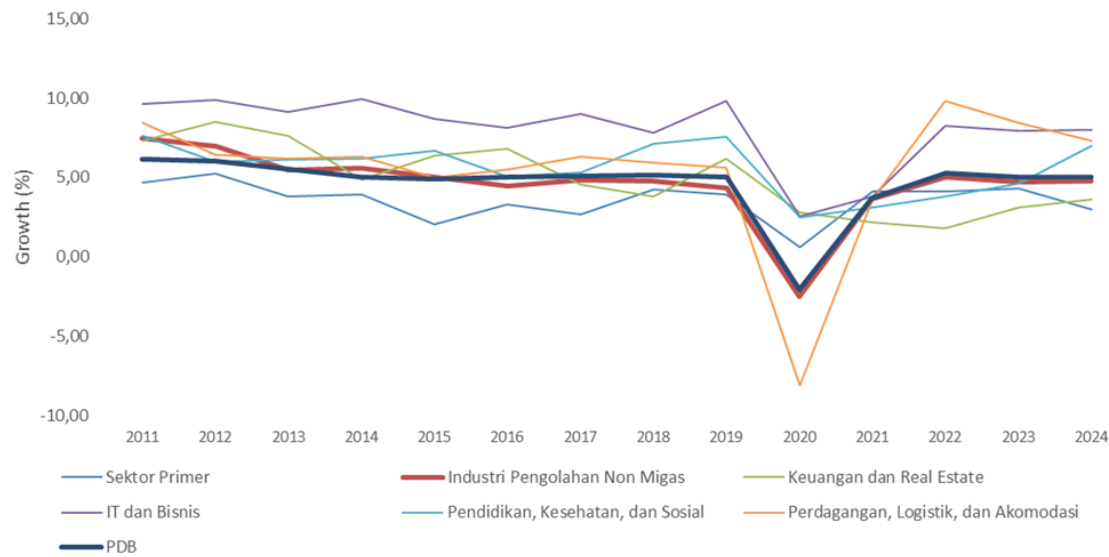
2. Permasalahan

a. Permasalahan Umum

1) Pertumbuhan Tidak Seimbang

Berdasarkan Gambar 5, dapat dilihat bahwa terdapat ketimpangan pertumbuhan antarsektor dimana beberapa sektor mengalami pertumbuhan yang pesat, sementara pada sektor lain cenderung stagnan bahkan mengalami penyusutan. Sektor seperti teknologi informasi dan bisnis tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan dengan sektor lainnya, hal tersebut dapat menyebabkan alokasi sumber daya berupa modal, tenaga kerja, dan investasi banyak mengalir ke sektor tersebut.

Di sisi lain, sektor industri pengolahan yang menyerap lebih banyak tenaga kerja dibanding sektor digital mengalami pertumbuhan yang lebih lambat, sehingga dapat mengakibatkan lapangan pekerjaan tidak tumbuh berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada meningkatnya ketimpangan sosial dan pengangguran terselubung.



Sumber: BPS diolah 2025

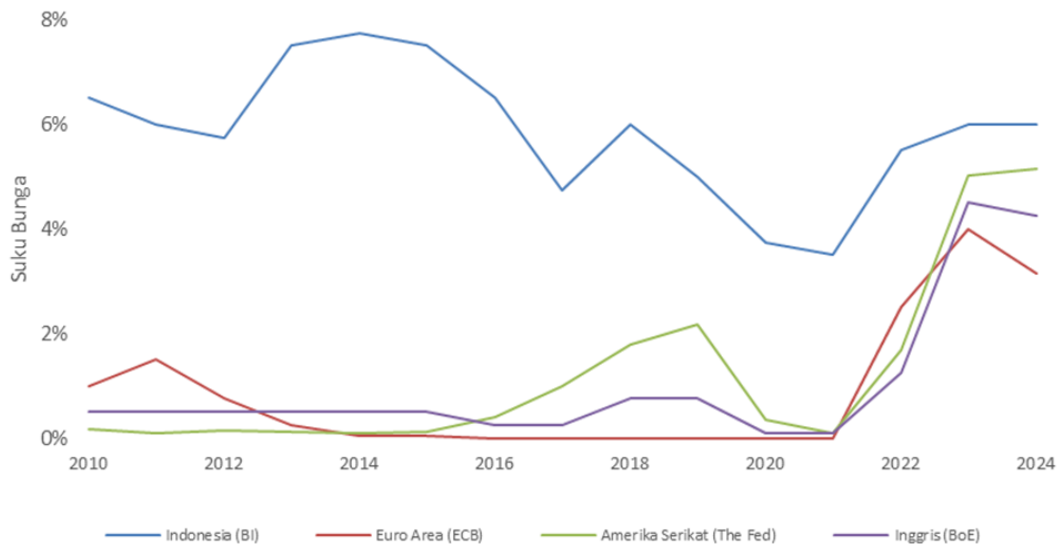
Gambar 6 Pertumbuhan Per Sektor (2011—2024)

Adapun data laju pertumbuhan pada setiap sektor secara lengkap

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDB (Dalam Persen)													
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,95	4,59	4,20	4,24	3,75	3,37	3,92	3,88	3,61	1,77	1,87	2,25	1,31	0,67
2	Pertambangan dan Penggalian	4,29	3,02	2,53	0,43	-3,42	0,95	0,66	2,16	1,22	-1,95	4,00	4,38	6,12	4,90
3	Industri Pengolahan Non Migas	7,46	6,98	5,45	5,61	5,05	4,43	4,85	4,77	4,34	-2,52	3,67	5,01	4,69	4,75
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,69	10,06	5,23	5,90	0,90	5,39	1,54	5,47	4,04	-2,34	5,55	6,61	4,91	4,77
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,73	3,34	3,32	5,24	7,07	3,60	4,59	5,56	6,83	4,94	4,97	3,23	4,90	1,56
6	Konstruksi	9,02	6,56	6,11	6,97	6,36	5,22	6,80	6,09	5,76	-3,26	2,81	2,01	4,91	7,02
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,66	5,40	4,81	5,18	2,54	4,03	4,46	4,97	4,60	-3,79	4,63	5,53	4,85	4,86
8	Transportasi dan Pergudangan	8,31	7,11	6,97	7,36	6,71	7,45	8,49	7,05	6,38	-15,05	3,24	19,87	13,96	8,69
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,86	6,64	6,80	5,77	4,31	5,17	5,41	5,68	5,79	-10,26	3,88	11,94	10,00	8,56
10	Informasi dan Komunikasi	10,02	12,28	10,39	10,12	9,70	8,88	9,63	7,02	9,42	10,61	6,82	7,73	7,59	7,57
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,97	9,54	8,76	4,68	8,58	8,93	5,47	4,17	6,61	3,25	1,56	1,93	4,77	4,74
12	Real Estate	7,68	7,41	6,54	5,00	4,11	4,69	3,60	3,48	5,76	2,32	2,78	1,72	1,43	2,50
13	Jasa Perusahaan	9,24	7,44	7,91	9,81	7,69	7,36	8,44	8,64	10,25	-5,44	0,73	8,77	8,24	8,38
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,43	2,13	2,56	2,38	4,63	3,20	2,05	6,97	4,66	-0,03	-0,33	2,52	1,51	6,40
15	Jasa Pendidikan	6,68	8,22	7,44	5,47	7,33	3,84	3,72	5,36	6,30	2,61	0,11	0,55	1,77	3,75
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,25	7,97	7,96	7,96	6,69	5,16	6,84	7,15	8,66	11,56	10,45	2,75	4,67	8,11
17	Jasa lainnya	8,22	5,76	6,40	8,93	8,08	8,01	8,73	8,95	10,57	-4,10	2,12	9,47	10,52	9,80
Produk Domestik Bruto		6,17	6,03	5,56	5,01	4,88	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,70	5,31	5,05	5,03

Sumber: BPS diolah 2025

- 2) Kebutuhan Akan Kapital yang Tinggi
- Berdasarkan Gambar 7, tren suku bunga di Indonesia (yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/BI) dari tahun 2010 hingga tahun 2024 jika dibandingkan dengan suku bunga di Eropa (*European Central Bank/ECB*), Amerika Serikat (*Federal Reserve System/FED*), dan Inggris (*Bank of England/UK*), selalu lebih tinggi.
- Suku bunga yang tinggi tersebut berpengaruh terhadap kebutuhan akan kapital dalam berbagai sektor industri, terutama kapital yang bergantung dengan pendanaan dari eksternal. Hal tersebut akan meningkatkan biaya pinjaman karena bunga yang harus dibayar oleh perusahaan menjadi lebih besar. Sehingga berdampak pada pengurangan profitabilitas. Jika suku bunga tinggi maka investasi jangka panjang menjadi kurang menarik bagi investor karena *return* bisnis harus lebih besar dari suku bunga agar tetap bisa menguntungkan.



Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI)-2024

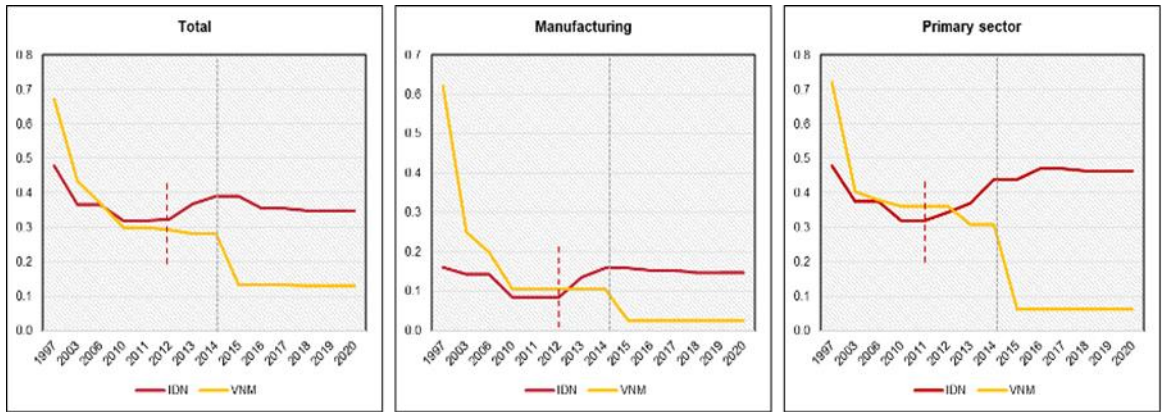
Gambar 7 Perbandingan Suku Bunga Antara Indonesia dengan Tiga Negara Lainnya Tahun 2010—2024

b. Permasalahan Eksternal

1) Aliran *Foreign Direct Investment* (FDI) yang Melambat

Walaupun secara nominal aliran FDI yang masuk ke Indonesia terlihat meningkat, namun jika dihitung secara perkapita (FDI dibagi dengan jumlah populasi penduduk) nilainya relatif stagnan sejak tahun 2013. Mengalirnya FDI di Indonesia tergambarkan melalui masuknya perusahaan multinasional yang membawa teknologi baru, membuka lapangan pekerjaan, serta membuat industri lebih kompetitif. Apabila peningkatan aliran FDI ini melambat, hal tersebut juga turut menggambarkan perlambatan pada sektor industri di Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal menunjukkan bahwa industri alat utama, angkutan laut untuk penyeberangan, angkutan udara, masih menunjukkan pembatasan pada kepemilikan modal asing. Indeks restriksi FDI Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan negara mitra seperti Vietnam. Sedangkan pada penerapan TKDN, hampir semua industri pengolahan di Indonesia telah menerapkan TKDN dengan muatan yang terus meningkat setiap tahunnya.



Sumber: FDI restrictiveness index (OECD, 2022)

Gambar 8 Perbandingan Restriksi FDI
Antara Indonesia dengan Vietnam

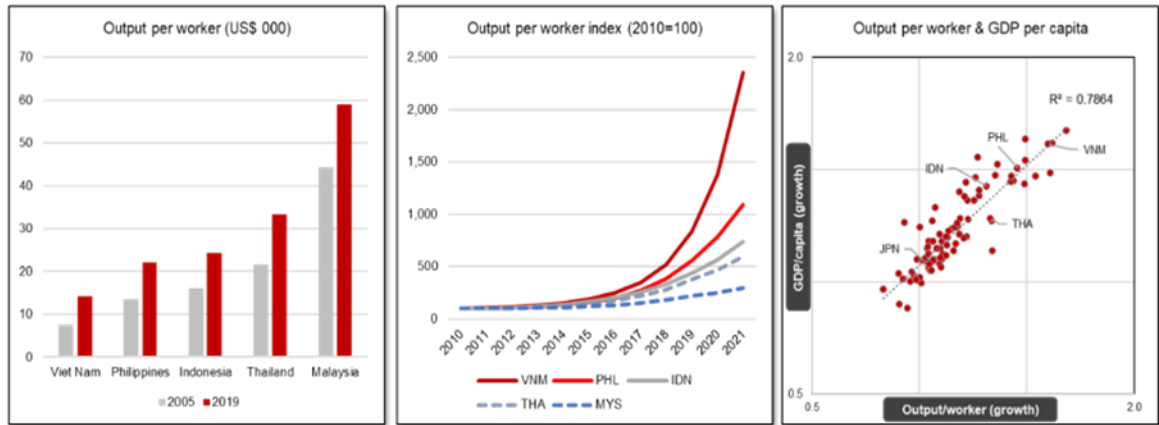
2) Biaya Logistik Nasional yang Kurang Kompetitif

Berdasarkan data Bank Dunia, *Logistic Performance Index* (LPI) Indonesia merosot dari *ranking* ke-49 di tahun 2018 menjadi peringkat ke-64 di tahun 2023 (World Bank, 2023). Penurunan *ranking* ini sekaligus mengindikasikan biaya logistik di Indonesia masih relatif mahal dan kurang kompetitif dibanding negara ASEAN. Rendahnya daya saing logistik Indonesia ini menyebabkan biaya produksi di Indonesia relatif kurang bersaing. Secara makro, biaya logistik Indonesia mencapai 24 persen dari GDP, lebih mahal dibandingkan dengan Vietnam yang tercatat sebesar 16 persen, Thailand dan Malaysia sekitar 13 persen, dan Singapura di angka 8 persen (Banomyong et al., 2022; Santoso et al., 2021). Mahalnya biaya logistik termanifestasi melalui tingginya biaya produksi, yang pada akhirnya membuat produk yang dihasilkan relatif mahal dan kurang bersaing.

3) Produktivitas Pekerja yang Rendah

Secara makro, salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia adalah pertumbuhan *output* per pekerja yang relatif lambat. Meskipun tidak bisa dibandingkan secara langsung, pertumbuhan produktivitas pekerja di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan di Vietnam dan Filipina.

Produktivitas tenaga kerja para pekerja di kawasan industri masih relatif rendah jika dibandingkan dengan upah yang dibayarkan. Hal ini terlihat dari hasil survei lembaga Jepang (*Japan External Trade Organization/JETRO*, 2020) yang menyimpulkan bahwa tingkat level upah di Indonesia terlalu tinggi jika dibandingkan dengan produktivitas serupa di Vietnam. Pertanyaan yang diajukan terkait dengan kepatutan upah pada level gaji yang diberikan. Sebanyak 64 persen perusahaan afiliasi Jepang yang disurvei di Indonesia menyatakan bahwa level gaji yang diberikan tidak sesuai (terlalu tinggi). Sebaliknya 60 persen responden di Vietnam menyatakan bahwa level gaji dan produktivitas pekerja di sana sudah sesuai.



Sumber: Estimasi berdasarkan data *World Development Indicator* (World Bank, 2022)

Gambar 9 Perbandingan Produktivitas Per Pekerja Antara Indonesia dan 4 Negara Lainnya

4) Tingginya Penggunaan Energi Fosil

Penggunaan energi fosil diatas 60 persen dari total penggunaan energi nasional (*Institute for Essential Services Reform/IESR*, 2022).

5) Kemampuan Inovasi Yang Rendah

Kemampuan inovasi Indonesia masih relatif rendah yang dibuktikan dengan *ranking global innovation index*. Pada tahun 2022, Indonesia berada di peringkat ke-75 dari 132 negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya yang sudah dikeluarkan untuk investasi inovasi ternyata belum efektif menghasilkan *output* yang lebih berkualitas dan inovatif, bahkan Indonesia (Jakarta) belum menjadi *top of mind* kerjasama inovasi bagi investor Jepang.

c. Permasalahan Internal

1) Rendahnya Pemanfaatan FTA

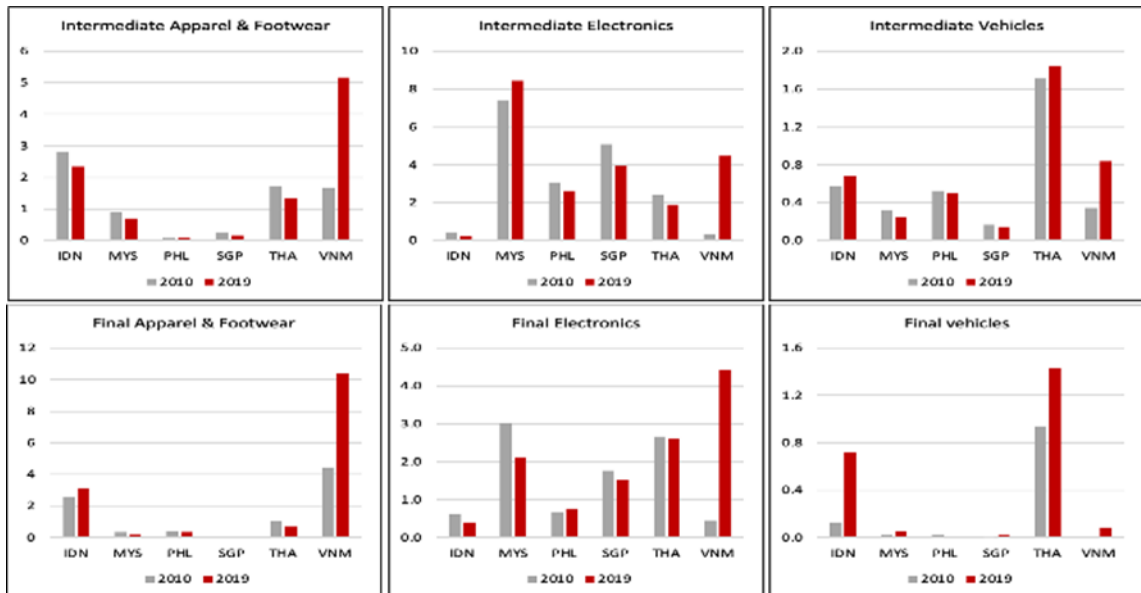
Utilisasi penggunaan FTA oleh eksportir Indonesia masih cenderung rendah dibandingkan beberapa negara lain di Kawasan Asia Tenggara. Hal ini mengakibatkan berkurangnya nilai kompetitif produk asal Indonesia. Tingkat utilisasi FTA ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain besarnya penurunan tarif setelah memperhitungkan biaya pengurusan administrasi Surat Keterangan Asal (SKA), volume ekspor/impor, tingkat restriksi *Rules of Origin* (ROO), serta *learning effect*, dan ketersediaan informasi tentang FTA.

2) Dominasi Produk Berbasis SDA Dalam Ekspor

Ekspor Indonesia ke pasar global masih didominasi oleh produk-produk berbasis SDA. Berdasarkan data BPS tahun 2024, kontribusi ekspor industri pengolahan nonmigas sebesar 74,25 persen dari total nilai ekspor nasional. Meskipun angka tersebut terbilang besar, namun komoditas ekspor masih didominasi oleh produk berbasis SDA dengan nilai tambah rendah seperti logam dasar, *Crude Palm Oil* (CPO), kimia dasar, serta elektronik dan transportasi dengan perkiraan sebesar 65 persen sampai dengan 70 persen dari total kontribusi ekspor industri pengolahan nonmigas.

3) Partisipasi ke Dalam *Global Value Chain* (GVC) Masih Rendah

Partisipasi Indonesia dalam GVC relatif masih rendah dan secara umum mengalami penurunan kecuali pada produk final otomotif. Penurunan partisipasi GVC terutama terlihat pada produk pakaian dan alas kaki antara, serta elektronika antara dan jadi. Sementara peningkatan terlihat pada produk akhir pakaian dan alas kaki, serta kendaraan baik antara maupun jadi.



Sumber: Estimasi berdasarkan data WITS (2022)

Gambar 10 Perbandingan Partisipasi Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam Dalam *Global Value Chain* (2010 dan 2019)

Penurunan partisipasi Indonesia di beberapa produk GVC menunjukkan lemahnya daya saing produk Indonesia di pasar dunia sehingga diperlukan identifikasi atas faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan daya saing ini.

4) Kebijakan Industri dan Perdagangan yang Belum Terkoordinasi Dengan Baik

Ketika Indonesia berencana untuk meningkatkan pertumbuhan industri yang berpartisipasi ke dalam GVC, kebijakan perdagangannya dibuat restriktif. Sebagai contoh, *Non-Tariff Barrier* (NTB) pada produk-produk GVC seperti industri makanan dan minuman masih relatif tinggi. Hal ini menyebabkan industri makanan dan minuman menjadi sulit untuk bersaing di pasar global.

5) Standarisasi dan Sertifikasi yang Masih Terkendala

Masih terdapat kendala dalam penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang banyak disebabkan oleh faktor eksternal perusahaan, seperti lokasi pengujian yang jauh, biaya yang mahal, dan proses yang lama.

6) Daya Saing Produk yang Rendah dan Semakin Kompleks

Produk industri pengolahan semakin kehilangan daya saingnya di pasar global. Ketika beberapa negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Thailand semakin

bergerak ke arah ekspor produk dengan *knowledge intensive* yang tinggi, ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas. Di samping itu, daya saing produk unggulan ekspor Indonesia pun relatif stagnan dengan tren menurun.

7) *Mismatch* (ketidaksesuaian) Produksi dengan Permintaan Global

Terjadi *mismatch* (ketidaksesuaian) antara output industri dengan apa yang menjadi permintaan global. Sebagai contoh, Indonesia mengekspor produk dengan kode HS 85 yang diantaranya mencakup produk mesin dan perlengkapan listrik serta bagian-bagiannya; perekam dan alat reproduksi suara, perekam dan alat reproduksi gambar dan suara televisi, serta bagian dan aksesorinya, yang permintaannya justru lambat di pasar global dalam 5 (lima) tahun terakhir (*Trademap*, 2023).

8) Tantangan Dalam Adopsi Teknologi

Adopsi teknologi di industri pengolahan akan kian meningkat pasca Covid-19, sehingga membutuhkan kesiapan Sumber Daya Manusia. Namun tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh tenaga kerja tidak terampil (*unskilled labor*) dengan persentase sebesar 89,3 persen. Bappenas menyampaikan dalam forum Seminar Beasiswa LPDP pada tahun 2023 bahwa hanya 18,47% lulusan pendidikan tinggi di Indonesia berasal dari program STEM.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Sesuai dengan RPJMN Tahun 2025—2029 yang merupakan tahap pertama dalam kerangka pencapaian visi mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, telah ditetapkan visi Presiden periode 2025—2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut, ditetapkan 8 (delapan) misi yang tergambar dalam kerangka “Asta Cita” 2025—2029 yakni:

- a. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- b. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
- c. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- d. memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- e. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- f. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- g. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
- h. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam pencapaian pembangunan nasional periode tahun 2025—2029 yang tertuang dalam RPJMN, telah dipetakan Kementerian/Lembaga berdasarkan pencapaian asta cita tersebut. Kementerian Perindustrian merupakan salah satu instansi yang diharapkan dapat mendukung pencapaian misi kelima yakni “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis SDA Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri”.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan Visi Kementerian Perindustrian Tahun 2025—2029 yaitu **“Terwujudnya Industri Nasional Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. “Berdaulat” dimaksudkan agar keberlangsungan industri mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri. “Maju” dimaksudkan agar sektor industri berdaya saing global, inovatif, berteknologi tinggi dengan struktur industri nasional yang kuat, berkeadilan dan menjadi motor penggerak utama perekonomian.

“Berkelanjutan” dimaksudkan agar pembangunan sektor industri menjaga kelestarian dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

B. Misi

Guna mewujudkan Visi tersebut, maka disusun langkah-langkah untuk membangun industri di Indonesia sebagai Misi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) dan pengembangan Industri Prioritas;
2. menumbuhkan dan mempercepat persebaran pembangunan industri yang inklusif;
3. mewujudkan industri yang berdaya saing berbasis inovasi dan teknologi;
4. mewujudkan pembangunan industri berkelanjutan; dan
5. meningkatkan ekspor dan diversifikasi produk.

C. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan yaitu **“Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional”**, yang pencapaiannya secara khusus digambarkan atas pencapaian indikator kinerja tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu:

1. Rasio Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 18,17 persen menjadi sebesar 20,56 persen pada tahun 2029;
2. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 5,93 persen menjadi sebesar 8,58 persen pada tahun 2029; dan
3. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 5,5 persen menjadi sebesar 8,14 persen pada tahun 2029.

Dari ketiga indikator kinerja tujuan tersebut, Kementerian Perindustrian menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025—2029 meliputi:

- a. Rasio Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB; dan
- b. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas.

Indikator Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan merupakan indikator turunan dari RPJMN Tahun 2025—2029 untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen sesuai dengan arahan Presiden. Industri pengolahan terdiri dari industri batubara dan pengilangan migas serta industri pengolahan nonmigas. Sesuai dengan tugas dan fungsi, Kementerian Perindustrian hanya memiliki kewenangan pembinaan pada industri pengolahan nonmigas. Sehingga pencapaian indikator tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan Kementerian Perindustrian. Untuk itu, dalam pencapaian indikator pertumbuhan PDB industri pengolahan, Kementerian Perindustrian akan berfokus pada pencapaian target pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas.

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis dalam pembangunan industri merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian sebagai suatu *impact/outcome* dari 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian yaitu:

1. Meningkatnya Kontribusi PDB Industri berbasis SDA unggulan dan Industri Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional, dengan indikator kinerja, yaitu Pertumbuhan PDB Kelompok Industri Prioritas, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 6,28 persen menjadi sebesar 9,09 persen pada tahun 2029.
2. Tumbuh dan Berkembangnya Industri yang Inklusif, dengan indikator kinerja:
 - a) Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp775,20 triliun menjadi sebesar Rp1.086,00 triliun pada tahun 2029;
 - b) Produktivitas Tenaga Kerja Industri Pengolahan Nonmigas, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp123,10 juta per orang per tahun menjadi sebesar Rp147,70 juta per orang per tahun pada tahun 2029.
 - c) Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap Total Pekerja, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 14,15 persen menjadi sebesar 15,70 persen pada tahun 2029; dan
 - d) Pertumbuhan PDB Industri Kecil dan Industri Menengah, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 5,26 persen menjadi sebesar 6,02 persen pada tahun 2029.
3. Meningkatnya Persebaran Industri, dengan indikator kinerja, yaitu Persentase Nilai Tambah Sektor Industri yang Diciptakan di Luar Jawa, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 32,65 persen menjadi sebesar 34,96 persen pada tahun 2029.
4. Meningkatnya Efisiensi Industri Melalui Pemanfaatan Teknologi, dengan indikator kinerja, yaitu Perusahaan dengan nilai *Indonesia Industry 4.0 Readiness Index* (INDI 4.0)>3.0, pada tahun 2025 ditargetkan sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) perusahaan menjadi sebanyak 156 perusahaan pada tahun 2029.
5. Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan, dengan indikator kinerja:
 - a) Penurunan Emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 6,75 juta ton CO₂-Eq menjadi sebesar 6,93 juta ton CO₂-Eq pada tahun 2029; dan
 - b) Rasio Penggunaan Material Daur Ulang di Sektor Industri, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 11 persen menjadi sebesar 15 persen pada tahun 2029.
6. Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk, dengan indikator kinerja:
 - a) Kontribusi Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap Total Ekspor, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 74,60 persen menjadi sebesar 75,60 persen pada tahun 2029;
 - b) Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 8,6 persen menjadi sebesar 11,4 persen pada tahun 2029;
 - c) Diversifikasi Produk Industri Berbasis SDA yang Diolah, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 0,286 menjadi sebesar 0,269 pada tahun 2029; dan
 - d) Jumlah Produk Industri Berbasis SDA yang Diolah yang Berdaya Saing, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 208 produk menjadi sebesar 212 produk pada tahun 2029.
7. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Kementerian Perindustrian, dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) Kementerian Perindustrian, pada

tahun 2025 ditargetkan mendapatkan nilai sebesar 86,45 menjadi 88,50 pada tahun 2029.

Guna mendukung kelancaran pencapaian sasaran strategis dalam Renstra Kementerian Perindustrian 2025—2029, telah dilakukan pemetaan terhadap berbagai risiko yang berpotensi menyebabkan tidak tercapainya sasaran strategis dimaksud sebagaimana tertuang dalam Tabel 9 berikut ini.

Tabel 10 Indikasi Risiko Sasaran Strategis Tahun 2025—2029

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko
SS1	Meningkatnya Kontribusi PDB dan Nilai Tambah Industri berbasis SDA unggulan dan industri Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional	1. Keterbatasan Pasokan Bahan Baku 2. Harga bahan baku yang tidak stabil 3. Penurunan permintaan domestik dan global 4. Ketidakpastian kondisi geopolitik global 5. Kebijakan perdagangan negara mitra yang dinamis 6. Penerapan regulasi yang tidak konsisten 7. Investasi untuk mengembangkan industri prioritas tidak sesuai target 8. Masih kurangnya kebijakan/regulasi yang mendukung pengembangan sektor industri prioritas 9. Infrastruktur pendukung pengembangan sektor industri yang tersedia prioritas masih kurang memadai
SS2	Tumbuh dan Berkembangnya Industri yang Inklusif	1. Investasi yang masuk tidak dilakukan pada investasi yang berteknologi tinggi 2. Infrastruktur pendukung pengembangan sektor industri yang tersedia masih kurang memadai 3. <i>Mismatch</i> antara kompetensi SDM dengan kebutuhan industri 4. Sebagian besar SDM industri belum sesuai standar kompetensi 5. Penerapan regulasi yang tidak konsisten 6. Belum meratanya IKM sebagai penunjang rantai pasok industri besar dan industri menengah 7. Harga bahan baku yang kurang mendukung daya saing IKM
SS3	Meningkatnya Persebaran Industri	1. Pertumbuhan sektor industri hanya fokus di Pulau Jawa 2. Ketersediaan infrastruktur pendukung sektor industri belum merata 3. Masih rendahnya Nilai Tambah Sektor Industri di Luar Jawa
SS4	Meningkatnya Efisiensi Industri Melalui Pemanfaatan Teknologi	1. Instrumen regulasi INDI 4.0 saat ini masih belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan 2. Banyak perusahaan masih kesulitan untuk bertransformasi menuju industri 4.0
SS5	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan	1. Penerapan standar terkait lingkungan oleh sektor industri tidak optimal 2. Penerapan sirkular ekonomi oleh sektor industri belum optimal 3. Penerapan kepatuhan perusahaan dan kawasan industri belum memenuhi ketentuan regulasi
SS6	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Industri Pengolahan Nonmigas	1. Penerapan standar berkelanjutan oleh sektor industri belum optimal 2. Standar produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar negara tujuan ekspor 3. Daya saing produk orientasi ekspor terhadap negara lain yang masih rendah
SS7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Kementerian Perindustrian	Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik pada Kementerian Perindustrian belum optimal

Pengelolaan risiko secara sistematis diperlukan agar pencapaian sasaran strategis tetap terjaga. Indikasi risiko beserta langkah perlakuan

risiko dan rincian detailnya menjadi bagian dari dokumen manajemen risiko pembangunan nasional tingkat organisasi.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045, pencapaian cita-cita tersebut akan dilakukan melalui 4 (empat) periodisasi perencanaan jangka menengah, yaitu:

1. RPJM Nasional I Tahun 2025—2029;
2. RPJM Nasional II Tahun 2030—2034;
3. RPJM Nasional III Tahun 2035—2039; dan
4. RPJM Nasional IV Tahun 2040—2044.

RPJMN Tahun 2025—2029, sebagai tahap pertama implementasi RPJPN Tahun 2025—2045, berfokus pada kekuatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Fokus RPJMN Tahun 2025—2029 tersebut dirumuskan guna mencapai sasaran pembangunan nasional tahun 2025—2029 yaitu:

1. Meningkatkan Pendapatan Per Kapita Masyarakat Indonesia menuju setara dengan negara maju, dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:
 - a) Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,05 persen pada tahun 2024, menjadi 5,3 persen pada tahun 2025 dan menuju 8 persen pada tahun 2029;
 - b) Pendapatan Nasional Bruto (*Gross National Income*/GNI) per Kapita meningkat dari USD4.870 pada tahun 2023, menjadi USD5.410 pada tahun 2025 dan menuju USD8.000 pada tahun 2029;
 - c) Kontribusi PDB Maritim meningkat dari 7,9 persen pada tahun 2022, menjadi 8,1 persen pada tahun 2025 dan 9,1 persen pada tahun 2029; dan
 - d) Kontribusi PDB Manufaktur meningkat dari 18,67 persen pada tahun 2023, menjadi 20,8 persen pada tahun 2025 dan 21,9 persen pada tahun 2029.
2. Menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi ketimpangan, dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:
 - a) Tingkat kemiskinan turun dari 9,4 persen pada Maret 2024, menjadi 7,0 persen sampai 8 persen pada tahun 2025 dan 4,5 persen sampai 5 persen pada tahun 2029 serta kemiskinan ekstrem (2,15 *Purchasing Power Parity*/PPP) hingga <0,5 persen pada tahun 2026;
 - b) Rasio Gini turun dari 0,379 pada Maret 2024, menjadi 0,378 sampai 0,382 pada tahun 2025 dan 0,372 sampai 0,375 pada tahun 2029; dan
 - c) Kontribusi PDB Kawasan Timur Indonesia meningkat dari 20,9 persen pada tahun 2023, menjadi 22,4 persen pada tahun 2029.
3. Meningkatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki kepemimpinan dan pengaruh di dunia Internasional, dengan indikator keberhasilan adalah peningkatan *Global Power Index* dari peringkat ke-34 pada tahun 2023, menjadi peringkat ke-33 pada tahun 2025 dan peringkat ke-29 pada tahun 2029.

4. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia, dengan indikator keberhasilan adalah meningkatnya Indeks Modal Manusia (IMM) dari 0,54 pada tahun 2020 menjadi 0,56 pada tahun 2025 dan 0,59 pada tahun 2029.
5. Menurunkan intensitas emisi GRK menuju *net zero emission*, dengan indikator keberhasilan adalah sebagai berikut:
 - a) menurunnya intensitas emisi GRK dari 34,09 persen pada tahun 2022, menjadi 35,53 persen tahun 2025 dan 45,17 persen pada tahun 2029; dan
 - b) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat dari nilai indeks sebesar 72,54 pada tahun 2023, menjadi sebesar 76,49 pada tahun 2025 dan sebesar 77,20 pada tahun 2029.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan target tersebut di atas, pada RPJMN Tahun 2025—2029 ditetapkan 8 (delapan) Prioritas Nasional yang merupakan turunan dari misi Presiden dan Wakil Presiden yang dikenal dengan Asta Cita, serta 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden dan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat dengan rincian sebagai berikut:

1. Asta Cita, yaitu:
 - a) Asta Cita 1, Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia HAM;
 - b) Asta Cita 2, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
 - c) Asta Cita 3, Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
 - d) Asta Cita 4, Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
 - e) Asta Cita 5, Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
 - f) Asta Cita 6, Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
 - g) Asta Cita 7, Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
 - h) Asta Cita 8, Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
2. Program Prioritas Presiden, yaitu:
 - a) mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
 - b) penyempurnaan sistem penerimaan negara;
 - c) reformasi politik, hukum, dan birokrasi;
 - d) pencegahan dan pemberantasan korupsi;
 - e) pemberantasan kemiskinan;
 - f) pencegahan dan pemberantasan narkoba;

- g) menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
 - h) penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi;
 - i) penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
 - j) penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
 - k) menjamin pelestarian lingkungan hidup;
 - l) menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
 - m) menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
 - n) melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya;
 - o) melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
 - p) memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah; dan
 - q) pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olah raga.
3. Program Hasil Terbaik Cepat, yaitu:
- a) memberi makan siang gratis dan susu gratis di sekolah, pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
 - b) menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC (Tuberkulosis), dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten;
 - c) mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
 - d) membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
 - e) melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
 - f) menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara;
 - g) melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); dan
 - h) mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen.

Untuk mencapai Asta Cita, Program Prioritas Presiden, dan Program Hasil Terbaik Cepat di atas, disusunlah 3 (tiga) strategi utama guna pencapaiannya yang disebut dengan Trisula RPJMN Tahun 2025—2029 yaitu:

1. Penurunan Kemiskinan yang akan dilakukan melalui stabilisasi ekonomi makro melalui pertumbuhan ekonomi inklusif dan menjaga inflasi, pengurangan beban pengeluaran melalui bantuan sosial dan jaminan sosial, peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja, layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah dengan membangun SDM dan perluasan akses ekonomi;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang akan dilakukan melalui pemenuhan layanan dasar, peningkatan modal manusia, dan peningkatan modal sosial budaya; dan
3. Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan yang akan dilakukan melalui peningkatan produktivitas pertanian dalam rangka menuju swasembada pangan, industrialisasi (hilirisasi) industri padat karya, berorientasi ekspor dan berkelanjutan, ekonomi biru dan ekonomi hijau, pariwisata dan ekonomi kreatif, pembangunan perkotaan sebagai pertumbuhan ekonomi, transformasi digital, peningkatan investasi asing langsung berorientasi ekspor dan investasi non APBN, dan belanja negara untuk peningkatan produktivitas.

Guna mewujudkan Trisula RPJMN Tahun 2025—2029, perlu melakukan transformasi sektor publik sebagai pengungkitnya. Transformasi tersebut akan dilakukan melalui:

1. Transformasi Digital Layanan Publik

Transformasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kepada masyarakat, terutama pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan berusaha. Upaya transformasi digital ini perlu didukung oleh penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah. Data yang terintegrasi dan saling terhubung antar instansi menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti, perencanaan pembangunan yang lebih efektif, dan pengawasan anggaran yang lebih ketat.

2. Penyederhanaan Regulasi

Dalam era perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, dukungan tata kelola regulasi yang baik juga diperlukan, sehingga terbentuk regulasi yang tepat sasaran, *agile*, memfasilitasi kepatuhan, dan taat asas. Salah satu pilihan kebijakan untuk mengondisikan regulasi yang baik adalah dengan mendorong penyederhanaan regulasi. Metode dalam penyederhanaan regulasi meliputi:

- a) Deregulasi, dengan mengurangi ketentuan-ketentuan yang menjadi hambatan bagi kegiatan atau sektor tertentu;
- b) Kodifikasi, dengan menggabungkan ketentuan-ketentuan dalam sektor terkait ke dalam satu peraturan perundang-undangan yang sistematis dan mudah dipahami;
- c) Konsolidasi, dengan menyajikan dokumen peraturan perundang-undangan yang telah diubah di beberapa peraturan ke dalam satu dokumen; dan/atau
- d) *Omnibus legislation*, pembentukan peraturan yang menggabungkan pembentukan norma baru dengan perubahan dan/atau pencabutan berbagai norma dalam berbagai peraturan yang luas.

RPJMN Tahun 2025—2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan

wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025—2029.

Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025—2029. Untuk pencapaian sasarannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta).

Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya proyek strategis nasional.

Selain itu, untuk menunjang keberhasilan pencapaian RPJMN 2025—2029, saat ini sedang atau akan dilaksanakan Proyek Strategis Nasional (PSN). PSN dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025—2029.

PSN dapat diprakarsai/diusulkan dan dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara maupun badan usaha swasta. Proyek-proyek yang diusulkan dan dilaksanakan selain oleh Pemerintah Pusat merupakan bentuk kontribusi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta pada pencapaian sasaran-sasaran RPJMN yang memerlukan dukungan dari Pemerintah.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian

Dalam melaksanakan misi pembangunan industri nasional tersebut, arah kebijakan dan strategi pembangunan industri untuk periode tahun 2025—2029 mencakup:

1. Hilirisasi Industri Berbasis SDA dan Pengembangan Industri Prioritas.
 - a. Tujuan
Meningkatkan nilai tambah SDA yang dimiliki oleh suatu negara, sehingga SDA yang diekspor tidak lagi berwujud bahan baku/mentah tetapi sudah menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi.
 - b. Program/Kegiatan
 - 1) pembangunan industri berbasis SDA, meliputi pada hilirisasi nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa, garam, kelapa sawit, sagu, dan rumput laut;
 - 2) pembangunan industri padat karya terampil, meliputi pengembangan industri makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil serta alas kaki;
 - 3) pembangunan industri padat teknologi inovasi, meliputi pembangunan industri kosmetik, farmasi, mesin dan peralatan, kendaraan listrik berbasis baterai, semikonduktor, perkapalan, dan dirgantara; dan
 - 4) pembangunan industri dasar, meliputi penguatan industri logam dasar, besi, dan baja serta pengembangan industri kimia.
2. Pembangunan Sumber Daya Industri, yang meliputi:
 - a. Pembangunan SDM Industri

1) Tujuan

Menyiapkan SDM industri yang kompeten, produktif, inovatif, serta adaptif terhadap kebutuhan pasar dalam rangka pembangunan industri berkelanjutan.

2) Program/Kegiatan

- a) Penyusunan Peta Jalan Pembangunan SDM Industri Nasional;
 - b) Penyiapan infrastruktur kompetensi yang meliputi;
 - i. Penyusunan dan pengembangan standar kompetensi;
 - ii. Pengembangan Program Pendidikan/Pelatihan Berbasis Kompetensi;
 - iii. Pengembangan lembaga pelaksana sertifikasi kompetensi.
 - c) Penyelenggaraan pendidikan berbasis *Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics* (STEAM) dan pelatihan berbasis kompetensi;
 - d) Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi;
 - e) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana peningkatan kompetensi;
 - f) Penguatan kelembagaan dan kerjasama;
 - g) Pengembangan inkubator bisnis; dan
 - h) Optimalisasi platform digital.
- b. Jaminan Ketersediaan dan Penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri

1) Tujuan

Menjamin ketersediaan dan penyaluran bahan baku dan/atau bahan penolong industri yang berkelanjutan dalam rangka menjaga kelangsungan proses produksi, pengembangan industri, penguatan dan pendalaman struktur industri, serta peningkatan daya saing industri.

2) Program/Kegiatan

- a) Jaminan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri melalui :
 - i. pembangunan industri bahan baku dan/atau bahan penolong di dalam negeri;
 - ii. peningkatan kapasitas industri bahan baku/bahan penolong dalam negeri;
 - iii. peningkatan produksi bahan baku dan/atau bahan penolong dalam negeri;
 - iv. optimalisasi pemanfaatan bahan baku substitusi atau alternatif;
 - v. peningkatan produktivitas dan kapasitas perkebunan untuk bahan baku industri;
 - vi. implementasi kebijakan harga gas bumi tertentu untuk Industri;
 - vii. restrukturisasi mesin/peralatan;
 - viii. pembatasan ekspor bahan baku dan/atau bahan penolong;
 - ix. penerapan *domestic market obligation* (DMO) bahan baku sumber daya alam dalam negeri;
 - x. pemenuhan kebutuhan bahan baku melalui neraca komoditas;
 - xi. optimalisasi Penerapan kebijakan tata niaga;

- xii. fasilitasi insentif fiskal dan non fiskal untuk kemudahan bahan baku dan/atau bahan penolong;
 - xiii. optimalisasi pemanfaatan kerja sama perdagangan;
 - xiv. optimalisasi teknologi permesinan dan peralatan;
 - xv. fasilitasi peningkatan standardisasi bahan baku;
 - xvi. penghapusan pajak pengadaan bahan baku;
 - xvii. penguatan riset dan inovasi bahan baku;
 - xviii. implementasi ekonomi sirkular dan dekarbonisasi pada industri;
 - xix. pengembangan teknologi pengolahan bahan baku/bahan penolong; dan
 - xx. pemanfaatan dan pengembangan bahan baku dan/atau bahan penolong ramah lingkungan.
- b) Jaminan penyaluran bahan baku dan/atau bahan penolong industri melalui:
- i. fasilitasi pusat logistik/penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong;
 - ii. optimalisasi infrastruktur dan rantai pasok bahan baku dan/atau bahan penolong;
 - iii. penguatan *national stockpiling system* untuk bahan baku kritis;
 - iv. penguatan rantai pasok bahan baku dan/atau bahan penolong;
 - v. penguatan sistem informasi rantai pasok bahan baku dan/atau bahan penolong;
 - vi. perbaikan jaringan distribusi logistik bahan baku bahan baku dan/atau bahan penolong
 - vii. perbaikan tata kelola logistik bahan baku dan/atau bahan penolong; dan
 - viii. integrasi sistem informasi rantai pasok.
- c) Fasilitasi kemitraan dan kerjasama antara industri kecil dan menengah dengan pemangku kepentingan terkait
- i. kemitraan dan kolaborasi rantai pasok hulu-hilir;
 - ii. kemitraan industri pengolahan dengan petani; dan
 - iii. peningkatan *link and match* dengan industri bahan baku dan/atau bahan penolong.
- c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri
- 1) Tujuan
Menumbuhkan dan mengembangkan industri melalui peningkatan efisiensi, produktivitas, mutu, nilai tambah, inklusivitas, dan daya saing secara berkelanjutan serta kemandirian teknologi industri nasional.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) Penguatan riset dan inovasi teknologi dilakukan melalui:
 - i. penguatan kapasitas riset dan inovasi teknologi industri;

- ii. fasilitasi kerja sama pengembangan, pemanfaatan, dan mobilitas SDM teknologi industri;
 - iii. implementasi pengembangan teknologi baru melalui *pilot plant* atau yang sejenis;
 - iv. pengembangan teknologi hijau dan berkelanjutan; dan
 - v. peningkatan program pendidikan vokasi dan pelatihan industri berbasis teknologi tinggi.
- b) Transfer teknologi dilakukan melalui:
- i. peningkatan transfer teknologi melalui proyek putar kunci (*turn key project*) apabila belum tersedia teknologi yang diperlukan di dalam negeri;
 - ii. peningkatan transfer teknologi dari perusahaan berteknologi tinggi yang beroperasi di dalam negeri; dan
 - iii. peningkatan program mobilitas talenta (*talent mobility*) teknologi industri, baik dalam negeri maupun kerja sama internasional.
- c) Adopsi Teknologi dilakukan melalui:
- i. audit teknologi dalam rangka peningkatan kinerja teknologi, menilai kesesuaian, positioning dan mitigasi resiko penggunaan teknologi;
 - ii. pengukuran dampak dan efektivitas pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
 - iii. transformasi teknologi industri yang diarahkan pada peningkatan efisiensi produksi, penerapan sistem digital terintegrasi dalam rantai pasok dan manajemen produksi, serta pengembangan *startup* teknologi berbasis solusi industri;
 - iv. peningkatan akses dan penyebaran teknologi industri; dan
 - v. penguatan keamanan dan ketahanan teknologi industri.
- d) Insentif pengembangan dan pemanfaatan teknologi dilakukan melalui:
- i. insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam pengembangan industri dalam negeri;
 - ii. pemberian jaminan risiko terhadap pemanfaatan teknologi;
 - iii. pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri; dan
 - iv. pemberian insentif dalam bentuk royalti kepada unit penelitian dan pengembangan dan periset yang hasil temuannya dimanfaatkan secara komersial di industri.
- d. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi
- 1) Tujuan
- Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan warisan budaya,

kearifan lokal, dan/atau inovasi (cara baru, dan/atau metode baru) yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk menjadi industri melalui penciptaan nilai tambah dan pengembangan ekosistem industri.

2) Program/Kegiatan

- a) penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreaitivitas dan sesuai potensi daerah, yaitu:
 - i. penetapan wilayah peruntukan industri yang berbasis warisan budaya dan kearifan lokal; dan
 - ii. penetapan sentra industri oleh kepala pemerintahan daerah.
- b) pengembangan sarana prasarana industri berbasis warisan budaya, kearifan lokal, dan/atau inovasi melalui:
 - i. pembangunan dan pengembangan sentra industri dan/atau pusat kreativitas seperti : technopark, pusat animasi, dan pusat desain;
 - ii. fasilitasi mesin peralatan dan/atau bahan baku/penolong; dan
 - iii. fasilitasi infrastruktur sentra dan pusat kreativitas seperti aksesibilitas transportasi, infrastruktur digital, dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
- c) pengembangan sentra industri yang memanfaatkan kreativitas dan inovasi:
 - i. bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong;
 - ii. pembangunan/pengembangan unit pelayanan teknis (UPT);
 - iii. pendampingan oleh tenaga ahli termasuk pengembangan produk (pendampingan pengembangan produk oleh tenaga ahli);
 - iv. fasilitasi akses pembiayaan; dan
 - v. fasilitasi infrastruktur aksesibilitas sentra, termasuk infrastruktur digital.
- d) penumbuhan dan pengembangan SDM industri:
 - i. penumbuhan wirausaha industri; dan
 - ii. peningkatan kompetensi SDM Industri.
- e) pemanfaatan dan pengembangan inovasi proses produksi, produk, teknologi, dan manajemen usaha:
 - i. fasilitasi pengembangan inovasi proses produksi, produk dan teknologi;
 - ii. fasilitasi komersialisasi hasil pengembangan inovasi proses produksi, produk dan teknologi;
 - iii. fasilitasi pendampingan manajemen usaha; dan
 - iv. penciptaan dan pengembangan ekosistem kreativitas dan inovasi.
- f) fasilitasi konsultasi, bimbingan, advokasi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil; dan
- g) fasilitasi uji coba pasar, promosi, business matching, pemasaran produk dan akses pembiayaan.

- e. Penyediaan Sumber Pembiayaan
 - 1) Tujuan
 - a) menjamin ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri;
 - b) peningkatan daya saing industri dalam negeri; dan
 - c) penyelamatan perekonomian nasional.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) program fasilitasi akses pembiayaan industri antara lain:
 - i. kredit modal kerja/usaha bagi industri dengan bentuk pembiayaan berupa subsidi bunga pinjaman dari pemerintah bagi industri;
 - ii. kredit usaha melalui *financial technology* (Fintech) yang memberikan akses pembiayaan secara cepat dengan prosedur dan kolateral pembiayaan permodalan yang lebih sederhana bagi industri; dan
 - iii. kredit akses pembiayaan ekspor sektor industri seperti Penugasan Khusus Ekspor (PKE) melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan bentuk pembiayaan, penjaminan dan asuransi.
 - b) Program fasilitasi kemitraan investasi sektor industri melalui Badan Pengelola Investasi untuk menjalankan fungsi pembiayaan investasi bagi sektor industri;
 - c) Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan seperti pembiayaan dan kemudahan pembiayaan untuk restrukturisasi permesinan/peralatan industri dalam rangka peningkatan daya saing;
 - d) Program bantuan mesin dan/atau peralatan;
 - e) Program jaminan dan perlindungan terhadap fluktuasi nilai tukar (hedging) untuk ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri;
 - f) Program pembiayaan untuk transisi industri hijau;
 - g) Program pembiayaan untuk penelitian dan pengembangan sektor industri; dan
 - h) Program pembiayaan pembangunan sumber daya manusia industri.
- 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 - a. Standardisasi Industri
 - 1) Tujuan
 - a) meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha dan kemampuan pelaku usaha, serta memacu kemampuan inovasi teknologi;
 - b) meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat, dan negara dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c) meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan di dalam negeri dan internasional.

2) Program/Kegiatan

a) Perencanaan, meliputi:

- i. penyusunan program nasional perumusan standar untuk perumusan SNI;
- ii. penyusunan program nasional regulasi teknis untuk pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis (ST), dan/atau Pedoman Tata Cara (PTC) secara wajib;
- iii. penyusunan analisa dampak regulasi teknis pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib;
- iv. penyiapan lembaga penilaian kesesuaian (LPK) yang akan ditunjuk Menteri dalam mendukung pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib;
- v. penyusunan tata cara pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri;
- vi. penyusunan rencana kerjasama pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri di tingkat nasional dan internasional;
- vii. penyusunan rencana Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI) dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka mendukung pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri; dan
- viii. perancangan sistem informasi pengawasan dan penegakan hukum yang terintegrasi.

b) Pelaksanaan perumusan dan pemberlakuan, meliputi:

- i. perumusan SNI, ST, dan/atau PTC;
- ii. penyusunan regulasi teknis pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib; dan
- iii. penunjukan LPK oleh Menteri dalam mendukung pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib.

c) Pembinaan, meliputi:

- i. pembinaan kepada perusahaan industri berupa bantuan teknis, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, promosi dan pemasyarakatan serta menumbuhkan budaya standar;
- ii. pembiayaan dalam proses penilaian kesesuaian dan/atau pemberian fasilitas fiskal bagi perusahaan industri skala kecil dan menengah yang menerapkan SNI, ST, dan/atau PTC yang diberlakukan secara wajib;
- iii. pembinaan kepada LPK berupa bantuan teknis, konsultasi, pendidikan, dan pelatihan;
- iv. penyediaan, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana laboratorium pengujian termasuk di WPPI;
- v. pembinaan kepada SDM di bidang standardisasi industri berupa bantuan teknis, pendidikan dan pelatihan;
- vi. pembinaan kepada masyarakat berupa pemasyarakatan serta penumbuhan budaya standar;

- vii. pemberian fasilitas sertifikasi SNI bagi perusahaan industri yang memenuhi kriteria tertentu;
 - viii. pengembangan program sertifikasi kompetensi SDM secara nasional dan berjenjang;
 - ix. peningkatan akses pembinaan platform digital; dan
 - x. penyusunan modul pembinaan teknis nasional yang terstandarisasi dan mudah diakses.
- d) Pengembangan, meliputi:
- i. pengembangan kebijakan standardisasi industri;
 - ii. pengembangan teknologi pengujian dan standar mutu barang dan/atau jasa industri;
 - iii. pengembangan penerapan standar bidang industri;
 - iv. pengembangan standar bidang industri yang disesuaikan dengan tingkat perlindungan, perbedaan iklim, lingkungan, geologi, geografis, kemampuan teknologi;
 - v. kerja sama pengembangan standardisasi industri di tingkat nasional dan internasional;
 - vi. kerja sama harmonisasi dan saling pengakuan penilaian kesesuaian di bilateral, regional, atau multilateral;
 - vii. kerja sama perjanjian saling pengakuan regulasi teknis antar negara;
 - viii. pengembangan standardisasi industri berbasis keberlanjutan (*sustainability*); dan
 - ix. pengembangan sistem informasi standardisasi yang terintegrasi dan mudah diakses.
- e) Pengawasan, meliputi:
- i. pengawasan atas pelaksanaan penerapan SNI secara sukarela;
 - ii. pengawasan atas pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib;
 - iii. pengawasan terhadap LPK dalam penerapan SNI secara sukarela dan pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib;
 - iv. pengendalian rangkaian kegiatan penerapan SNI secara sukarela dan pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib;
 - v. verifikasi dan penelusuran teknis terhadap produk impor;
 - vi. pengawasan berbasis mitigasi potensi risiko untuk efisiensi dan efektifitas;
 - vii. penguatan koordinasi lintas instansi; dan
 - viii. pengembangan mekanisme pelaporan publik dan perlindungan pelapor.
- f) Penegakan hukum, meliputi:
- i. tindak lanjut hasil pengawasan atas pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib; dan
 - ii. penegakan hukum mencakup produk, jasa, proses, sistem dan personel yang terkait dengan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib.

b. Infrastruktur Industri

1) Tujuan

Pembangunan infrastruktur industri bertujuan untuk mewujudkan kegiatan industri yang efisien dan efektif di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Kawasan Industri (KI), dan Sentra IKM.

2) Program/Kegiatan

a) Penyediaan lahan industri, meliputi:

- i. penyelesaian aspek-aspek terkait pertanahan antar kementerian/lembaga;
- ii. penyusunan rencana pembangunan KI, termasuk analisis kelayakan dan penyusunan rencana induk (*masterplan*);
- iii. pengalokasian dan penetapan KPI dalam dokumen rencana tata ruang;
- iv. melakukan *review* terhadap pemenuhan dan pemanfaatan KPI;
- v. penyediaan lahan untuk pembangunan KI melalui bank tanah yang didukung dengan infrastruktur baik di dalam maupun di luar KI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- vi. penyediaan lahan melalui pengembangan KPI yang didukung dengan infrastruktur baik di dalam maupun di luar KPI; dan
- vii. pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan Kawasan Industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BUMN/BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Penyediaan fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, meliputi:

- i. identifikasi kebutuhan energi dan kelistrikan untuk industri;
- ii. penyusunan rencana penyediaan energi dan kelistrikan untuk mendukung pembangunan industri;
- iii. pemenuhan pasokan energi dan listrik untuk industri serta pembangunan pembangkit listrik untuk mendukung kebutuhan pengembangan KI;
- iv. pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi;
- v. pemenuhan pasokan energi dari sumber yang terbarukan; dan
- vi. penggunaan komponen dalam negeri dalam pembangunan jaringan energi dan kelistrikan.

c) Penyediaan jaringan telekomunikasi dan infrastruktur digital, meliputi:

- i. identifikasi kebutuhan jaringan telekomunikasi dan infrastruktur digital berdasarkan lokasi, kapasitas, dan jenis layanan;

- ii. penyusunan rencana jaringan telekomunikasi dan infrastruktur digital untuk mendukung pembangunan industri;
 - iii. perencanaan dan desain jaringan;
 - iv. pemenuhan jaringan telekomunikasi dan infrastruktur digital;
 - v. pemeliharaan jaringan telekomunikasi dan infrastruktur digital secara berkala; dan
 - vi. peningkatan teknologi dan kapasitas sesuai kebutuhan industri.
- d) Penyediaan jaringan sumber daya air, meliputi:
- i. identifikasi kebutuhan dan inventarisasi sumber daya air;
 - ii. penyusunan rencana jaringan sumber daya air untuk mendukung pembangunan industri;
 - iii. perencanaan dan penyusunan master plan;
 - iv. pengadaan lahan dan perizinan untuk intake, instalasi pengolahan air baku dan jaringan distribusi;
 - v. pembangunan infrastruktur;
 - vi. operasional jaringan sumber daya air serta pengelolaan distribusi; dan
 - vii. pemeliharaan dan pengembangan kapasitas jaringan.
- e) Penyediaan jaringan sanitasi, meliputi:
- i. pemetaan kebutuhan sanitasi industri dan daya tampung lingkungan;
 - ii. penyusunan rencana jaringan sanitasi untuk mendukung pembangunan industri;
 - iii. penyusunan master plan;
 - iv. pengadaan lahan dan perizinan untuk instalasi pengolahan air bersih dan pengolahan air limbah;
 - v. pembangunan infrastruktur;
 - vi. pengawasan dan perizinan untuk menjamin limbah industri tidak mencemari lingkungan;
 - vii. operasional dan manajemen sistem sanitasi; dan
 - viii. pemeliharaan dan pengembangan kapasitas jaringan.
- f) Penyediaan jaringan transportasi dan logistik, meliputi:
- i. survei dan pemetaan kebutuhan infrastruktur transportasi dan logistik industri;
 - ii. perencanaan dan penyusunan rencana induk transportasi dan logistik yang mendukung pengembangan wilayah industri (WPPI, KPI, KI dan Sentra IKM);
 - iii. pembangunan infrastruktur jaringan transportasi dan logistik;
 - iv. pengembangan pusat logistik terpadu, sistem transportasi multimoda serta digitalisasi sistem logistik nasional;
 - v. operasional dan manajemen jaringan transportasi dan logistik; dan

- vi. pemeliharaan dan pengembangan kapasitas jaringan transportasi dan logistik.
- g) Penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan industri, meliputi:
 - i. survei dan pemetaan kebutuhan fasilitas pendidikan dan pelatihan industri;
 - ii. penyusunan rencana pembangunan fasilitas pendidikan dan pelatihan industri;
 - iii. perencanaan dan penyusunan master plan;
 - iv. pengadaan lahan dan perizinan;
 - v. pembangunan fasilitas pendidikan dan pelatihan industri; dan
 - vi. pemeliharaan fasilitas pendidikan dan pelatihan industri.
- h) Penyediaan fasilitas jaringan persampahan, meliputi:
 - i. identifikasi dan perencanaan kebutuhan pengelolaan sampah industri;
 - ii. penyusunan rencana fasilitas persampahan untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan persampahan dengan pengembangan KPI/pembangunan KI;
 - iii. pengadaan lahan dan perizinan untuk pembangunan fasilitas persampahan;
 - iv. pembangunan fasilitas infrastruktur persampahan yang efektif dan ramah lingkungan;
 - v. pembangunan sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah untuk efisiensi transportasi dan pengurangan potensi pencemaran lingkungan;
 - vi. pengolahan dan daur ulang sampah untuk mendukung prinsip ekonomi sirkular dan meminimalkan residu sampah;
 - vii. pengawasan fasilitas pengelolaan sampah sesuai standar lingkungan untuk menjamin bahwa pengelolaan sampah industri dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - viii. pemeliharaan dan peningkatan kapasitas fasilitas persampahan; dan
 - ix. edukasi pelaku industri tentang pemilahan, pengurangan sampah, dan tanggung jawab lingkungan.
- i) Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium pengujian standar industri, meliputi:
 - i. identifikasi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana laboratorium pengujian standar industri;
 - ii. penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana laboratorium pengujian standar industri;
 - iii. perencanaan dan penyusunan master plan;
 - iv. pengadaan lahan dan perizinan;
 - v. pembangunan sarana dan prasarana laboratorium pengujian standar industri; dan

- vi. pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium pengujian standar industri.
 - j) Penyediaan fasilitas penelitian dan pengembangan teknologi industri, meliputi:
 - i. survei dan pemetaan kebutuhan fasilitas penelitian dan pengembangan teknologi industri;
 - ii. penyusunan rencana pembangunan fasilitas penelitian dan pengembangan teknologi industri;
 - iii. perencanaan dan penyusunan master plan;
 - iv. pengadaan lahan dan perizinan;
 - v. pembangunan fasilitas penelitian dan pengembangan teknologi industri; dan
 - vi. pemeliharaan fasilitas penelitian dan pengembangan teknologi industri.
 - c. Sistem Informasi Industri Nasional
 - 1) Tujuan
 - a) menjamin ketersediaan, kualitas, kerahasiaan, dan akses terhadap data dan/atau informasi terkait sektor industri dan kawasan industri;
 - b) mempercepat pengumpulan, penyampaian/pengadaan, pengolahan/pemrosesan, analisis, penyimpanan, dan penyajian, termasuk penyebarluasan data dan/ atau informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu; dan
 - c) mewujudkan penyelenggaraan sistem Informasi industri nasional yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas, inovasi, kemudahan berusaha, dan pelayanan publik dalam mendukung pembangunan industri nasional.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) penyusunan regulasi;
 - b) pengadaan data dan penyediaan informasi;
 - c) penyebarluasan data dan informasi;
 - d) pengembangan SDM di bidang teknologi informasi dan/atau statistik;
 - e) pengembangan dan pemeliharaan perangkat keras;
 - f) pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak;
 - g) pengelolaan jaringan komunikasi data;
 - h) pengembangan dan pemeliharaan sistem keamanan informasi;
 - i) pengelolaan pusat data dan pusat pemulihan bencana; dan
 - j) monitoring dan evaluasi SIINas.
- 4. Pemberdayaan Industri
 - a. Industri Hijau
 - 1) Tujuan

Mewujudkan industri nasional yang berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, pengurangan emisi dan dampak lingkungan, serta penguatan daya saing produk Industri Hijau di pasar domestik dan global, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri

dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

2) Program/Kegiatan

- a) Penguatan Standardisasi dan Sertifikasi Industri Hijau, meliputi:
 - i. Penyusunan, pemutakhiran dan perluasan cakupan Standar Industri Hijau;
 - ii. Pemberlakuan Standar Industri Hijau secara wajib yang dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan sektor;
 - iii. Pengembangan kompetensi auditor Industri Hijau;
 - iv. Penguatan kelembagaan dan tata kelola Sertifikasi Industri Hijau;
 - v. Pengembangan kerja sama saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreement/MRA*) Standar Industri Hijau atau regulasi teknis lainnya dengan negara lain;
 - vi. Penyusunan kebijakan Peningkatan Penggunaan produk Industri Hijau; dan
 - vii. Pengembangan dan penerapan rantai pasok berkelanjutan (*sustainable supply chain*).
- b) Percepatan Dekarbonisasi Industri, meliputi:
 - i. Penguatan kebijakan sektor industri terkait penggunaan Energi Baru dan Energi Terbarukan;
 - ii. Penyusunan pedoman dan metodologi pelaporan verifikasi dan/atau validasi emisi GRK;
 - iii. Pelaporan inventarisasi GRK;
 - iv. Penetapan batas atas emisi dan pemberlakuan izin atau kuota emisi;
 - v. Pengembangan solusi terintegrasi dan pembiayaan hijau untuk mengakselerasi dekarbonisasi industri;
 - vi. Implementasi pengimbangan emisi, perdagangan karbon, kredit karbon, dan penerapan nilai ekonomi karbon lainnya; dan
 - vii. Pengembangan Lembaga Validasi/Verifikasi (LVV) untuk mendukung pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi sektor industri.
- c) Pengembangan dan penerapan ekonomi sirkular di sektor industri, meliputi:
 - i. Penyusunan kebijakan penerapan ekonomi sirkular sektor industri;
 - ii. Pengembangan kelembagaan ekonomi sirkular sektor industri;
 - iii. Peningkatan penggunaan bahan baku daur ulang, pemulihan material, dan bahan baku sirkular;
 - iv. Penguatan rantai pasok berkelanjutan, dan ekosistem ekonomi sirkular;
 - v. Penguatan pelaporan data dan sistem informasi penerapan ekonomi sirkular sektor industri; dan

- vi. Penerapan desain produk hijau, pengembangan bahan ramah lingkungan, dan inovasi kemasan ramah lingkungan.
- d) Peningkatan upaya pengelolaan limbah dan pengendalian penurunan emisi polutan udara sektor industri, meliputi:
 - i. Penyusunan kebijakan pengelolaan limbah dan pengendalian emisi polutan udara sektor industri; dan
 - ii. Pengendalian dan pemantauan pengelolaan limbah dan emisi polutan udara sektor industri secara terukur dan berkelanjutan.
- e) Fasilitasi dan Harmonisasi Industri Hijau, meliputi:
 - i. Penyelenggaraan promosi, pameran, temu bisnis, dan penghargaan Industri Hijau;
 - ii. Fasilitasi pendampingan teknis transformasi Industri Hijau;
 - iii. Fasilitasi pengujian, verifikasi dan sertifikasi Industri Hijau;
 - iv. Fasilitasi sertifikasi kompetensi profesi pekerjaan hijau bagi SDM perusahaan industri;
 - v. Penyelarasan regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kerja sama dalam rangka pengembangan dan penumbuhan Industri Hijau yang mencakup keterlibatan lintas kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, mitra dagang dan mitra pembangunan; dan
 - vi. Peningkatan Edukasi, sosialisasi, kampanye, dan promosi penerapan Industri Hijau kepada industri, pemerintah daerah; kementerian/lembaga, akademisi, dan para pemangku kepentingan lain yang terkait.
- f) Pengembangan Pekerjaan Hijau Sektor Industri, meliputi:
 - i. Pengembangan pedoman/modul kurikulum pendidikan di bidang Industri Hijau;
 - ii. Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang Industri Hijau; dan
 - iii. Peningkatan kompetensi, keahlian, dan keterampilan di bidang Industri Hijau.
- g) Penguatan Infrastruktur dan Teknologi Pendukung Industri Hijau, meliputi:
 - i. Pengembangan data dan sistem informasi untuk standardisasi dan penerapan Industri Hijau, emisi GRK, emisi polutan udara, nilai ekonomi karbon, dan ekonomi sirkular sektor industri, serta data dan sistem informasi lainnya yang terkait; dan
 - ii. Mendukung implementasi penyediaan peralatan dan teknologi rendah karbon melalui peningkatan demand untuk transformasi penerapan Industri Hijau.
- b. Industri Strategis
 - 1) Tujuan

- a) memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial masyarakat melalui penguasaan dan pengembangan industri strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan kesehatan rakyat serta keamanan negara;
 - b) meningkatkan kapasitas produksi dan nilai tambah nasional melalui pemanfaatan SDA strategis secara optimal dan berkelanjutan;
 - c) mendorong kemandirian teknologi industri nasional melalui riset, inovasi, dan kolaborasi antara pemerintah, BUMN, swasta, dan lembaga riset;
 - d) mengurangi ketergantungan terhadap impor produk dan teknologi di sektor vital melalui pengembangan industri strategis berbasis teknologi tinggi;
 - e) mewujudkan tata kelola industri strategis yang efisien dan berdaya saing dalam rangka merespons isu aktual baik domestik maupun global melalui penguatan peran negara; dan
 - f) mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi secara bertanggung jawab.
- 2) Program/Kegiatan
- a) Penguatan kendali Negara atas industri strategis, meliputi:
 - i. Penentuan jenis industri strategis nasional yang dinamis sesuai kebutuhan perkembangan zaman; dan
 - ii. Penyusunan rekomendasi kebijakan penguasaan negara terhadap sektor-sektor industri strategis.
 - b) Peningkatan Produksi dan Teknologi, meliputi:
 - i. Fasilitasi pembangunan dan restrukturisasi mesin industri strategis;
 - ii. Dukungan transfer teknologi dari luar negeri melalui skema G to G atau joint venture; dan
 - iii. Peningkatan sertifikasi dan standardisasi untuk pengembangan industri strategis sesuai kebutuhan nasional dan global.
 - c) Penguatan Ekosistem Industri Strategis, meliputi:
 - i. Pembangunan pusat riset dan laboratorium uji untuk mendukung pengembangan industri strategis;
 - ii. Peningkatan kapasitas SDM teknis sektor industri strategis;
 - iii. Pembentukan sistem pengawasan terhadap industri strategis;
 - iv. Penyusunan skema insentif fiskal dan non-fiskal untuk pengembangan industri strategis; dan
 - v. Penyediaan sumber energi, bahan baku dan/atau bahan penolong untuk pengembangan industri strategis.
- c. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
- 1) Tujuan
 - a) meningkatkan penguasaan pasar dalam negeri;

- b) meningkatkan investasi;
 - c) menyerap tenaga kerja; dan
 - d) memperdalam dan memperkuat struktur industri.
- 2) Program/Kegiatan
- a) penguatan regulasi dan kebijakan terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - b) fasilitasi temu bisnis (business matching) antara produsen barang dan/atau penyedia jasa dengan pengguna produk dalam negeri;
 - c) sosialisasi kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - d) fasilitasi sertifikasi TKDN kepada perusahaan industri kecil dan menengah produsen barang/produk antara/produk hulu dan/atau penyedia jasa (perusahaan industri);
 - e) pemberian fasilitas fiskal dan/atau non fiskal dalam rangka penerapan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - i. penetapan produk-produk tertentu yang wajib memiliki sertifikat TKDN;
 - ii. pembentukan dan pengoperasian Tim P3DN, Tim Nasional P3DN dan Kelompok Kerja Timnas P3DN;
 - iii. penguatan tata kelola program peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
 - iv. penerapan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kepatuhan pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri serta penegakan sanksi atas pelanggaran.
- d. Kerjasama Internasional di Bidang Industri
- 1) Tujuan
- a) membuka, mengembangkan, melindungi dan memanfaatkan akses pasar internasional untuk produk dan jasa industri dalam negeri;
 - b) membuka dan meningkatkan akses untuk memanfaatkan sumber daya industri internasional yang mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri;
 - c) meningkatkan integrasi industri dalam negeri ke dalam jaringan rantai suplai global; dan
 - d) meningkatkan investasi untuk mendukung pengembangan industri di dalam negeri.
- 2) Program/Kegiatan
- a) Peningkatan akses pasar internasional, meliputi:
 - i. penetapan posisi runding dan mengupayakan kerja sama yang saling menguntungkan;
 - ii. penyesuaian standar internasional dan fasilitasi ekspor untuk produk bernilai tambah tinggi dari hilirisasi agronomi dan mineral;
 - iii. penanganan hambatan industri dalam mengakses pasar internasional melalui kerja sama bilateral dan multilateral;
 - iv. pengembangan jejaring kerja dengan negara tujuan ekspor untuk harmonisasi standar dan mengatasi hambatan non-tarif; dan

- v. promosi produk dan jasa industri nasional di luar negeri.
- b) Peningkatan akses kerja sama sumber daya industri, meliputi:
 - i. peningkatan kompetensi SDM industri, salah satunya melalui pelatihan vokasi industri berbasis kerja sama dengan negara mitra;
 - ii. skema kerja sama jangka panjang dengan negara mitra pemasok bahan baku;
 - iii. peningkatan kemudahan akses dalam melakukan transfer teknologi dari negara mitra; dan
 - iv. peningkatan akses sumber pembiayaan proyek industri dari lembaga keuangan dan pembangunan internasional.
 - v. analisa dan penyediaan informasi kebutuhan sumber daya industri di dalam negeri dan penyediaan informasi potensi (terukur quality, cost, and delivery) penyediaan sumber daya industri di negara mitra;
 - vi. pertukaran informasi inovasi teknologi dalam rangka pengembangan industri;
 - vii. pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan
 - viii. peningkatan riset dan pengembangan teknologi industri bersih serta efisiensi energi.
- c) Peningkatan pemanfaatan tarif preferensi bagi ekspor produk industri, meliputi:
 - i. adaptasi standar produk domestik terhadap regulasi negara mitra;
 - ii. optimalisasi Neraca Komoditas, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan tarif preferensi; dan
 - iii. penguatan data tarif preferensi negara mitra dalam rangka peningkatan utilisasi tarif preferensi produk berorientasi ekspor.
- d) Pengembangan jaringan rantai suplai global, meliputi:
 - i. perluasan jejaring kerja sama dengan negara dan mitra industri;
 - ii. meningkatkan pemanfaatan rantai suplai global bagi industri dalam negeri;
 - iii. penyelarasan standar dan kualitas produk serta kompetensi jasa industri dalam negeri dengan standar di negara mitra;
 - iv. fasilitasi dan pendampingan industri dalam mengakses rantai suplai global termasuk peningkatan kemitraan industri kecil-menengah dalam ekosistem rantai suplai global; dan
 - v. meningkatkan kemitraan rantai suplai global melalui Reformasi logistik nasional untuk meningkatkan kinerja ekspor.
- e) Peningkatan *industrial and market intelligence*, meliputi:

- i. pengumpulan dan analisis data dalam rangka identifikasi peluang pasar global dan segmentasi ekspor produk industri nasional;
 - ii. benchmarking keunggulan komparatif industri manufaktur Indonesia dalam kaitannya dengan pemetaan sektor prioritas ekspor dan pengembangan rantai nilai global; dan
 - iii. penyusunan kebijakan berbasis data untuk prioritas kerja sama teknik dan investasi industri.
 - f) peningkatan peran industri nasional dalam kerja sama pembangunan industri internasional dan tindakan pengamanan serta penyelamatan industri dalam negeri dampak konjungtur perekonomian dunia, meliputi:
 - i. mendorong industrialisasi berbasis keberlanjutan dan industri hijau di kawasan bagi negara G20 dan ASEAN;
 - ii. adaptasi standar produk domestik terhadap regulasi negara mitra, dalam memenuhi standar produk dan bisa masuk ke dalam pasar internasional;
 - iii. pemantauan dan analisis risiko global terhadap sektor industri prioritas;
 - iv. diversifikasi pasar ekspor dan sumber bahan baku untuk mengurangi ketergantungan pada negara tertentu; dan
 - v. penyusunan langkah pengamanan industri melalui instrumen kebijakan dan fasilitasi bagi industri terdampak gejolak ekonomi global.
 - g) peningkatan kerja sama investasi asing di sektor industri melalui:
 - i. penyusunan kebutuhan investasi dalam rangka penguatan struktur industri nasional;
 - ii. dukungan kepada pelaku industri dalam menyiapkan studi kelayakan dan insentif fiskal dan non fiskal;
 - iii. kerja sama dengan negara mitra investasi untuk mengembangkan industri halal, industri hijau, dan ekonomi biru; dan
 - iv. peningkatan kerjasama pengembangan industri berteknologi tinggi melalui proyek putar kunci.
- e. Industri Halal
 - 1) Tujuan
 - a) memberikan jaminan ketersediaan produk industri halal bagi masyarakat; dan
 - b) mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) penyusunan regulasi dan kebijakan teknis;
 - b) pembentukan dan penguatan infrastruktur;
 - c) pengembangan SDM;
 - d) fasilitasi insentif fiskal maupun nonfiskal;
 - e) peningkatan promosi;

- f) penguatan kerja sama dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri di bidang jaminan produk halal;
- g) peningkatan dan pengembangan riset, inovasi, dan teknologi di bidang jaminan produk halal; dan
- h) pengawasan dan pengendalian di bidang jaminan produk halal.

5. Transformasi Digital Industri

a. Tujuan

Memperkuat pembangunan industri melalui pemanfaatan dan adopsi teknologi digital sebagai faktor pendukung dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan industri dan peningkatan daya saing global.

b. Program/Kegiatan

- 1) Penguatan infrastruktur digital;
- 2) Penyusunan peta jalan transformasi digital periode 2025-2045 pada sektor industri prioritas dan sektor industri strategis lainnya;
- 3) Penyusunan standar transformasi digital sektor industri dan industri digital;
- 4) Penyusunan standar kualifikasi dan kompetensi digital untuk SDM industri;
- 5) Penguatan kapasitas dan keterampilan digital untuk SDM industri;
- 6) Penyusunan skema insentif transformasi digital sektor industri;
- 7) Penguatan keamanan siber dan perlindungan data industri;
- 8) Penyusunan standar API nasional;
- 9) Sertifikasi INDI 4.0 pada 250 industri tahun 2029;
- 10) Pendampingan transformasi digital industri; dan
- 11) Pengembangan industrial *artificial intelligence* dan *robotics hub*.

6. Perwilayahan Industri

a. Tujuan

- 1) mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah NKRI yang menerapkan prinsip pembangunan keberlanjutan;
- 2) mendorong peningkatan kontribusi investasi sektor industri pengolahan di luar Jawa;
- 3) menumbuhkan pusat pertumbuhan industri yang baru;
- 4) meningkatkan pemanfaatan sumber daya bahan baku menjadi produk industri yang memiliki nilai tambah tinggi;
- 5) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia industri yang kompeten; dan
- 6) memudahkan koordinasi dan sinergi dalam pembangunan industri di daerah.

b. Program yang akan dilaksanakan

- 1) pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI);
- 2) pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- 3) pengembangan KI, terutama pada KI prioritas RPJMN Tahun 2025—2029 yaitu KI Bintan Inti Industrial Estate, KI Krakatau Industrial Estate Cilegon, KI Wilmar, KI Batang, Kawasan Industri Seafer, KI iSentra Lamongan,

KI Ngawi, KI Ketapang Bangun Sarana, KI Kalimantan Industrial Park Indonesia, KI Indonesia Pomalaa Industry Park, KI Konawe, KI Stardust, KI Indonesia Huabao Industrial Park, KI Morowali, KI Sumbawa Barat, KI Pulau Obi, KI IWIP Teluk Weda, KI Buli, KI Fakfak, dan KI Takalar; dan

4) pengembangan Sentra IKM.

7. Kebijakan Afirmatif IKM

a. Tujuan

Mewujudkan IKM yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja, dan menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk diekspor.

b. Program/Kegiatan

1) Kemudahan dan perlindungan IKM, meliputi:

- i. kemudahan usaha; dan
- ii. perlindungan usaha.

2) Dukungan kemitraan IKM, meliputi:

- i. insentif kemitraan: insentif kepada industri besar yang melibatkan IKM dalam rantai nilai industrinya atau jenis insentif kemitraan lainnya;
- ii. pelaksanaan kemitraan melalui pola: subkontrak, rantai pasok, dan pola kemitraan lainnya; dan
- iii. peningkatan peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam kemitraan

3) Pemberian insentif fiskal bagi IKM sesuai kebutuhan.

4) Penyediaan pembiayaan bagi IKM, melalui peningkatan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM.

5) Inkubasi bisnis bagi IKM, meliputi

- i. program inkubasi IKM, yang fokus pada integrasi semua kebutuhan IKM untuk meningkatkan skala usaha IKM dari kecil menuju menengah dan menengah ke besar;
- ii. pengembangan fasilitas inkubator bisnis mulai dari aspek desain, produksi hingga branding dan pemasaran; dan
- iii. program akselerasi bisnis dan produk IKM untuk mengembangkan ekosistem yang mampu mendukung pengembangan IKM.

6) Penumbuhan dan pengembangan IKM serta sentra IKM, meliputi:

- i. pemberdayaan IKM dan sentra IKM;
- ii. peningkatan teknologi dan inovasi produk; dan
- iii. penyediaan data dan informasi untuk mendukung penumbuhan dan pengembangan IKM.

7) kerjasama dalam pengembangan IKM, meliputi:

- i. melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan dan insitusinya lainnya; dan
- ii. melakukan kerjasama kelembagaan dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan/atau asosiasi industri, serta asosiasi profesi.

- 8) Dukungan pemerintah daerah dalam rangka pengembangan IKM dan sentra IKM yang berkelanjutan.
 - 9) Dukungan penerapan industri halal, industri hijau dan sirkular ekonomi, meliputi:
 - i. bantuan dan informasi pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau;
 - ii. fasilitasi penerapan industri hijau;
 - iii. pengembangan produk berbasis keberlanjutan dan industri hijau;
 - iv. penyediaan informasi peraturan dan standar di bidang keberlanjutan dan industri hijau; dan
 - v. peningkatan kompetensi SDM IKM dalam hal penerapan prinsip keberlanjutan dan industri hijau.
8. Transformasi tata kelola pemerintahan.
- a. Tujuan
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan efektif dalam melayani masyarakat.
 - b. Program/Kegiatan
 - 1) penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pelaksanaan pelaporan;
 - 2) penataan organisasi dan SDM aparatur, serta pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - 3) pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN);
 - 4) pelayanan legislasi dan advokasi;
 - 5) pengelolaan komunikasi dan informasi publik;
 - 6) pemberian pelayanan umum dan keprotokolan serta sarana dan prasarana perkantoran; dan
 - 7) pembangunan sistem informasi dan teknologi.

Untuk menunjang keberhasilan strategi industrialisasi, akan dilaksanakan PSN dengan tema hilirisasi, industrialisasi, dan transformasi digital. Adapun dukungan yang akan diberikan oleh Kementerian Perindustrian dalam rangka menyukseskan PSN pada tema tersebut adalah sebagai berikut:

1. pengusulan, monitoring, dan/atau evaluasi PSN yang terkait dengan program hilirisasi SDA meliputi komoditas kelapa sawit, kelapa, rumput laut, nikel, timah, bauksit, dan tembaga;
2. pengusulan, monitoring, dan/atau evaluasi PSN yang terkait dengan program pengembangan industri prioritas meliputi industri kimia dan industri dirgantara; dan/atau
3. pengusulan, monitoring, dan/atau evaluasi PSN yang terkait dengan pengembangan kawasan industri.

C. Kerangka Regulasi

Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan di bidang industri tahun 2025—2029 sebagaimana telah dijelaskan di atas, diperlukan berbagai infrastruktur pendukung salah satunya adalah regulasi yang memadai. Sehubungan dengan hal tersebut, Renstra Kementerian Perindustrian 2025—2029 turut memuat kebutuhan regulasi yang akan disusun oleh Kementerian Perindustrian dalam kurun waktu 2025—2029 dengan mengacu pada program

legislasi nasional. Rincian regulasi yang akan disusun adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Undang-Undang (RUU):
 - a. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 - b. RUU tentang Kawasan Industri;
2. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yaitu RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015—2035;
3. Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres):
 - a. RPerpres tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2025—2029;
 - b. RPerpres tentang Peta Jalan Perwilayahan Industri.

Diharapkan regulasi diatas dapat menunjang pencapaian sasaran strategis, indikator, serta target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Perindustrian 2025—2029.

Tabel 11 Kerangka Regulasi Kementerian Perindustrian Tahun 2025—2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	RUU tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Mewujudkan tata kelola pengembangan industri yang lebih kondusif dan relevan dengan kondisi terkini	Sekretariat Jenderal	1. Sekretariat Negara 2. Kementerian Hukum	2027
2.	RUU tentang Kawasan Industri	Sinkronisasi dan Koordinasi antar K/L dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII)	1. Sekretariat Negara 2. Kementerian Hukum	2026
3.	RPP tentang Perubahan PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015—2035	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014	Sekretariat Jenderal	1. Sekretariat Negara 2. Kementerian Hukum	2026
4.	RPerpres tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2025—2029	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015	Sekretariat Jenderal	1. Sekretariat Negara 2. Kementerian Hukum	2026
5.	Rperpres tentang Peta Jalan Perwilayahan Industri	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII)	1. Sekretariat Negara 2. Kementerian Hukum	2027

D. Kerangka Kelembagaan

Guna mencapai visi, misi, tujuan, strategi, indikator, dan target yang diamanatkan kepada Kementerian Perindustrian, dibentuklah kelembagaan Kementerian Perindustrian melalui Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian dan

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan peraturan tersebut, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi yang terdiri dari atas:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengembangan perwilayahan industri, pengamanan dan penyelamatan industri, peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri dan kegiatan kawasan industri;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perindustrian di daerah;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- f. pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri;
- g. pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia industri;
- h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian di atas, Menteri Perindustrian selaku pimpinan dibantu oleh Wakil Menteri yang bertugas untuk membantu Menteri dalam:

- a. perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Perindustrian; dan
- b. mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;

serta Eselon I dengan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut.

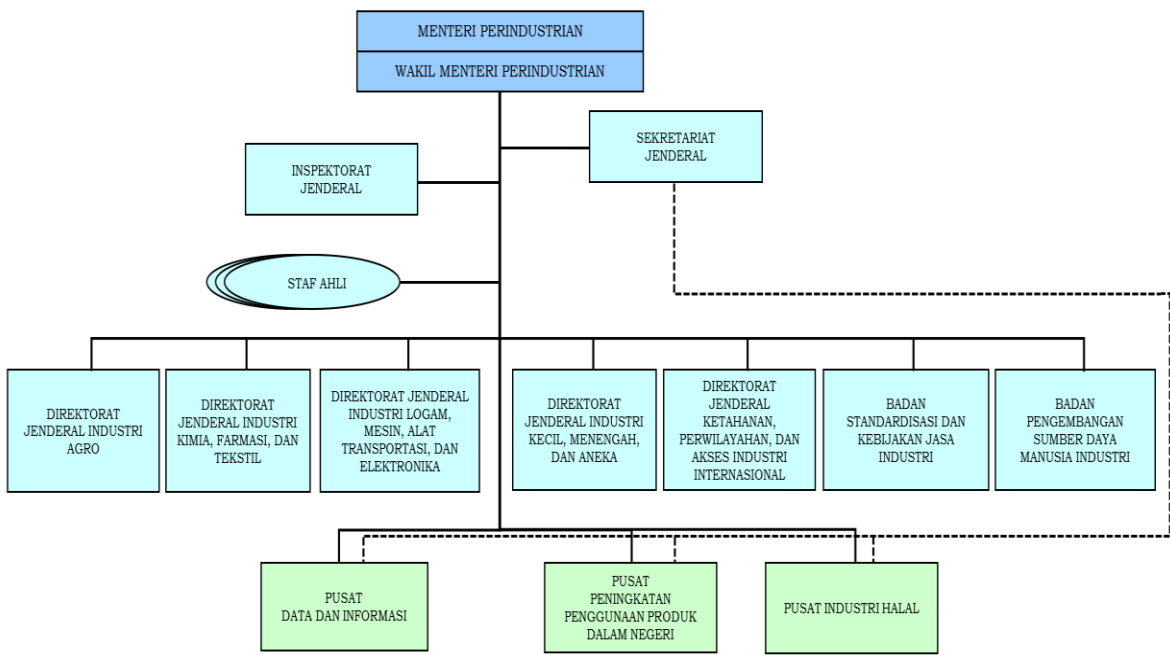
Tabel 12 Nomenklatur Eselon I di Lingkungan Kementerian
Perindustrian Beserta dengan Tugasnya

No	Nomenklatur Eselon I	Tugas
a.	Sekretariat Jenderal	menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
b.	Direktorat Jenderal Industri Agro	menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau.
c.	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengelolaan bahan galian nonlogam, serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki.
d.	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan

No	Nomenklatur Eselon I	Tugas
		industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika.
e.	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kecil, industri menengah, dan industri aneka, serta penguatan kapasitas kelembagaan pada industri kecil dan industri menengah.
f.	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional	menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri, pengembangan perwilayahan industri, pengembangan akses industri internasional, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan kawasan industri.
g.	Inspektorat Jenderal	menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian.
h.	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.
i.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia industri.

No	Nomenklatur Eselon I	Tugas
j.	Staf Ahli Bidang Pendalaman, Penyebaran, dan Pemerataan Industri	mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pendalaman, penyebaran, dan pemerataan industri.
k.	Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi	mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang iklim usaha dan investasi.
l.	Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri	mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang penguatan kemampuan industri dalam negeri.
m.	Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0	mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang percepatan transformasi industri 4.0 dan transformasi digital.

Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian sebagaimana terlampir.



Gambar 11 Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2025—2029, Kementerian Perindustrian akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perindustrian yang telah dijabarkan pada Bab III serta struktur organisasi Kementerian Perindustrian. Sasaran strategis yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 12 berikut ini.

Tabel 13 Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian
Tahun 2025—2029

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Target						Unit Terkait
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	
Tj	Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional								
	1	Rasio Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	Persen	18,17	18,66	19,15	19,70	20,56	
	2	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas	Persen	5,93	6,89	7,95	8,26	8,58	
	3	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan	Persen	5,50	6,52	7,55	7,86	8,14	
SS1	Meningkatnya Kontribusi PDB Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional								
	1	Pertumbuhan PDB kelompok industri prioritas	Persen	6,28	7,33	8,40	8,74	9,09	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, dan Ditjen IKFT
SS2	Tumbuh dan Berkembangnya Industri yang Inklusif								
	1	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Rp Triliun	775,20	852,90	930,60	1.008,30	1.086,00	Ditjen IA, Ditjen IKFT, Ditjen ILMATE, Ditjen IKMA dan Ditjen KPAII
	2	Produktivitas Tenaga Kerja Industri Pengolahan Nonmigas	Rp.Juta/ orang/ tahun	123,1	126,2	133,4	138,8	147,7	BPSDMI
	3	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap Total Pekerja	Persen	14,15	14,68	15,02	15,47	15,70	BPSDMI
	4	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Industri Kecil dan Menengah	Persen	5,26	5,38	5,45	5,60	6,02	Ditjen IKMA
SS3	Meningkatnya Persebaran Industri								
	1	Persentase Nilai Tambah Sektor Industri yang Diciptakan di Luar Jawa	Persen	32,65	33,25	33,36	34,03	34,96	Ditjen IKMA dan Ditjen KPAII
SS4	Meningkatnya Efisiensi Industri Melalui Pemanfaatan Teknologi								
	1	Perusahaan dengan Nilai Indonesia Industri 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0	Perusahaan	87	103	119	139	156	Ditjen IA, Ditjen IKFT, dan Ditjen ILMATE, Ditjen IKMA, dan BSKJI
SS5	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan								
	1	Penurunan Emisi GRK pada Sektor Industri yang Menjadi Prioritas Dekarbonisasi	Juta Ton CO2-Eq	6,75	6,79	6,85	6,90	6,93	Ditjen IA, Ditjen IKFT, Ditjen ILMATE, Ditjen IKMA,

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Target						Unit Terkait
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	
									Ditjen KPAII, dan BSKJI
	2	Rasio Penggunaan Material Sirkular di Sektor Industri	Persen	11	12	13	14	15	Ditjen KPAII dan BSKJI
SS6	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Industri Pengolahan Nonmigas								
	1	Kontribusi Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas terhadap Total Ekspor	Persen	74,60	74,85	75,10	75,30	75,60	Ditjen IA, Ditjen IKFT, Ditjen ILMATE, Ditjen IKMA, dan Ditjen KPAII
	2	Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi	Persen	8,6	9,3	10,0	10,7	11,4	Ditjen IA, Ditjen IKFT, Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA
	3	Diversifikasi Produk Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Diolah		0,286	0,282	0,278	0,274	0,269	Ditjen IA, Ditjen IKFT, Ditjen ILMATE, dan Ditjen IKMA
	4	Jumlah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Diolah yang Berdaya Saing	Produk	208	209	210	211	212	Ditjen IA, Ditjen IKFT, Ditjen ILMATE, dan Ditjen IKMA
SS7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Kementerian Perindustrian Yang Baik								
	1	Indeks RB Kementerian Perindustrian	Nilai	86,45	86,45	87,50	87,50	88,50	Setjen Itjen

Sasaran dan indikator kinerja sasaran strategis akan didukung oleh program. Program yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing, dan Program Dukungan Manajemen. Untuk mengukur keberhasilan program, disusun sasaran dan indikator kinerja sasaran program. Sasaran dan indikator kinerja program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan.

Tabel 15 Sasaran Program Kementerian Perindustrian
Tahun 2025—2029

Kode	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target					
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi								
SP01	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri dalam Penumbuhan Sektor Industri							
	1	Persentase lulusan peserta didik dan diklat yang bekerja dan mempunyai kompetensi bidang industri	Persen	84	85	86	87	88
	2	Persentase lulusan peserta pelatihan yang mempunyai kompetensi bidang industri	Persen	94,0	94,5	95,0	95,5	96,0
	3	Wirausaha baru hasil inkubator bisnis industri yang tumbuh	Tenant	32	40	50	60	70
SP02	Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan Kompetensi SDM Menuju Industri 4.0							
	1	Persentase SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	Persen	94,0	94,5	95,0	95,5	96,0
	2	Industri yang Terfasilitasi Menuju Industri 4.0	Roadmap	8	12	14	16	18
	3	Nilai asesmen <i>Technical and Vocational Education and Training</i> (TVET) 4.0	Nilai	1,85	1,90	1,95	2,00	2,05

Kode	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target					
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
SP03	Meningkatnya Infrastruktur Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Industri							
	1	Persentase rancangan SKKNI/KKNI bidang industri yang mencapai konsensus	Persen	100	100	100	100	100
	2	Persentase Penyusunan Standar Pelatihan Berbasis Kompetensi yang ditetapkan	Persen	100	100	100	100	100
	3	Persentase Fasilitasi Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	Persen	94	95	96	97	98
	4	Persentase Peserta Diklat Asesor Kompetensi yang Kompeten	Persen	94	95	96	97	98
	5	Persentase Tenaga Kerja Industri Kompeten melalui Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi	Persen	94	95	96	97	98
	6	Nilai rata-rata akreditasi program studi	Nilai	300	301	302	303	304
	7	Tingkat animo pendaftar pada unit pendidikan	Rasio	1:10,0	1:10,5	1:11,0	1:11,5	1:12,0
	8	Hasil penelitian sektor industri prioritas yang terpublikasi	Hasil penelitian yang terpublikasi	167	174	188	203	220
Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing								
SP11	Meningkatnya Kontribusi PDB Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Agro Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional							
	1	Pertumbuhan PDB Industri Makanan dan Minuman	Persen	5,43	6,00	7,30	7,70	8,00
	2	Rasio impor bahan baku sektor industri agro terhadap PDB sektor industri non migas	Persen	6,45	6,19	5,93	5,66	5,41
SP12	Meningkatnya Kontribusi PDB Industri berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional							
	1	Pertumbuhan PDB Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional	Persen	11,48	11,48	11,91	11,78	11,86
	2	Pertumbuhan PDB Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	Persen	6,08	6,51	6,96	7,31	7,34
	3	Pertumbuhan PDB Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	Persen	3,50	5,48	5,56	5,85	6,32
	4	Pertumbuhan PDB Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	Persen	3,80	4,00	6,00	6,10	6,20
	5	Rasio Impor Bahan Baku Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Terhadap PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persen	16,94	16,07	15,28	14,49	13,77
SP13	Meningkatnya Kontribusi PDB Industri berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas Pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional							
	1	Pertumbuhan PDB Industri Logam Dasar	Persen	11,49	13,58	14,54	14,72	14,90
	2	Pertumbuhan PDB Industri Mesin dan Perlengkapan	Persen	4,00	5,50	6,50	7,50	8,70
	3	Pertumbuhan PDB Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	Persen	7,50	9,09	10,76	10,85	11,42
	4	Pertumbuhan PDB Industri angkutan	Persen	5,00	6,60	6,90	7,10	7,20
	5	Rasio impor bahan baku industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika terhadap PDB sektor industri non migas	Persen	11,81	11,55	11,21	10,89	10,49
SP14	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Agro							
	1	Kapasitas Produksi Pati Sagu	Ton/Tahun	100.000	150.000	210.000	260.000	320.000
	2	Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa	Persen	55	60	65	70	75
	3	Utilisasi Industri Pengolahan Rumput Laut	Persen	53,76	58,01	62,26	66,51	70,76

Kode	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target					
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
	4	Utilisasi Industri Pengolahan Hasil Laut	Persen	45	50	55	60	65
	5	Rasio Ekspor Produk Hilir Kelapa Sawit terhadap Bahan Baku	Persen	92,3	92,5	92,9	93,3	93,7
	6	Ragam Produk Hilir Sawit	Produk	208	223	233	243	250
SP15	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil							
	1	Utilisasi Industri Pengolahan Garam Industri	Persen	52,50	55,12	57,87	60,76	63,79
	2	Kapasitas Produksi Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara	Ribu ton	60.234,97	60.444,74	66.955,52	74.308,78	79.668,38
	3	Produktivitas Tenaga Kerja Industri TPT	Rp Juta/Orang/Tahun	60,34	64,59	69,61	74,67	79,76
	4	Penyerapan Tenaga Kerja Industri TPT	Orang	3.918.787	3.957.206	3.995.626	4.034.045	4.072.465
SP16	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika							
	1	Kapasitas Produksi Industri Olahan Nikel	Juta ton/tahun	33,64	33,74	33,74	33,74	33,74
	2	Kapasitas Produksi Industri Olahan Tembaga	Ribu ton/tahun	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
	3	Kapasitas Produksi Industri Olahan Bauksit	Juta ton/tahun	6,27	15,27	16,27	16,87	17,47
	4	Kapasitas Produksi Industri Olahan Timah	Ribu ton/tahun	142,1	247,3	257,3	257,3	257,3
	5	Utilisasi Industri Logam Dasar	Persen	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00
	6	Utilisasi Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya	Persen	60,00	63,25	65,78	69,50	70,00
	7	Volume Reparasi Kapal	Ribu DWT (kumulatif)	11,2	11,4	11,8	12,0	12,2
	8	Volume Produksi Pembuatan Kapal	Ribu DWT (kumulatif)	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50
	9	Nilai Ekspor Industri Perkapalan	Ribu USD	858,02	939,41	966,55	1.171,68	1.315,25
SP21	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Agro yang Inklusif							
	1	Nilai investasi sektor industri agro	Rp Triliun	227,04	251,65	274,91	298,55	322,16
	2	Utilisasi industri agro	Persen	74,22	75,54	76,61	77,03	77,33
SP22	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Inklusif							
	1	Nilai Investasi Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	Rp Triliun	179,59	198,03	215,76	233,81	251,86
	2	Utilisasi sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil	Persen	69,35	70,33	71,31	71,42	71,81
SP23	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang Inklusif							
	1	Nilai Investasi Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Rupiah Triliun	361,9	396,3	432,6	468,2	503,9
	2	Utilisasi Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Persen	73,07	77,08	80,90	82,19	83,31
SP24	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang Inklusif							
	1	Nilai Investasi sektor industri Aneka	Rp Triliun	6,7	6,9	7,3	7,7	8,1
	2	Utilisasi Sektor Industri Aneka	Persen	71,41	73,26	75,49	75,98	76,67
	3	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas	Persen	20,00	20,10	20,20	20,30	20,40
	4	Wirausaha industri kecil yang memiliki legalitas usaha	WUB	1.383	11.400	11.400	11.400	11.400
	5	IKM yang Melakukan Kemitraan dengan Industri Besar dan Menengah, serta Sektor Ekonomi Lainnya	IKM	20	20	20	20	20
	6	IKM berbasis Inovasi atau kreativitas yang mendapatkan peningkatan kemampuan dengan	IKM	44	44	44	44	44

Kode	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target					
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
		program akselerasi						
SP25	Tersedianya Dukungan Terhadap Penumbuhan dan Pengembangan Industri Yang Inklusif							
	1	Realisasi Investasi Asing Sektor Industri Pengolahan Nonmigas yang Difasilitasi	USD Miliar	16,12	17,74	19,51	21,46	23,61
	2	Rekomendasi Rumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Ketahanan dan Iklim Usaha Industri yang efektif	Rekomendasi	13	14	15	16	17
SP26	Meningkatnya Kontribusi Jasa Industri Dalam Rangka Mendukung Penumbuhan dan Pengembangan Industri yang Inklusif							
	1	Kontribusi Jasa Industri Terhadap PDB Nasional	Persen	3,12	3,18	3,23	3,29	3,35
SP27	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Halal Dalam Rangka Mendukung Penumbuhan dan Pengembangan Industri yang Inklusif							
	1	Peningkatan nilai produksi produk yang telah bersertifikat TKDN	Persen	2,35	2,40	2,45	2,50	2,55
	2	Presentase Peningkatan Daya Saing Industri yang memproduksi Produk Halal	Persen	4,46	5,19	6,23	6,69	7,00
SP28	Berkembangnya standarisasi industri dalam rangka mendorong industri yang inklusif							
	1	Persentase Peningkatan Perusahaan Industri yang Produknya Sudah Tersertifikasi SNI Wajib Bidang Industri	Persen	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
SP31	Menguatnya Peran Sentra Dalam Rangka Persebaran Industri							
	1	Persentase peningkatan kapasitas produksi untuk sentra IKM penerima fasilitasi fisik	Persen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	2	Persentase Sentra industri kecil dan menengah (IKM) yang dikembangkan di Luar Pulau Jawa	Persen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
SP32	Menguatnya Peran Kawasan Industri Dalam Rangka Persebaran Industri							
	1	Nilai Agregat Investasi Perusahaan Industri dan Kawasan Industri pada KI Prioritas	Rp Triliun	1.209,21	1.227,26	1.251,86	1.269,77	1.273,62
	2	Tingkat Okupansi Kawasan Industri di Luar Pulau Jawa	Persen	51,00	54,00	56,00	60,00	65,00
	3	Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan	Persen	51,30	51,32	52,22	53,11	54,01
SP41	Meningkatnya Efisiensi pada Sektor Industri Agro Melalui Pemanfaatan Teknologi							
	1	Perusahaan Sektor Industri Agro dengan Nilai Indonesia <i>Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) > 3.0	Perusahaan (kumulatif)	14	21	28	35	42
SP42	Meningkatnya Efisiensi pada Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Melalui Pemanfaatan Teknologi							
	1	Perusahaan Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil dengan Nilai Indonesia <i>Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) > 3.0	Perusahaan (kumulatif)	39	43	47	51	55
SP43	Meningkatnya Efisiensi pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Melalui Pemanfaatan Teknologi							
	1	Perusahaan dengan nilai Indonesia <i>Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI) > 3.0 Sektor ILMATE	Industri (kumulatif)	35	41	47	53	59
SP44	Meningkatnya Efisiensi Industri Kecil dan Menengah Melalui Pemanfaatan Teknologi							
	1	Menguatnya kemampuan sektor Industri Kecil Menengah melalui penerapan <i>Making Indonesia 4.0</i>	IKM	1.833	2.000	2.000	2.000	2.000
	2	IKM <i>Startup</i> Berbasis Teknologi yang mendapatkan peningkatan	IKM	20	20	20	20	20

Kode	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target					
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
		kemampuan melalui program akselerasi						
SP45	Meningkatnya Daya Saing Industri yang Telah Menerapkan Teknologi Industri							
	1	Persentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Industri melalui Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	Persen	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
	2	Persentase Peningkatan Efisiensi Perusahaan Industri yang Menerapkan Digitalisasi Manufaktur	Persen	5,00	6,00	6,00	7,00	7,00
SP51	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Agro							
	1	Persentase Perusahaan Industri Agro yang Tingkat Kepatuhanannya Baik	Persen	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00
SP52	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil							
	1	Persentase Perusahaan Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang Tingkat Kepatuhanannya Baik	Persen	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00
SP53	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika							
	1	Persentase Produksi Kendaraan Listrik Roda Empat terhadap Total Produksi Kendaraan Roda Empat	Persen	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
	2	Persentase Perusahaan Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang Tingkat Kepatuhanannya Baik	Persen	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00
SP54	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Kecil, Menengah, dan Aneka							
	1	Persentase Perusahaan Sektor Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang Tingkat Kepatuhanannya Baik	Persen	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00
SP55	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Dalam Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri							
	1	Peningkatan Pelaksanaan Tata Kelola Wasdal Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri	Persen	20,00	35,00	45,00	60,00	80,00
	2	Persentase Kawasan Industri yang Tingkat Kepatuhanannya Baik	Persen	80,00	81,00	82,00	83,00	85,00
	3	Kawasan Industri (KI) yang Menerapkan Aspek Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan	Kawasan Industri (Kumulatif)	5	6	7	8	10
SP56	Meningkatnya Praktik Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular							
	1	Jumlah Perusahaan Industri Berdasarkan Lokasi yang Sudah Tersertifikasi Industri Hijau	Perusahaan (akumulatif)	152	164	176	188	200
	2	Persentase Capaian Penurunan Emisi GRK terhadap Target Nasional pada Industri yang Menjadi Prioritas Dekarbonisasi	Persen	96,43	97,14	97,86	98,57	99,00
SP57	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengawasan Data Sektoral yang Terpadu, Efisien, dan Akuntabel							
	1	Indeks SPBE Kementerian Perindustrian	Indeks	3,50	3,50	3,60	3,60	3,65
	2	Indeks Pembangunan Statistik Kementerian Perindustrian	Indeks	3,05	3,05	3,10	3,10	3,15
SP61	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Agro							
	1	Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap total ekspor	Persen	21,70	21,76	21,83	21,89	21,94
	2	Kontribusi ekspor produk industri agro berteknologi tinggi	Persen	2,06	2,11	2,17	2,22	2,28
	3	Diversifikasi produk industri	-	0,3956	0,3916	0,3876	0,3836	0,3786

Kode	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target					
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
		agro berbasis SDA yang diolah						
	4	Jumlah produk industri agro berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing	Produk	78	82	86	90	94
SP62	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil							
	1	Kontribusi Ekspor Produk Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Terhadap Total Ekspor	Persen	18,37	18,45	18,51	18,56	18,66
	2	Kontribusi Ekspor Produk Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Berteknologi Tinggi	Persen	4,59	4,71	4,82	4,94	5,06
	3	Diversifikasi Produk Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Berbasis SDA yang Diolah	-	0,3251	0,3211	0,3171	0,3131	0,3081
	4	Jumlah Produk Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil berbasis SDA yang diolah yang Berdaya Saing	Produk	60	60	60	61	61
SP63	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika							
	1	Kontribusi Ekspor Produk Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Terhadap Total Ekspor	Persen	31,5	30,7	31,6	31,8	31,6
	2	Nilai Ekspor Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Juta US\$	92.681	96.660	107.655	117.566	128.170
	3	Kontribusi ekspor produk industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika berteknologi tinggi	Persen	5,16	4,93	4,71	4,49	4,28
	4	Diversifikasi produk industri berbasis SDA yang diolah	-	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52
	5	Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing	Produk	7	7	8	8	8
	6	Tingkat partisipasi produk otomotif termasuk <i>Electric Vehicle</i> (EV) Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global	Persen	23,00	25,00	28,00	33,00	36,00
	7	Tingkat partisipasi produk elektronik Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global	Persen	49,00	51,00	53,00	55,00	57,00
SP64	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Aneka							
	1	Kontribusi Ekspor Produk Industri Aneka terhadap Total Ekspor	Persen	3,04	3,06	3,07	3,08	3,10
	2	Kontribusi Ekspor Produk Industri Aneka Berteknologi Tinggi	Persen	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
SP65	Meningkatnya Penguasaan Pasar Ekspor Industri Pengolahan Nonmigas							
	1	Utilisasi Tarif Preferensi dalam Peningkatan Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Persen	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00
	2	Peningkatan Potensi Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas yang difasilitasi	Persen	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00
Program Dukungan Manajemen								
SP71	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Ditjen Agro							
	1	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Industri Agro	Nilai	79,50	83,50	83,55	83,60	83,65
	2	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Agro	Indeks	83,14	83,15	83,16	83,17	83,18
	3	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro	Indeks	94,75	94,76	94,77	94,78	94,79

Kode	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target					
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
	4	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Agro	Nilai	91,76	91,77	91,78	91,79	91,80
	5	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Direktorat Jenderal Industri Agro	Nilai	93,52	93,54	93,56	93,58	93,60
	6	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Kesiapan Statistik Sektor Direktorat Jenderal Industri Agro	Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00
	7	Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada Direktorat Jenderal Industri Agro	Persen	93,59	93,60	93,61	93,62	93,63
	8	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Industri Agro	Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00
	9	Persentase pemberitaan positif sektor industri agro di media massa	Persen	94,20	94,25	94,30	94,35	94,40
	10	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN	Persen	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
	11	Tingkat kepuasan pegawai atas ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Persen	85,30	85,35	85,40	85,45	85,50
	12	Tersedianya SOP yang up to date dan relevan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SP72	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Ditjen IKFT							
	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Nilai	79,50	79,65	79,75	79,85	80,00
	2	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7
	3	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Indeks	94,00	94,25	94,50	94,75	95,00
	4	Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Persen	91,00	91,25	91,50	91,75	92,00
	5	Nilai Hasil Pengawasan Unit Kearsipan	Nilai	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00
	6	Tingkat Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektor Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Nilai	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00
	7	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah Ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00
	8	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Nilai	86,75	87,25	87,75	88,25	88,75
SP73	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Ditjen ILMATE							
	1	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal ILMATE	Indeks	93,40	93,40	94,00	94,00	94,50
	2	Penilaian dan Analisis Keuangan Direktorat Jenderal ILMATE	Nilai	75,00	75,25	75,50	75,75	76,00
	3	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Direktorat Jenderal ILMATE	Nilai	70,10	73,00	76,00	79,00	82,00

Kode	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target					
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
	4	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker di lingkungan Ditjen ILMATE	Persen	50,00	52,00	55,00	57,00	60,00
	5	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal ILMATE	Nilai	79,45	79,45	79,70	79,70	80,00
	6	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal ILMATE	Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7
	7	Tingkat Peningkatan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00
	8	Usulan Program Legislasi Ditjen ILMATE yang telah masuk dalam/selesai tahap harmonisasi	Legislasi	2	2	2	2	2
	9	Persentase penggunaan produk dalam negeri dengan pengadaan barang dan/atau jasa pada Ditjen ILMATE	Persen	91,00	91,30	91,50	91,70	92,00
SP74	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima							
	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Nilai	79,45	79,45	79,70	79,70	80,00
	2	Rata-rata indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka	Nilai	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7
	3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Unit Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Nilai	93,40	93,40	94,00	94,00	94,50
	4	Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap total aset lancar Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Persen	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	5	Nilai hasil pengawasan kearsipan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Nilai	70,10	73,00	76,00	79,00	82,00
	6	Tingkat Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Nilai	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00
	7	Efektivitas layanan kehumasan pemberitaan sektor IKM	Persen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	8	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	91,00	91,30	91,50	91,70	92,00
	9	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00
	10	Efektivitas regulasi di Ditjen IKMA	Persen	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	11	Persentase SOP yang direviu dan ditindaklanjuti dalam rangka penguatan organisasi dan tata laksana di lingkungan Ditjen IKMA	Persen	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	12	Tingkat kepuasan pegawai atas ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Nilai	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	13	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	75,00	75,25	75,50	75,75	76,00
SP75	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi pada Layanan Prima Ditjen KPAII							
	1	Nilai SAKIP Ditjen KPAII	Nilai	79,45	79,45	79,70	79,70	80,00

Kode	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target					
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
	2	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen KPAII	Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7
	3	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Indeks	93,40	93,40	94,00	94,00	94,50
	4	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	70,10	73,00	76,00	79,00	82,00
	5	Tingkat Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektoral	Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00
	6	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Ditjen KPAII	Persen	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00
	7	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti oleh Satker di Lingkungan Ditjen KPAII	Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00
	8	Efektivitas Regulasi yang Diinisiasi oleh Ditjen KPAII	Persen	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00
	9	Jumlah Kebijakan Industri yang Efektif	Peraturan (kumulatif)	11	12	13	14	15
	10	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Ditjen KPAII	Nilai	86,00	86,25	86,50	86,75	87,00
SP76	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada BSKJI							
	1	Persentase penggunaan produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	Persen	81,00	81,00	81,00	82,00	82,00
	2	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7
	3	Persentase jenis layanan di seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
	4	Indeks Manfaat Kerja Sama	Indeks	4,10	4,10	4,10	4,12	4,12
	5	Persentase satker yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik Minimal A	Persen	41,00	50,00	58,00	66,00	75,00
	6	Tingkat Penerapan SPBE & Kesiapan Statistik Sektoral	Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00
	7	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh seluruh Satker BSKJI	Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00
	8	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan	Nilai	70,10	73,00	76,00	79,00	82,00
	9	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI	Nilai	79,45	79,45	79,70	79,70	80,00
	10	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	93,40	93,40	94,00	94,00	94,50
	11	Penilaian dan analisis laporan keuangan	Nilai	86,00	86,25	86,50	86,75	87,00
SP77	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima pada BPSDMI							
	1	Nilai SAKIP BPSDMI	Nilai	79,45	79,45	79,70	79,70	80,00
	2	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan BPSDMI	Nilai	86,00	86,25	86,50	86,75	87,00
	3	Indeks Profesional ASN pada BPSDMI	Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7
	4	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada BPSDMI	Indeks	93,40	93,40	94,00	94,00	94,50
	5	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada BPSDMI	Nilai	70,10	73,00	76,00	79,00	82,00
	6	Tingkat Penerapan SPBE & Kesiapan Statistik Sektoral pada BPSDMI	Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00
	7	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh BPSDMI	Persen	60,00	62,00	64,00	68,00	70,00
	8	Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pada BPSDMI	Persen	91,00	91,30	91,50	91,70	92,00

Kode	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target					
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
SP78	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Itjen							
	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Kementerian Perindustrian	Persen	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30
	2	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal	Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00
	3	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian	Persen	13,20	20,00	30,00	40,00	50,00
	4	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai	79,45	79,45	79,70	79,70	80,00
	5	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7
	6	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	Indeks	93,40	93,40	94,00	94,00	94,50
	7	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal	Nilai	70,10	73,00	76,00	79,00	82,00
	8	Tingkat Kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal	Persen	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00
	9	Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00
	10	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal	Persen	91,00	91,30	91,50	91,70	92,00
	12	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal	Nilai	86,00	86,25	86,50	86,75	87,00
SP79	Terwujudnya Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian yang Efektif							
	1	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	Persen	100	100	100	100	100
	2	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Kinerja Pegawai	Persen	100	100	100	100	100
	3	Nilai SAKIP	Nilai	79,45	79,45	79,70	79,70	80,00
	4	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Indeks	94,80	94,80	94,85	94,85	95,00
	5	Indeks Sistem Merit	Nilai	330,5	330,5	331,00	331,00	331,00
	6	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7
	7	Indeks Berakhlak	Persen	67,25	67,25	68,00	68,00	69,00
	8	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Indeks	93,40	93,40	94,00	94,00	94,50
	9	Tingkat Akuntabilitas Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	10	Tingkat Maturitas SPIP	Indeks	3,70	3,70	3,75	3,75	3,80
	11	Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	3,8	3,8	3,8	3,8	3,9
	12	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	86,45	86,45	87,19	87,19	87,20
	13	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8
	14	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	66,00	66,00	67,00	67,00	68,00
	15	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,55	4,55	4,60	4,60	4,70
	16	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	87,3	87,3	87,6	87,6	88,1
	17	Survei Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,3	91,3	91,7	91,7	92,0
	18	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	95,00	95,00	95,30	95,30	95,30
	19	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	70,10	73,00	76,00	79,00	82,00
	20	Indeks SPBE Kementerian Perindustrian	Indeks	3,45	3,45	3,64	3,64	3,76
	21	Indeks Pembangunan Statistik Kementerian Perindustrian	Indeks	3,05	3,05	3,20	3,20	3,30
	22	Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau	Persen	91,00	91,30	91,50	91,70	92,00

Kode	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target					
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
		jasa pada Sekretariat Jenderal						
	23	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker di lingkungan Kementerian Perindustrian	Persen	60,00	62,00	64,00	68,00	70,00
SP80	Terwujudnya ASN bidang industri yang Professional dan Berkepribadian							
	1	Persentase ASN bidang industri lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	Persen	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00
	2	Tingkat kepuasan layanan pembinaan jabatan fungsional bidang industri	Persen	80,00	85,00	90,00	92,00	95,00
SP81	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Efektif							
	1	Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian Yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	Persen	95,00	96,00	97,00	99,00	100,00
	2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi	Persen	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00
	3	Persentase atas temuan ADTT yang Ditindaklanjuti	Persen	80,00	80,25	80,45	80,60	81,00

B. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai visi dan misi tahun 2025—2029, dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan. Kebutuhan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2025—2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Kebutuhan Pendanaan Program Kementerian Perindustrian Tahun 2025—2029 (Dalam Miliar Rupiah)

No	Program	2025	2026	2027	2028	2029
1	Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	1.657,31	1.940,18	2.019,53	2.125,22	2.215,65
2	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	666,87	1.741,52	1.933,79	2.078,78	2.236,84
3	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	195,43	330,43	344,83	359,24	373,72
TOTAL		2.519,61	4.012,13	4.298,15	4.563,24	4.826,20

Tabel 17 Kebutuhan Pendanaan Program Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029 Berdasarkan Unit Eselon I (Dalam Milyar Rupiah)

No	Unit	2025	2026	2027	2028	2029
1	Sekretariat Jenderal	294,14	360,21	399,15	432,91	459,13
2	Direktorat Jenderal Industri Agro	99,11	326,98	337,32	353,30	368,21
3	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	100,28	493,81	503,57	513,72	521,02
4	Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	106,90	252,65	382,13	472,85	546,30
5	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	328,30	563,97	553,78	557,68	558,18
6	Inspektorat Jenderal	44,26	54,73	56,28	57,95	59,63
7	Badan Standardisasi dan	676,81	823,00	875,20	922,16	999,81

No	Unit	2025	2026	2027	2028	2029
	Kebijakan Industri					
8	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional	99,00	209,18	243,47	279,30	318,34
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	770,81	927,61	947,26	973,37	995,59
TOTAL		2.519,61	4.012,13	4.298,15	4.563,24	4.826,20

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025—2029 disusun sebagai dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja yang selaras dengan visi dan misi Presiden serta mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025—2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025—2029, dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN).

Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025—2029 merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam rangka memperkuat kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Guna mencapai hal tersebut, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang terukur, serta dituangkan dalam tiga program utama yang mendukung arah pembangunan industri nasional.

Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis, Kementerian Perindustrian akan melaksanakan proses pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara berkala, baik secara internal maupun melalui mekanisme akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Evaluasi dimaksudkan untuk memastikan ketercapaian target yang telah ditetapkan serta sebagai dasar perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program di masa mendatang.

LAMPIRAN

A. Matriks Kinerja dan Anggaran Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2025 – 2029

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
TJ	Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional		Pusat							2.519.612.734	4.012.134.141	4.298.149.707	4.563.236.361	4.826.204.063
	1	Rasio Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB		Persen	18,17	18,66	19,15	19,7	20,56					
	2	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas		Persen	5,93	6,89	7,95	8,26	8,58					
	3	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan		Persen	5,5	6,52	7,55	7,86	8,14					
SS1	Meningkatnya Kontribusi PDB Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional		Pusat							60.261.344	278.137.786	346.900.000	383.850.000	416.300.000
	1	Pertumbuhan PDB kelompok industri prioritas		Persen	6,28	7,33	8,40	8,74	9,09					
SS2	Tumbuh dan Berkembangnya Industri yang Inklusif		Pusat							691.630.641	1.350.090.634	1.432.134.950	1.507.857.245	1.604.292.568
	1	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas		Rp Triliun	775,20	852,90	930,60	1008,30	1086,00					
	2	Produktivitas Tenaga Kerja Industri Pengolahan Nonmigas		Rp.Juta/orang/ tahun	123,10	126,20	133,40	138,80	147,70					
	3	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap Total Pekerja		Persen	14,15	14,68	15,02	15,47	15,70					
	4	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Industri Kecil dan Menengah		Persen	5,26	5,38	5,45	5,60	6,02					
SS3	Meningkatnya Persebaran Industri		Pusat							13.315.985	50.505.000	54.983.000	59.471.000	65.292.000
	1	Persentase Nilai Tambah Sektor Industri yang Diciptakan di Luar Jawa		Persen	32,65	33,25	33,36	34,03	34,96					
SS4	Meningkatnya Efisiensi Industri Melalui Pemanfaatan Teknologi		Pusat							29.709.411	84.650.000	92.250.000	95.850.000	100.450.000
	1	Perusahaan dengan Nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0		Perusahaan	87	106	119	139	156					
SS5	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan		Pusat							27.225.658	67.701.620	90.877.685	103.573.328	119.399.967
	1	Penurunan Emisi GRK pada Sektor Industri yang Menjadi Prioritas Dekarbonisasi		Juta Ton CO2-Eq	6,75	6,79	6,85	6,90	6,93					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	2	Rasio Penggunaan Material Sirkular di Sektor Industri		Persen	11	12	13	14	15					
SS6	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Industri Pengolahan Nonmigas		Pusat							40.160.174	240.865.000	261.475.000	287.414.000	304.822.000
	1	Kontribusi Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas terhadap Total Ekspor		Persen	74,60	74,85	75,10	75,30	75,60					
	2	Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi		Persen	8,6	9,3	10	10,7	11,4					
	3	Diversifikasi Produk Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Diolah			0,286	0,282	0,278	0,274	0,269					
	4	Jumlah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Diolah yang Berdaya Saing		Produk (Kumulatif)	208	209	210	211	212					
SS7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Kementerian Perindustrian Yang Baik		Pusat							1.657.309.521	1.940.184.101	2.019.529.072	2.125.220.788	2.215.647.528
	1	Indeks RB Kementerian Perindustrian		Nilai	86,45	86,45	87,50	87,50	88,50					
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			Pusat							195.432.034	330.430.000	344.835.000	359.240.000	373.720.000
SP01	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri dalam Penuhungan Sektor Industri		Pusat							39.081.000	152.705.000	164.710.000	174.307.700	185.377.500
	1	Persentase lulusan peserta didik dan diklat yang bekerja dan mempunyai kompetensi bidang industri		Persen	84	85	86	87	88					
	2	Persentase lulusan peserta pelatihan yang mempunyai kompetensi bidang industri		Persen	94,0	94,5	95,0	95,5	96,0					
	3	Wirausaha baru hasil inkubator bisnis industri yang tumbuh		Tenant	32	40	50	60	70					
SP02	Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan Kompetensi SDM Menuju Industri 4.0		Pusat							3.350.205	5.100.000	6.410.000	7.690.000	9.002.000
	1	Persentase SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya		Persen	94,0	94,5	95,0	95,5	96,0					
	2	Industri yang Terfasilitasi Menuju Industri 4.0		Roadmap	8	12	14	16	18					
	3	Nilai asesmen <i>Technical and Vocational Education and Training</i> (TVET) 4.0		Nilai	1,85	1,90	1,95	2,00	2,05					
SP03	Meningkatnya Infrastruktur Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		Pusat							153.000.829	172.625.000	173.715.000	177.242.300	179.340.500

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Industri													
	1	Persentase rancangan SKKNI/KKNI bidang industri yang mencapai konsensus		Persen	100	100	100	100	100					
	2	Persentase Penyusunan Standar Pelatihan Berbasis Kompetensi yang ditetapkan		Persen	100	100	100	100	100					
	3	Persentase Fasilitasi Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)		Persen	94	95	96	97	98					
	4	Persentase Peserta Diklat Asesor Kompetensi yang Kompeten		Persen	94	95	96	97	98					
	5	Persentase Tenaga Kerja Industri Kompeten melalui Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi		Persen	94	95	96	97	98					
	6	Nilai rata-rata akreditasi program studi		Nilai	300	301	302	303	304					
	7	Tingkat animo pendaftar pada unit pendidikan		Rasio	1:10	1:10,5	1:11	1:11,5	1:12					
	8	Hasil penelitian sektor industri prioritas yang terpublikasi		Hasil penelitian yang terpublikasi	167	174	188	203	220					
Kegiatan Pendukung Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			Pusat							195.432.034	330.430.000	344.835.000	359.240.000	373.720.000
Kegiatan Pelatihan Vokasi Industri (4957)			Pusat							21.966.600	31.789.125	36.935.000	42.204.200	47.479.500
SK1	Terfasilitasinya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri Dalam Mendukung Penumbuhan Sektor Industri Melalui Unit Pelatihan Vokasi													
	1	Persentase lulusan peserta didik dan diklat yang bekerja dan mempunyai kompetensi bidang industri		Persen	84	85	86	87	88					
	2	Persentase lulusan peserta pelatihan yang mempunyai kompetensi bidang industri		Persen	94	94,5	95	95,5	96					
	3	Wirausaha baru hasil inkubator bisnis industri yang tumbuh		Tenant	32	40	50	60	70					
SK2	Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan Kompetensi SDM Menuju Industri 4.0 Melalui Unit Pelatihan Vokasi													
	1	Persentase SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya		Persen	94	94,5	95	95,5	96					
	2	Industri yang Terfasilitasi Menuju Industri 4.0		Roadmap	8	12	14	16	18					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
SK3	Terfasilitasinya Peningkatan Infrastruktur Pelatihan Vokasi Industri pada Unit Pelatihan Vokasi													
	1	Persentase rancangan SKKNI bidang industri yang mencapai konsensus		Persen	100	100	100	100	100					
	2	Persentase Penyusunan Standar Pelatihan Berbasis Kompetensi yang ditetapkan		Persen	100	100	100	100	100					
	3	Persentase Fasilitasi pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)		Persen	94	95	96	97	98					
	4	Persentase Peserta Diklat Asesor Kompetensi yang Kompeten		Persen	94	95	96	97	98					
	5	Persentase Tenaga Kerja Industri Kompeten melalui Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi		Persen	94	95	96	97	98					
Kegiatan Pendidikan Tinggi Vokasi Industri (4958)			Pusat							41.753.411	155.200.000	158.625.000	158.374.800	161.485.500
SK1	Terfasilitasinya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri dalam Mendukung Penumbuhan Sektor Industri melalui Unit Pendidikan Tinggi Vokasi													
	1	Persentase lulusan peserta didik dan diklat yang bekerja dan mempunyai kompetensi bidang industri		Persen	84	85	86	87	88					
	2	Wirausaha baru hasil inkubator bisnis industri yang tumbuh		Tenant	32	40	50	60	70					
SK2	Terfasilitasinya Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan Kompetensi SDM Menuju Industri 4.0 melalui Unit Pendidikan Tinggi Vokasi													
	1	Nilai asesmen <i>Technical and Vocational Education and Training</i> (TVET) 4.0		Nilai	1,85	1,90	1,95	2	2,05					
SK3	Terfasilitasinya Peningkatan Infrastruktur Pendidikan Vokasi Industri pada Unit Pendidikan Tinggi Vokasi													
	1	Nilai rata-rata akreditasi program studi		Nilai	300	301	302	303	304					
	2	Rasio animo pendaftar pada unit pendidikan		Rasio	1:10	1:10,5	1:11	1:11,5	1:12					
	3	Penelitian Sektor Industri Prioritas yang terpublikasi		Hasil penelitian yang	167	174	188	203	220					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
				terpublikasi										
Kegiatan Pendidikan Menengah Kejuruan Industri (4959)			Pusat							131.712.023	143.440.875	149.275.000	158.661.000	164.755.000
SK1	Terfasilitasinya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri Dalam Mendukung Penumbuhan Sektor Industri Melalui Unit Pendidikan Menengah Vokasi													
	1	Persentase lulusan peserta didik dan diklat yang bekerja dan mempunyai kompetensi bidang industri		Persen	84	85	86	87	88					
SK2	Terfasilitasinya Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan Kompetensi SDM Menuju Industri 4.0 Melalui Unit Pendidikan Menengah Vokasi													
	1	Nilai asesmen <i>Technical and Vocational Education and Training (TVET)</i> 4.0		Nilai	1,85	1,90	1,95	2	2,05					
SK3	Terfasilitasinya Peningkatan Infrastruktur Pendidikan Vokasi Industri Pada Unit Pendidikan Menengah Vokasi													
	1	Tingkat animo pendaftar pada unit pendidikan		Rasio	1:10	1:10,5	1:11	1:11,5	1:12					
Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing			Pusat							666.871.179	1.741.520.040	1.933.785.635	2.078.775.573	2.236.836.535
SP11	Meningkatnya Kontribusi PDB Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Agro Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional		Pusat							2.400.000	16.000.000	17.200.000	18.400.000	19.100.000
	1	Pertumbuhan PDB Industri Makanan dan Minuman		Persen	5,43	6,00	7,30	7,70	8,00					
	2	Rasio impor bahan baku sektor industri agro terhadap PDB sektor industri non migas		Persen	6,45	6,19	5,93	5,66	5,41					
SP12	Meningkatnya Kontribusi PDB Industri berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional		Pusat							22.543.037	188.450.000	192.200.000	195.450.000	198.700.000
	1	Pertumbuhan PDB Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional		Persen	11,48	11,48	11,91	11,78	11,86					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	2	Pertumbuhan PDB Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia		Persen	6,08	6,51	6,96	7,31	7,34					
	3	Pertumbuhan PDB Industri Tekstil dan Pakaian Jadi		Persen	3,50	5,48	5,56	5,85	6,32					
	4	Pertumbuhan PDB Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki		%	3,80	4,00	6,00	6,10	6,20					
	5	Rasio Impor Bahan Baku Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Terhadap PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas		Persen	16,94	16,07	15,28	14,49	13,77					
SP13	Meningkatnya Kontribusi PDB Industri berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas Pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional		Pusat							24.062.307	33.300.000	77.000.000	98.000.000	114.000.000
	1	Pertumbuhan PDB Industri Logam Dasar		Persen	11,49	13,58	14,54	14,72	14,90					
	2	Pertumbuhan PDB Industri Mesin dan Perlengkapan		%	4,00	5,50	6,50	7,50	8,70					
	3	Pertumbuhan PDB Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik		%	7,50	9,09	10,76	10,85	11,42					
	4	Pertumbuhan PDB Industri angkutan		Persen	5,00	6,60	6,90	7,10	7,20					
	5	Rasio impor bahan baku industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika terhadap PDB sektor industri non migas		persen	11,81	11,55	11,21	10,89	10,49					
SP14	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Agro		Pusat							2.756.000	11.500.000	11.500.000	12.500.000	13.000.000
	1	Kapasitas Produksi Pati Sagu		Ton/Tahun	100.000	150.000	210.000	260.000	320.000					
	2	Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa		Persen	55	60	65	70	75					
	3	Utilisasi Industri Pengolahan Rumput Laut		persen	53,76	58,01	62,26	66,51	70,76					
	4	Utilisasi Industri Pengolahan Hasil Laut		Persen	45	50	55	60	65					
	5	Rasio Ekspor Produk Hilir Kelapa Sawit terhadap Bahan Baku		Persen	92,3	92,5	92,9	93,3	93,7					
	6	Ragam Produk Hilir Sawit		Produk	208	223	233	243	250					
SP15	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja		Pusat							3.500.000	19.887.786	21.000.000	22.500.000	24.000.000

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil													
	1	Utilisasi Industri Pengolahan Garam Industri		Persen	52,50	55,12	57,87	60,76	63,79					
	2	Kapasitas Produksi Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara		Ribu ton	60.234,97	60.444,74	66.955,52	74.308,78	79.668,38					
	3	Produktivitas Tenaga Kerja Industri TPT		Rp. Juta/ Orang/Tahun	60,34	64,59	69,61	74,67	79,76					
	4	Penyerapan Tenaga Kerja Industri TPT		Orang	3.918.787	3.957.206	3.995.626	4.034.045	4.072.465					
SP16	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika		Pusat							5.000.000	9.000.000	28.000.000	37.000.000	47.500.000
	1	Kapasitas Produksi Industri Olahan Nikel		Juta ton/tahun	33,64	33,74	33,74	33,74	33,74					
	2	Kapasitas Produksi Industri Olahan Tembaga		Ribu ton/tahun	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195					
	3	Kapasitas Produksi Industri Olahan Bauksit		Juta ton/tahun	6,27	15,27	16,27	16,87	17,47					
	4	Kapasitas Produksi Industri Olahan Timah		Ribu ton/tahun	142,1	247,3	257,3	257,3	257,3					
	5	Utilisasi Industri Logam Dasar		Persen	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00					
	6	Utilisasi Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya		%	60,00	63,25	65,78	69,5	70,00					
	7	Volume Reparasi Kapal		Ribu DWT (kumulatif)	11,2	11,4	11,8	12,0	12,2					
	8	Volume Produksi Pembuatan Kapal		Ribu DWT (kumulatif)	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50					
	9	Nilai Ekspor Industri Perkapalan		Ribu USD	858,02	939,41	966,55	1.171,68	1.315,25					
SP21	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Agro yang Inklusif		Pusat							41.550.000	132.800.000	140.000.000	142.200.000	146.910.000
	1	Nilai investasi sektor industri agro		Rp Triliun	227,04	251,65	274,91	298,55	322,16					
	2	Utilisasi industri agro		Persen	74,22	75,54	76,61	77,03	77,33					
SP22	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Inklusif		Pusat							8.552.816	90.400.000	91.650.000	95.650.000	96.400.000
	1	Nilai Investasi Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Rp Triliun	179,59	198,03	215,76	233,81	251,86					
	2	Utilisasi sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil		Persen	69,35	70,33	71,31	71,42	71,81					
SP23	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor		Pusat							13.000.000	63.233.315	95.000.000	115.000.000	133.500.000

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang Inklusif													
	1	Nilai Investasi Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika		Rupiah Triliun	361,9	396,3	432,6	468,2	503,9					
	2	Utilisasi Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika		Persen	73,07	77,08	80,90	82,19	83,31					
SP24	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang Inklusif		Pusat							229.527.055	375.912.940	365.120.940	365.620.940	366.120.940
	1	Nilai Investasi sektor industri Aneka		Rp. Triliun	6,7	6,9	7,3	7,7	8,1					
	2	Utilisasi Sektor Industri Aneka		Persen	71,41	73,26	75,49	75,98	76,67					
	3	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas		Persen	20,00	20,1	20,2	20,3	20,4					
	4	Wirausaha industri kecil yang memiliki legalitas usaha		WUB	1.383	11.400	11.400	11.400	11.400					
	5	IKM yang Melakukan Kemitraan dengan Industri Besar dan Menengah, serta Sektor Ekonomi Lainnya		IKM	20	20	20	20	20					
	6	IKM berbasis Inovasi atau kreativitas yang mendapatkan peningkatan kemampuan dengan program akselerasi		IKM	44	44	44	44	44					
SP25	Tersedianya Dukungan Terhadap Penumbuhan dan Pengembangan Industri Yang Inklusif		Pusat							14.282.000	28.050.000	32.258.500	37.100.125	39.928.332
	1	Realisasi Investasi Asing Sektor Industri Pengolahan Nonmigas yang Difasilitasi		USD Miliar	16,12	17,74	19,51	21,46	23,61					
	2	Rekomendasi Rumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Ketahanan dan Iklim Usaha Industri yang efektif		Rekomendasi	13	14	15	16	17					
SP26	Meningkatnya Kontribusi Jasa Industri Dalam Rangka Mendukung Penumbuhan dan Pengembangan Industri yang Inklusif		Pusat							146.078.610	221.677.587	242.829.510	263.540.180	303.321.096
	1	Kontribusi Jasa Industri Terhadap PDB Nasional		Persen	3,12	3,18	3,23	3,29	3,35					
SP27	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Halal Dalam Rangka Mendukung Penumbuhan dan		Pusat							33.208.126	89.286.792	99.941.000	106.406.000	119.192.200

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Pengembangan Industri yang Inklusif													
	1	Peningkatan nilai produksi produk yang telah bersertifikat TKDN		Persen	2,35	2,4	2,45	2,5	2,55					
	2	Presentase Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk Halal		Persen	4,46	5,19	6,23	6,69	7,00					
SP28	Berkembangnya standarisiasi industri dalam rangka mendorong industri yang inklusif		Pusat							10.000.000	18.300.000	20.500.000	23.100.000	25.200.000
	1	Persentase Peningkatan Perusahaan Industri yang Produknya Sudah Tersertifikasi SNI Wajib Bidang Industri		Persen	1,00	1,5	2,00	2,5	3,00					
SP31	Menguatnya Peran Sentra Dalam Rangka Persebaran Industri		Pusat							6.965.985	19.655.000	19.655.000	19.655.000	19.655.000
	1	Persentase peningkatan kapasitas produksi untuk sentra IKM penerima fasilitasi fisik		Persen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00					
	2	Persentase Sentra industri kecil dan menengah (IKM) yang dikembangkan di Luar Pulau Jawa		Persen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00					
SP32	Menguatnya Peran Kawasan Industri Dalam Rangka Persebaran Industri		Pusat							6.350.000	30.850.000	35.328.000	39.816.000	45.637.000
	1	Nilai Agregat Investasi Perusahaan Industri dan Kawasan Industri pada KI Prioritas		Rp Triliun	1.209,21	1.227,26	1.251,86	1.269,77	1.273,62					
	2	Tingkat Okupansi Kawasan Industri di Luar Pulau Jawa		Persen	51,00	54,00	56,00	60,00	65,00					
	3	Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan		Persen	51,3	51,32	52,22	53,11	54,01					
SP41	Meningkatnya Efisiensi pada Sektor Industri Agro Melalui Pemanfaatan Teknologi		Pusat							4.600.000	9.000.000	9.100.000	9.700.000	9.800.000
	1	Perusahaan Sektor Industri Agro dengan Nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) > 3.0		Perusahaan (kumulatif)	14	21	28	35	42					
SP42	Meningkatnya Efisiensi pada Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Melalui Pemanfaatan Teknologi		Pusat							8.412.000	40.000.000	41.500.000	42.000.000	43.500.000
	1	Perusahaan Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil dengan Nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) >		Perusahaan (kumulatif)	39	43	47	51	55					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		3.0												
SP43	Meningkatnya Efisiensi pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Melalui Pemanfaatan Teknologi		Pusat							4.000.000	7.500.000	13.000.000	15.000.000	17.500.000
	1	Perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI) > 3.0 Sektor ILMATE		Perusahaan/ Industri (kumulatif)	35	41	47	53	59					
SP44	Meningkatnya Efisiensi Industri Kecil dan Menengah Melalui Pemanfaatan Teknologi		Pusat							7.247.411	22.650.000	22.650.000	22.650.000	22.650.000
	1	Menguatnya kemampuan sektor Industri Kecil Menengah melalui penerapan <i>Making Indonesia 4.0</i>		IKM	1.833	2.000	2.000	2.000	2.000					
	2	IKM <i>Startup</i> Berbasis Teknologi yang mendapatkan peningkatan kemampuan melalui program akselerasi		IKM	20	20	20	20	20					
SP45	Meningkatnya Daya Saing Industri yang Telah Menerapkan Teknologi Industri		Pusat							5.450.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000
	1	Persentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Industri melalui Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri		Persen	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00					
	2	Persentase Peningkatan Efisiensi Perusahaan Industri yang Menerapkan Digitalisasi Manufaktur		Persen	5,00	6,00	6,00	7,00	7,00					
SP51	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Agro		Pusat							3.000.000	10.500.000	10.580.000	10.650.000	10.750.000
	1	Persentase Perusahaan Industri Agro yang Tingkat Kepatuhanannya Baik		Persen	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00					
SP52	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil		Pusat							750.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000	6.700.000
	1	Persentase Perusahaan Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang Tingkat Kepatuhanannya Baik		Persen	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00					
SP53	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika		Pusat							3.166.666	4.000.000	13.000.000	18.500.000	23.000.000
	1	Persentase Produksi Kendaraan		Persen	1,00	1,1	1,2	1,3	1,4					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Listrik Roda Empat terhadap Total Produksi Kendaraan Roda Empat												
	2	Persentase Perusahaan Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang Tingkat Kepatuhanannya Baik		Persen	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00					
SP54	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Kecil, Menengah, dan Aneka		Pusat							0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	1	Persentase Perusahaan Sektor Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang Tingkat Kepatuhanannya Baik		Persen	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00					
SP55	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Dalam Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri		Pusat							3.300.000	15.000.000	18.100.000	21.016.000	24.293.000
	1	Peningkatan Pelaksanaan Tata Kelola Wasdal Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri		Persen	20,00	35,00	45,00	60,00	80,00					
	2	Persentase Kawasan Industri yang Tingkat Kepatuhanannya Baik		Persen	80,00	81,00	82,00	83,00	85,00					
	3	Kawasan Industri (KI) yang Menerapkan Aspek Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan		Kawasan Industri (Kumulatif)	5	6	7	8	10					
SP56	Meningkatnya Praktik Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular		Pusat							9.400.000	18.700.000	25.000.000	27.000.000	33.400.000
	1	Jumlah Perusahaan Industri Berdasarkan Lokasi yang Sudah Tersertifikasi Industri Hijau		Perusahaan (akumulatif)	152	164	176	188	200					
	2	Persentase Capaian Penurunan Emisi GRK terhadap Target Nasional pada Industri yang Menjadi Prioritas Dekarbonisasi		Persen	96,43	97,14	97,86	98,57	99,00					
SP57	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengawasan Data Sektoral yang Terpadu, Efisien, dan Akuntabel		Pusat							7.608.992	9.001.620	13.597.685	15.707.328	17.256.967
	1	Indeks SPBE Kementerian Perindustrian		Indeks	3,50	3,50	3,60	3,60	3,65					
	2	Indeks Pembangunan Statistik Kementerian Perindustrian		Indeks	3,05	3,05	3,10	3,10	3,15					
SP61	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Agro		Pusat							6.350.000	91.300.000	91.420.000	95.000.000	96.770.000
	1	Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap total ekspor		Persen	21,70	21,76	21,83	21,89	21,94					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	2	Kontribusi ekspor produk industri agro berteknologi tinggi		Persen	2,06	2,11	2,17	2,22	2,28					
	3	Diversifikasi produk industri agro berbasis SDA yang diolah		-	0,3956	0,3916	0,3876	0,3836	0,3786					
	4	Jumlah produk industri agro berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing		Produk	78	82	86	90	94					
SP62	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil		Pusat							8.254.147	64.615.000	64.165.000	64.965.000	65.265.000
	1	Kontribusi Ekspor Produk Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Terhadap Total Ekspor		Persen	18,37	18,45	18,51	18,56	18,66					
	2	Kontribusi Ekspor Produk Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Berteknologi Tinggi		Persen	4,59	4,71	4,82	4,94	5,06					
	3	Diversifikasi Produk Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Berbasis SDA yang Diolah		-	0,3251	0,3211	0,3171	0,3131	0,3081					
	4	Jumlah Produk Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil berbasis SDA yang diolah yang Berdaya Saing		Produk	60	60	60	61	61					
SP63	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika		Pusat							8.456.027	31.000.000	44.500.000	57.500.000	63.000.000
	1	Kontribusi Ekspor Produk Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Terhadap Total Ekspor		Persen	31,5	30,7	31,6	31,8	31,6					
	2	Nilai Ekspor Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika		Juta USD	92.681	96.660	107.655	117.566	128.170					
	3	Kontribusi ekspor produk industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika berteknologi tinggi		persen	5,16	4,93	4,71	4,49	4,28					
	4	Diversifikasi produk industri berbasis SDA yang diolah		-	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52					
	5	Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing		produk	7	7	8	8	8					
	6	Tingkat partisipasi produk otomotif termasuk <i>Electric Vehicle</i> (EV) Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global		Persen	23,00	25,00	28,00	33,00	36,00					
	7	Tingkat partisipasi produk		Persen	49,00	51,00	53,00	55,00	57,00					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		elektronik Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global												
SP64	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Aneka		Pusat							0	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
	1	Kontribusi Ekspor Produk Industri Aneka terhadap Total Ekspor		Persen	3,04	3,06	3,07	3,08	3,10					
	2	Kontribusi Ekspor Produk Industri Aneka Berteknologi Tinggi		Persen	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07					
SP65	Meningkatnya Penguasaan Pasar Ekspor Industri Pengolahan Nonmigas		Pusat							17.100.000	49.600.000	57.040.000	65.599.000	75.437.000
	1	Utilisasi Tarif Preferensi dalam Peningkatan Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas		Persen	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00					
	2	Peningkatan Potensi Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas yang difasilitasi		Persen	9,00	9,5	10,00	10,5	11,00					
Kegiatan Pendukung Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing			Pusat							666.871.179	1.741.520.040	1.933.785.635	2.078.775.573	2.236.836.535
Kegiatan Perbaikan Rantai Pasok Industri Agro (6044)			Pusat							4.500.000	37.500.000	32.700.000	33.400.000	33.600.000
SK1	Meningkatnya Kontribusi PDB Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional													
	1	Rasio impor bahan baku sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap PDB sektor industri agro		Persen	0,50	0,48	0,47	0,45	0,44					
SK2	Meningkatnya Kontribusi PDB Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia dan Pakan Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional													
	1	Rasio impor bahan baku sektor industri kemurgi, oleokimia dan pakan terhadap PDB sektor industri agro		Persen	1,27	1,21	1,16	1,10	1,05					
SK3	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang Inklusif													
	1	Utilisasi industri hasil hutan dan		Persen	84,06	85,56	86,76	87,24	87,58					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		perkebunan												
SK4	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan yang Inklusif													
	1	Utilisasi industri makanan, hasil laut dan perikanan		Persen	64,22	65,36	66,28	66,65	66,91					
SK5	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia dan Pakan yang Inklusif													
	1	Utilisasi Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan		Persen	74,14	75,46	76,52	76,95	77,25					
SK6	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan													
	1	Kontribusi Ekspor Produk Industri Hasil Hutan dan Perkebunan terhadap Total Ekspor		Persen	5,36	5,39	5,42	5,45	5,48					
	2	Diversifikasi Produk Industri Berbasis SDA yang Diolah Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan		-	0,3477	0,3437	0,3397	0,3357	0,3307					
Kegiatan Penumbuhan Industri Substitusi Impor dan Hilirisasi Industri Agro (6045)			Pusat							6.500.000	33.500.000	36.160.000	37.300.000	38.960.000
SK1	Meningkatnya Kontribusi PDB Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional													
	1	Rasio Impor Bahan Baku Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan terhadap PDB Sektor Industri Non Migas		Persen	1,73	1,64	1,56	1,48	1,41					
SK2	Meningkatnya Kontribusi PDB Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Agro Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional													
	1	Pertumbuhan PDB Industri Makanan dan Minuman		Persen	5,43	6,00	7,30	7,70	8,00					
SK3	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan													
	1	Kapasitas Produksi Pati Sagu		Ton/Tahun	100.000	150.000	210.000	260.000	320.000					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	2	Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa Sektor Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan		Persen	55	60	65	70	75					
	3	Utilisasi Industri Pengolahan Rumput Laut		Persen	53,76	58,01	62,26	66,51	70,76					
	4	Utilisasi Industri Pengolahan Hasil Laut		Persen	45	50	55	60	65					
SK4	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar													
	1	Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar		Persen	55	60	65	70	75					
SK5	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia dan Pakan													
	1	Ragam Produk Hilir Sawit		Produk	208	223	233	243	250					
SK6	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang Inklusif													
	1	Utilisasi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan		Persen	84,06	85,56	86,76	87,24	87,58					
SK7	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang Inklusif													
	1	Utilisasi Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar		Persen	73,03	74,34	75,38	75,8	76,1					
SK8	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia dan Pakan yang Inklusif													
	1	Utilisasi Industri Kemurgi, Oleokimia dan Pakan		Persen	74,14	75,46	76,52	76,95	77,25					
SK9	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar													
	1	Diversifikasi Produk Industri Berbasis SDA yang Diolah Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar		-	0,5184	0,5144	0,5104	0,5064	0,5014					
Kegiatan Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Industri Agro (6046)			Pusat							33.900.000	109.500.000	116.500.000	125.500.000	129.500.000

[illegible]

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Pakan yang Inklusif													
	1	Nilai investasi sektor industri kemurgi, oleokimia dan pakan		Rp Triliun	54,18	58,50	62,70	67,04	71,43					
SK4	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan													
	1	Persentase perusahaan industri hasil hutan dan perkebunan yang tingkat kepatuhannya baik		Persen	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00					
SK5	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan													
	1	Persentase perusahaan industri makanan, hasil laut dan perikanan yang tingkat kepatuhannya baik		Persen	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00					
SK6	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar													
	1	Persentase perusahaan industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar yang tingkat kepatuhannya baik		Persen	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00					
SK7	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia dan Pakan													
	1	Persentase perusahaan industri kemurgi, oleokimia dan pakan yang tingkat kepatuhannya baik		Persen	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00					
SK8	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar													
	1	Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar		Produk	7	7	7	7	7					
SK9	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia dan Pakan													
	1	Diversifikasi produk industri berbasis SDA yang diolah sektor industri kemurgi, oleokimia dan pakan		-	0,6341	0,6301	0,6261	0,6221	0,6171					
Kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk			Pusat							0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000

[illegible]

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	1	Utilisasi Tarif Preferensi Sektor Industri Agro		Persen	54,00	54,50	55,00	55,50	56,00					
SK6	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang Inklusif													
	1	Utilisasi industri hasil hutan dan perkebunan		Persen	84,06	85,56	86,76	87,24	87,58					
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal Industri Agro (6050)			Pusat							1.050.000	9.800.000	10.000.000	8.700.000	8.910.000
SK1	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang Inklusif													
	1	Nilai investasi sektor industri hasil hutan dan perkebunan		Rp Triliun	100,74	114,56	127,41	140,31	153,13					
	2	Utilisasi industri hasil hutan dan perkebunan		Persen	84,06	85,56	86,76	87,24	87,58					
SK2	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang Inklusif													
	1	Nilai investasi sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar		Rp Triliun	15,96	17,95	19,81	21,69	23,56					
SK3	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Agro yang Inklusif													
	1	Peningkatan jumlah perusahaan di sektor industri agro yang mendapatkan fasilitas fiskal dan non-fiskal		Persen	3	6	9	12	15					
	2	Tingkat penyelesaian rancangan peraturan kebijakan sektor industri agro		Persen	20,00	33,33	46,67	60,00	73,33					
SK4	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan													
	1	Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor		Persen	5,36	5,39	5,42	5,45	5,48					
SK5	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia dan Pakan													
	1	Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing sektor industri kemurgi, oleokimia dan pakan		Produk	8	8	8	8	9					
Kegiatan Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Agro (6051)			Pusat							4.600.000	9.000.000	9.100.000	9.700.000	9.800.000

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
SK1	Meningkatnya Efisiensi pada Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Melalui Pemanfaatan Teknologi													
	1	Perusahaan sektor industri hasil hutan dan perkebunan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) > 3.0		Perusahaan	1	2	3	4	5					
SK2	Meningkatnya Efisiensi pada Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Melalui Pemanfaatan Teknologi													
	1	Perusahaan sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) > 3.0		Perusahaan	5	8	11	14	17					
SK3	Meningkatnya Efisiensi pada Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Melalui Pemanfaatan Teknologi													
	1	Perusahaan sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) > 3.0		Perusahaan	7	9	11	13	15					
SK4	Meningkatnya Efisiensi pada Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia dan Pakan Melalui Pemanfaatan Teknologi													
	1	Perusahaan sektor industri kemurgi, oleokimia dan pakan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) > 3.0		Perusahaan	1	2	3	4	5					
Kegiatan Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (6053)			Pusat							23.043.756	169.500.000	169.500.000	170.000.000	170.000.000
SK1	Meningkatnya Kontribusi PDB Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional													
	1	Pertumbuhan PDB Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional		Persen	11,48	11,48	11,91	11,78	11,86					
	2	Rasio Impor Bahan Baku Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi Terhadap PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas		Persen	2	1,87	1,76	1,63	1,55					

[illegible]

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima													
	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Nilai	79,5	79,75	80	80,25	80,5					
Kegiatan Pengembangan Standar Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (6054)			Pusat							2.900.612	12.600.000	12.800.000	13.000.000	13.100.000
SK1	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan pada Sektor Industri Kimia Hulu													
	1	Persentase Perusahaan Sektor Industri Kimia Hulu yang Tingkat Kepatuhanannya Baik		Persen	70	72	74	76	78					
SK2	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan pada Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi													
	1	Persentase Perusahaan Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi yang Tingkat Kepatuhanannya Baik		Persen	70	72	74	76	78					
SK3	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan pada Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki													
	1	Persentase Perusahaan Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki yang Tingkat Kepatuhanannya Baik		Persen	70	72	74	76	78					
SK4	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan pada Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam													
	1	Persentase Perusahaan Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam yang Tingkat Kepatuhanannya Baik		Persen	70	72	74	76	78					
SK5	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi													
	1	Kontribusi Ekspor Produk Industri Kimia Hilir dan Farmasi Terhadap Total Ekspor		Persen	2,96	2,98	2,99	3,01	3,02					
	2	Kontribusi Ekspor Produk Industri Kimia Hilir dan Farmasi		Persen	1,24	1,27	1,31	1,34	1,37					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Berteknologi Tinggi												
SK6	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kimia Hulu yang Inklusif													
	1	Utilisasi Sektor Industri Kimia Hulu		Persen	82,3	83,47	84,64	84,77	85,23					
SK7	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam yang Inklusif													
	1	Utilisasi Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam		Persen	65,4	66,33	67,25	67,36	67,72					
SK8	Meningkatnya Kontribusi PDB Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional													
	1	Pertumbuhan PDB Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki		Persen	3,8	4	6	6,1	6,2					
SK9	Meningkatnya Efisiensi Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Melalui Pemanfaatan Teknologi													
	1	Perusahaan Sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam dengan Nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) > 3.0		Perusahaan (kumulatif)	5	6	7	8	9					
Kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (6055)			Pusat							1.800.000	20.900.000	21.400.000	21.900.000	21.900.000
SK1	Meningkatnya Kontribusi PDB Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional													
	1	Rasio Impor Bahan Baku Sektor Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Terhadap PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas		Persen	3,34	3,14	2,98	2,83	2,68					
SK2	Meningkatnya Kontribusi PDB Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional													
	1	Rasio Impor Bahan Baku Sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Terhadap PDB Sektor		Persen	1,09	1,06	1,03	1	0,97					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Industri Pengolahan Nonmigas												
SK3	Meningkatnya Kontribusi PDB Sektor Industri Kimia Hulu Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional													
	1	Rasio Impor Bahan Baku Sektor Industri Kimia Hulu Terhadap PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas		Persen	10,51	10	9,5	9,03	8,57					
SK4	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi													
	1	Jumlah Produk Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi berbasis SDA yang diolah yang Berdaya Saing		Produk	9	9	9	9	9					
SK5	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam yang Inklusif													
	1	Utilisasi Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam		Persen	65,4	66,33	67,25	67,36	67,72					
SK6	Terwujudnya Birokrasi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima													
	1	Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Persen	50	55	60	65	70					
Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (6056)			Pusat							702.816	7.750.000	7.000.000	7.500.000	7.500.000
SK1	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi													
	1	Kontribusi Ekspor Produk Industri Kimia Hilir dan Farmasi Terhadap Total Ekspor		Persen	2,96	2,98	2,99	3,01	3,02					
SK2	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam													
	1	Kontribusi Ekspor Produk		Persen	0,48	0,48	0,48	0,49	0,49					

[illegible]

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Diversifikasi Produk Sektor Industri Kimia Hulu													
	1	Kontribusi Ekspor Produk Industri Kimia Hulu Berteknologi Tinggi		Persen	3,33	3,42	3,50	3,59	3,68					
	2	Diversifikasi Produk Sektor Industri Kimia Hulu Berbasis SDA yang Diolah		-	0,3335	0,3295	0,3255	0,3215	0,3165					
	3	Jumlah Produk Sektor Industri Kimia Hulu berbasis SDA yang diolah yang Berdaya Saing		Produk	39	39	39	40	40					
SK5	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki													
	1	Kontribusi Ekspor Produk Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Terhadap Total Ekspor		Persen	7,72	7,76	7,8	7,82	7,86					
	2	Jumlah Produk Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki berbasis SDA yang diolah yang Berdaya Saing		Produk	1	1	1	1	1					
SK6	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kimia Hulu yang Inklusif													
	1	Nilai Investasi Sektor Industri Kimia Hulu		Rp Triliun	79,33	87,13	94,57	102,16	109,77					
	2	Utilisasi Sektor Industri Kimia Hulu		Persen	82,3	83,47	84,64	84,77	85,23					
SK7	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi yang Inklusif													
	1	Nilai Investasi Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi		Rp Triliun	33,37	36,76	39,99	43,27	46,56					
SK8	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki yang Inklusif													
	1	Nilai Investasi Sektor Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki		Rp Triliun	41,59	46,59	51,28	56,02	60,74					
SK9	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam yang Inklusif													
	1	Nilai Investasi Sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam		Rp Triliun	25,3	27,55	29,93	32,36	34,79					
	2	Utilisasi Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam		Persen	65,4	66,33	67,25	67,36	67,72					

[illegible]

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional													
	1	Rasio Impor Bahan Baku Sektor Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Terhadap PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas		Persen	3,34	3,14	2,98	2,83	2,68					
SK2	Meningkatnya Kontribusi PDB Sektor Industri Kimia Hulu Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional													
	1	Pertumbuhan PDB Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia		Persen	6,08	6,51	6,96	7,31	7,34					
SK3	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam													
	1	Jumlah Produk Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam berbasis SDA yang diolah yang Berdaya Saing		Produk	11	11	11	11	11					
SK4	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi yang Inklusif													
	1	Utilisasi Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi		Persen	61,04	61,9	62,77	62,86	63,2					
SK5	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki yang Inklusif													
	1	Utilisasi Sektor Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki		Persen	67,3	68,25	69,21	69,32	69,69					
SK6	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam yang Inklusif													
	1	Utilisasi Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam		Persen	65,4	66,33	67,25	67,36	67,72					
SK7	Terwujudnya Birokrasi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima													
	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	79,5	79,75	80	80,25	80,5					

[illegible]

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam yang Inklusif													
	1	Utilisasi Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam		Persen	65,4	66,33	67,25	67,36	67,72					
Kegiatan Perbaikan Rantai Pasok Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (6062)			Pusat							36.728.973	54.733.315	131.000.000	163.000.000	194.500.000
SK1	Meningkatnya Kontribusi PDB Industri berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas Pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional													
	1	Pertumbuhan PDB Industri Logam Dasar		Persen	11,49	13,58	14,54	14,72	14,90					
	2	Pertumbuhan PDB Industri Mesin dan Perlengkapan		persen	4,00	5,50	6,50	7,50	8,70					
	3	Pertumbuhan PDB Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik		persen	7,50	9,09	10,76	10,85	11,42					
	4	Pertumbuhan PDB Industri Alat Angkutan		persen	5,00	6,60	6,90	7,10	7,20					
	5	Rasio impor bahan baku industri logam terhadap PDB sektor industri non migas		persen	10,78	10,55	10,24	9,95	9,59					
	6	Rasio impor bahan baku industri permesinan dan alat mesin pertanian terhadap PDB sektor industri non migas		persen	0,93	0,91	0,88	0,86	0,83					
	7	Rasio Impor Bahan Baku Sektor Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan		persen	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05					
	8	Rasio Impor Bahan Baku Sektor Industri Elektronika dan Telematika		persen	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02					
SK2	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika													
	1	Kapasitas Produksi Industri Olahan Nikel		Juta ton/ tahun	33,64	33,74	33,74	33,74	33,74					
	2	Kapasitas Produksi Industri		Ribu ton/	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Olahan Tembaga		tahun										
	3	Kapasitas Produksi Industri Olahan Bauksit		Juta ton/ tahun	6,274	15,274	16,274	16,874	17,47					
	4	Kapasitas Produksi Industri Olahan Timah		Ribu ton/ tahun	142,1	247,3	257,3	257,3	257,3					
	5	Utilisasi Industri Logam Dasar		Persen	77	79	81	83	85					
	6	Utilisasi Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya		Persen	60	63,25	65,78	69,5	70					
	7	Volume Reparasi Kapal		Ribu DWT	11.370,60	11.439,29	11.507,99	11.576,68	11.645,38					
	8	Volume Produksi Pembuatan Kapal		Ribu DWT	600,46	667,59	734,73	801,99	936,13					
	9	Nilai Ekspor Industri Perkapalan		Ribu USD	858.021	939.418	966.550	1.171,68	1.315,25					
SK3		Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang Inklusif												
	1	Nilai realisasi investasi industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan		Rp. Triliun	50,5	54,5	59,4	64,3	69,3					
	2	Utilisasi sektor Industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan		Persen	75,25	79,38	83,32	84,65	85,80					
	3	Nilai realisasi investasi industri elektronika dan telematika		Rp. Triliun	8,9	9,0	10,1	10,9	11,7					
	4	Utilisasi sektor Industri elektronika dan telematika		Persen	46,89	48,57	51,37	52,79	53,19					
	5	Nilai realisasi investasi industri permesinan dan alat mesin pertanian		Rp. Triliun	36,2	41,3	45,9	50,5	55,3					
	6	Utilisasi sektor Industri permesinan dan alat mesin pertanian		Persen	57,16	60,31	63,29	64,30	65,18					
	7	Nilai realisasi investasi industri logam		Rp. Triliun	266,2	291,6	317,3	342,5	367,6					
	8	Utilisasi sektor Industri Logam		Persen	78,39	81,21	85,90	88,26	88,93					
SK4		Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika												
	1	Persentase Perusahaan Sektor Industri Logam yang Tingkat Kepatuhan Baik		Persen	70	72	74	76	78					
	2	Persentase Perusahaan Sektor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian yang Tingkat Kepatuhan Baik		Persen	70	72	74	76	78					

[illegible]

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional													
	1	Rasio Impor Bahan Baku Sektor Industri Logam		Persen	10,78	10,55	10,24	9,95	9,59					
	2	Rasio Impor Bahan Baku Sektor IMATAP		Persen	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05					
	3	Rasio Impor Bahan Baku Sektor IET		Persen	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02					
	4	Rasio Impor Bahan Baku Sektor IPAMP		Persen	0,93	0,91	0,88	0,86	0,83					
Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (6068)			Pusat							10.456.027	31.500.000	54.500.000	72.000.000	82.500.000
SK1	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang Inklusif													
	1	Nilai realisasi investasi industri elektronika dan telematika		Rp. Triliun	10.326	11.781	11.995	13.099	14.719					
	2	Nilai realisasi investasi industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan		Rp. Triliun	15.092	16.864	17.530	19.144	21.358					
	3	Nilai realisasi investasi industri permesinan dan alat mesin pertanian		Rp. Triliun	13.588	13.730	15.784	17.237	18.600					
	4	Nilai realisasi investasi industri logam		Rp. Triliun	53.674	54.285	62.346	68.086	73.493					
SK2	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika													
	1	Nilai ekspor produk industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan		Juta USD	15.092	16.864	17.530	19.144	21.358					
	2	Kontribusi ekspor produk industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan berteknologi tinggi		Persen	2,30	2,16	2,02	1,88	1,75					
	3	Kontribusi ekspor produk industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan terhadap total ekspor		Persen	5	5,3	5,2	5,2	5,3					
	4	Nilai ekspor produk industri elektronika dan telematika		Juta USD	10.326	11.781	11.995	13.099	14.719					
	5	Kontribusi ekspor produk industri elektronika dan telematika berteknologi tinggi		Persen	2,68	2,59	2,51	2,42	2,34					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	6	Kontribusi ekspor produk industri elektronika dan telematika terhadap total ekspor		Persen	4	3,7	3,5	3,5	3,6					
	7	Kontribusi ekspor produk industri permesinan dan alat mesin pertanian berteknologi tinggi		Persen	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19					
	8	Kontribusi ekspor produk industri permesinan dan alat mesin pertanian terhadap total ekspor		Persen	5	4,4	4,6	4,7	4,6					
	9	Nilai ekspor produk industri logam		Juta USD	53.674	54.285	62.346	68.086	73.493					
	10	Nilai ekspor produk industri permesinan dan alat mesin pertanian		Juta USD	13.588	13.730	15.784	17.237	18.600					
	11	Kontribusi ekspor produk industri logam terhadap total ekspor		Persen	18	17,2	18,3	18,4	18,1					
	12	Tingkat partisipasi produk elektronik Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global (GVC)		Persen	49	51	53	55	57					
	13	Tingkat partisipasi produk otomotif termasuk <i>Electric Vehicle</i> (EV) Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global (GVC)		Persen	23	25	28	33	36					
Kegiatan Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (6070)			Pusat							4.000.000	7.500.000	13.000.000	15.000.000	17.500.000
SK1	Meningkatnya Efisiensi pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Melalui Pemanfaatan Teknologi													
	1	Jumlah perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) lebih dari 3.0 di sektor industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan		perusahaan	16	19	22	25	28					
	2	Jumlah perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) lebih dari 3.0 di sektor industri elektronika dan telematika		Perusahaan	13	15	17	19	21					
	3	Jumlah perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) lebih dari 3.0 di sektor industri permesinan dan alat mesin pertanian		Perusahaan	6	7	8	9	10					
Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan			Pusat							243.740.451	426.567.940	415.775.940	416.275.940	416.775.940

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (6071)														
SK1	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Aneka yang Inklusif													
	1	Nilai Investasi sektor industri Aneka		Rp. Triliun	6,7	6,9	7,3	7,7	8,1					
	2	Utilisasi Sektor Industri Aneka		Persen	71,41	73,26	75,49	75,98	76,67					
	3	Proporsi nilai tambah IKM Aneka terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas		Persen	0,38	0,39	0,4	0,41	0,41					
	4	Wirausaha industri kecil Industri Aneka yang mendapatkan legalitas usaha		WUB	0	500	500	500	500					
SK2	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kecil dan Menengah													
	1	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas		Persen	20	20,1	20,2	20,3	20,4					
	2	Wirausaha industri kecil yang mendapatkan legalitas usaha		WUB	15	60	60	60	60					
SK3	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kecil dan Menengah PFBB yang Inklusif													
	1	Proporsi nilai tambah IKM PFBB terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas		Persen	7,3	7,4	7,5	7,55	7,6					
	2	Wirausaha industri kecil PFBB yang mendapatkan legalitas usaha		WUB	456	1.400	1.400	1.400	1.400					
	3	IKM PFBB yang Melakukan Kemitraan dengan Industri Besar dan Menengah, serta Sektor Ekonomi Lainnya		IKM	1	5	5	5	5					
	4	IKM PFBB berbasis Inovasi atau kreativitas yang mendapatkan peningkatan kemampuan dengan program akselerasi		IKM	10	20	20	20	20					
SK4	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kecil dan Menengah KSK yang Inklusif													
	1	Proporsi nilai tambah IKM KSK terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas		Persen	7,5	7,6	7,65	7,75	7,8					
	2	Wirausaha industri kecil KSK yang mendapatkan legalitas usaha		WUB	456	1.400	1.400	1.400	1.400					
	3	IKM KSK yang Melakukan		IKM	1	5	5	5	5					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Kemitraan dengan Industri Besar dan Menengah, serta Sektor Ekonomi Lainnya												
	4	IKM KSK berbasis Inovasi atau kreativitas yang mendapatkan peningkatan kemampuan dengan program akselerasi		IKM	0	30	30	30	30					
SK5	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kecil dan Menengah LMEA yang Inklusif													
	1	Proporsi nilai tambah IKM LMEA terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas		Persen	4,45	4,5	4,55	4,65	4,7					
	2	Wirausaha industri kecil LMEA yang mendapatkan legalitas usaha		WUB	456	1.400	1.400	1.400	1.400					
	3	IKM LMEA yang Melakukan Kemitraan dengan Industri Besar dan Menengah, serta Sektor Ekonomi Lainnya		IKM	15	15	15	15	15					
SK6	Menguatnya Peran Sentra Dalam Rangka Persebaran Industri													
	1	Persentase peningkatan kapasitas produksi untuk sentra IKM penerima fasilitasi fisik		Persen	10	10	10	10	10					
	2	Sentra industri kecil dan menengah (IKM) yang dikembangkan		Sentra	6	6	6	6	6					
SK7	Menguatnya Peran Sentra Dalam Rangka Persebaran Industri PFBB													
	1	Sentra industri kecil dan menengah (IKM) PFBB yang dikembangkan		Sentra	4	4	4	4	4					
SK8	Menguatnya Peran Sentra Dalam Rangka Persebaran Industri KSK													
	1	Sentra industri kecil dan menengah (IKM) KSK yang dikembangkan		Sentra	3	5	5	5	5					
SK9	Menguatnya Peran Sentra Dalam Rangka Persebaran Industri LMEA													
	1	Sentra industri kecil dan menengah (IKM) LMEA yang dikembangkan		Sentra	3	8	8	8	8					
SK10	Menguatnya Peran Sentra Dalam Rangka Persebaran Industri Aneka													
	1	Sentra industri kecil dan menengah (IKM) Aneka yang		Sentra	1	1	1	1	1					

[illegible]

[illegible]

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Kawasan Industri													
	1	Peningkatan Pelaksanaan Tata Kelola Wasdal Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri		Persen	20	35	45	60	80					
Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri (6073)			Pusat							27.682.000	61.650.000	70.898.500	81.536.125	93.764.594
SK1	Termanfaatkannya Hasil Diklat Luar Negeri													
	1	Peningkatan pemahaman pegawai yang mendapatkan informasi hasil diklat luar negeri		Persen	60	65	70	75	80					
SK2	Meningkatnya daya saing kemandirian dan penguasaan pasar industri pengolahan non migas dan jasa industri													
	1	Persentase pendampingan pemanfaatan akses internasional bagi pelaku usaha industri dalam negeri		Persen	10	12	14	16	18					
SK3	Penanganan Hambatan Akses Industri Internasional													
	1	Penanganan Hambatan Akses Industri Internasional bagi pelaku usaha industri dalam negeri		Rekomendasi Kebijakan	4	4	4	4	4					
SK4	Pemanfaatan Forum Kerja sama FTA													
	1	Posisi runding FTA/ PTA/ CEPA yang ditindaklanjuti		Rekomendasi Kebijakan	3	4	5	6	7					
SK5	Pemanfaatan Forum Kerja sama non-FTA													
	1	Kerja sama Selatan-selatan dan Triangular		Kerja Sama	1	1	1	1	1					
	2	Kerja sama dalam Forum Bilateral, Regional dan Multilateral		Kerja Sama	1	1	1	1	1					
SK6	Meningkatnya Akses Sumber Daya Industri													
	1	Nilai Komitmen Investasi Asing Sektor Industri Pengolahan yang Difasilitasi		Miliar Rupiah	10	10	15	15	20					
	2	Jumlah Minat Investasi Asing Sektor Industri Pengolahan yang Difasilitasi		Minat	3	3	4	4	4					
	3	Jumlah Kesepakatan Kerja Sama Internasional dalam rangka Pembukaan Akses Sumber Daya		Kesepakatan	1	1	2	2	2					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Industri yang Difasilitasi												
SK7	Meningkatnya Fasilitas Promosi dan Penetrasi Global Sektor Industri													
	1	Kemitraan industri dalam jaringan produksi global		Kemitraan	3	3	3	3	3					
SK8	Meningkatnya Kerja Sama Internasional melalui Investasi, Pembukaan Akses Pasar dan Akses Sumber Daya Industri (Atperin Taipei, Brussel dan Tokyo)													
	1	Analisis Potensi Pasar dan Profil Industri Unggulan		Rekomendasi Kebijakan	9	10	15	18	19					
	2	Kesepakatan Kerja Sama Bidang Industri yang Difasilitasi		Kesepakatan	5	5	5	8	8					
Kegiatan Pengembangan Perwilayahan Industri (6074)			Pusat							7.850.000	38.850.000	45.378.000	51.574.000	59.284.000
SK1	Menguatnya Peran Kawasan Industri (KI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi													
	1	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI iSentra @Lamongan		Rp Triliun	1,37	1,56	1,72	1,85	1,97					
	2	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Ngawi		Rp Triliun	(tahap persiapan)	(tahap persiapan)	(tahap persiapan)	(tahap persiapan)	0,03					
	3	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Seafer		Rp Triliun	0,73	0,77	1,43	1,94	2,46					
	4	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Sumbawa Barat		Rp Triliun	(tahap persiapan)	(tahap persiapan)	(tahap persiapan)	0,01	0,23					
	5	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Fakfak		Rp Triliun	(tahap persiapan)	(tahap persiapan)	(tahap persiapan)	(tahap persiapan)	0,01					
	6	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Morowali		Rp Triliun	467,46	468,21	468,86	469,37	469,89					
	7	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Stardust		Rp Triliun	0,48	0,64	0,77	0,88	0,98					
	8	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Bintan Inti Industrial Estate		Rp Trilliun	1,73	1,81	3,04	4,01	4,99					
	9	Nilai Investasi Perusahaan		Rp Triliun	5,99	5,99	6,00	6,11	6,22					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Krakatau Industrial Estate Cilegon												
	10	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KIT Wilmar		Rp Triliun	13,14	13,27	13,38	13,46	13,55					
	11	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KIT Batang		Rp Triliun	4,14	4,50	4,82	5,07	5,32					
	12	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Ketapang Bangun Sarana (KBS)		Rp Triliun	2,31	2,40	2,47	2,53	2,59					
	13	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Konawe		Rp Triliun	305,96	306,24	306,48	306,68	306,87					
	14	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP)		Rp Triliun	9,16	11,33	13,20	14,67	16,15					
	15	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Pulau Obi		Rp Triliun	2,53	5,04	7,21	8,91	10,62					
	16	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Buli		Rp Triliun	0,21	0,40	0,57	0,70	0,83					
	17	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI)		Rp Triliun	4,30	6,35	8,12	9,51	10,91					
	18	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Indonesia Pomalaa Industry Park		Rp Triliun	1,05	1,05	1,24	4,26	7,29					
	19	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Weda Bay		Rp Triliun	349,49	352,65	355,38	357,52	359,67					
	20	Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Takalar		triliun rupiah	(tahap persiapan)	0,24	0,30	0,35	0,41					
	21	Jumlah KI Prioritas yang Operasional		KI (Kumulatif)	1	2	3	4	5					
	22	Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan		Kawasan Industri	5	5	5	5	5					
	23	Kawasan Industri (KI) tertentu yang dikembangkan		Kawasan Industri (Kumulatif)	3	3	4	4	5					

[illegible]

[illegible]

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Professional													
	1	Persentase peningkatan perusahaan jasa industri yang meningkat kapabilitasnya		Persen	7,5	10	12,5	15	20					
	2	Rekomendasi kebijakan terkait jasa industri yang telah dimanfaatkan stakeholder jasa industri		Rekomendasi Kebijakan	2	3	4	5	6					
	3	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)		Persen	87,19	88,00	85,34	86,08	87,04					
	4	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)		Nilai	29,04	30,79	32,83	34,75	37,04					
SK4	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri													
	1	Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Indeks	3	3	4	4	4					
	2	Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri		Hasil Layanan	5.578,54	5.721,17	5.872,71	6.017,21	6.193,38					
	3	Nilai Revenue on Asset (RoA)		Persen	12,02	12,52	12,87	13,35	13,77					
	4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)		Persen	63,57	68,5	71,48	75,08	77,32					
Kegiatan Pengembangan Industri Hijau (6078)			Pusat							8.400.000	17.700.000	24.000.000	26.000.000	32.400.000
SK1	Meningkatnya Sertifikasi Industri Hijau (SIH)													
	1	Jumlah Rancangan Standar Industri Hijau (RSIH) yang mencapai konsensus		RSIH	2	5	5	7	8					
	2	Persentase ruang lingkup SIH yang dimiliki LSIH terhadap jumlah penetapan SIH yang ditetapkan		Persen	100	100	100	100	100					
SK2	Terwujudnya Praktik Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular yang Diterapkan di Sektor Industri													
	1	Persentase Peningkatan Perusahaan Industri Yang Tersertifikasi Penerapan Industri Hijau		Persen	25	25	30	30	35					
	2	Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri		Persen	11	12	13	14	15					
	3	Jumlah rekomendasi kebijakan penguatan industri hijau		Rekomendasi Kebijakan	44	53	62	71	80					
Kegiatan Pengembangan Standar Industri (6079)			Pusat							10.000.000	18.300.000	20.500.000	23.100.000	25.200.000

[illegible]

[illegible]

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	1	Tingkat partisipasi produk otomotif termasuk <i>Electric Vehicle</i> (EV) Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global		Persen	23,00	25,00	28,00	33,00	36,00					
Program Dukungan Manajemen			Pusat							1.657.309.521	1.940.184.101	2.019.529.072	2.125.220.788	2.215.647.528
SP71	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Ditjen Agro		Pusat							38.450.002	55.876.000	57.520.000	64.850.000	71.880.000
	1	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Industri Agro		Nilai	79,50	83,50	83,55	83,60	83,65					
	2	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Agro		Indeks	83,14	83,15	83,16	83,17	83,18					
	3	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro		Indeks	94,75	94,76	94,77	94,78	94,79					
	4	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Agro		Nilai	91,76	91,77	91,78	91,79	91,80					
	5	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Direktorat Jenderal Industri Agro		Nilai	93,52	93,54	93,56	93,58	93,60					
	6	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Kesiapan Statistik Sektoral Direktorat Jenderal Industri Agro		Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
	7	Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada Direktorat Jenderal Industri Agro		Persen	93,59	93,60	93,61	93,62	93,63					
	8	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Industri Agro		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
	9	Persentase pemberitaan positif sektor industri agro di media massa		Persen	94,20	94,25	94,30	94,35	94,40					
	10	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN		Persen	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00					
	11	Tingkat kepuasan pegawai atas ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana		Persen	85,30	85,35	85,40	85,45	85,50					
	12	Tersedianya SOP yang up to date dan relevan		Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
SP72	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Ditjen IKFT		Pusat							48.265.000	83.953.815	86.453.815	86.453.815	86.453.815
	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja		Nilai	79,50	79,65	79,75	79,85	80,00					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil												
	2	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Indeks	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70					
	3	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Indeks	94,00	94,25	94,50	94,75	95,00					
	4	Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Persen	91,00	91,25	91,50	91,75	92,00					
	5	Nilai Hasil Pengawasan Unit Kearsipan		Nilai	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00					
	6	Tingkat Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektoral Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Nilai	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
	7	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah Ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
	8	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Nilai	86,75	87,25	87,75	88,25	88,75					
SP73	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Ditjen ILMATE		Pusat							49.211.312	104.618.622	111.629.066	131.850.000	147.800.000
	1	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal ILMATE		Indeks	93,4	93,4	94,00	94,00	94,5					
	2	Penilaian dan Analisis Keuangan Direktorat Jenderal ILMATE		Nilai	75,00	75,25	75,5	75,75	76,00					
	3	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Direktorat Jenderal ILMATE		Nilai	70,1	73,00	76,00	79,00	82,00					
	4	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker di lingkungan Ditjen ILMATE		Persen	50,00	52,00	55,00	57,00	60,00					
	5	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal ILMATE		Nilai	79,45	79,45	79,70	79,70	80,00					
	6	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal ILMATE		Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	7	Tingkat Peningkatan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika		Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
	8	Usulan Program Legislasi Ditjen ILMATE yang telah masuk dalam/selesai tahap harmonisasi		Legislasi	2	2	2	2	2					
	9	Persentase penggunaan produk dalam negeri dengan pengadaan barang dan/atau jasa pada Ditjen ILMATE		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
SP74	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima		Pusat							84.564.438	137.404.021	138.004.021	141.404.021	141.404.021
	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka		Nilai	79,45	79,45	79,70	79,70	80,00					
	2	Rata-rata indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka		Nilai	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Unit Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka		Nilai	93,4	93,4	94,00	94,00	94,5					
	4	Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap total aset lancar Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka		Persen	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00					
	5	Nilai hasil pengawasan kearsipan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka		Nilai	70,1	73,00	76,00	79,00	82,00					
	6	Tingkat Penerapan SPBE dan Statistik Sektorl Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka		Nilai	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
	7	Efektivitas layanan kehumasan pemberitaan sektor IKM		Persen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00					
	8	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	9	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
	10	Efektivitas regulasi di Ditjen IKMA		Persen	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00					
	11	Persentase SOP yang direviu dan		Persen	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		ditindaklanjuti dalam rangka penguatan organisasi dan tata laksana di lingkungan Ditjen IKMA												
	12	Tingkat kepuasan pegawai atas ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana		Nilai	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00					
	13	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	75,00	75,25	75,5	75,75	76,00					
SP75	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi pada Layanan Prima Ditjen KPAII		Pusat							57.970.000	85.683.500	100.747.000	115.771.175	133.044.852
	1	Nilai SAKIP Ditjen KPAII		Nilai	79,45	79,45	79,70	79,70	80,00					
	2	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen KPAII		Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	3	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran		Indeks	93,4	93,4	94,00	94,00	94,5					
	4	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan		Nilai	70,1	73,00	76,00	79,00	82,00					
	5	Tingkat Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektoral		Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
	6	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Ditjen KPAII		Persen	85,00	85,5	86,00	86,5	87,00					
	7	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti oleh Satker di Lingkungan Ditjen KPAII		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
	8	Efektivitas Regulasi yang Diinisiasi oleh Ditjen KPAII		Persen	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00					
	9	Jumlah Kebijakan Industri yang Efektif		Peraturan (kumulatif)	11	12	13	14	15					
	10	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Ditjen KPAII		Nilai	86,00	86,25	86,5	86,75	87,00					
SP76	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada BSKJI		Pusat							505.884.083	558.820.098	580.866.978	602.018.948	630.891.934
	1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		Persen	81,00	81,00	81,00	82,00	82,00					
	2	Indeks Profesionalitas ASN		Persen	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	3	Persentase jenis layanan di seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		Persen	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00					
	4	Indeks Manfaat Kerja Sama		Indeks	4,1	4,1	4,1	4,12	4,12					
	5	Persentase satker yang memperoleh Indeks Pelayanan		Persen	41,00	50,00	58,00	66,00	75,00					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Publik Minimal A												
	6	Tingkat Penerapan SPBE & Kesiapan Statistik Sektoral		Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
	7	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh seluruh Satker BSKJI		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
	8	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan		Nilai	70,1	73,00	76,00	79,00	82,00					
	9	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI		Nilai	79,45	79,45	79,70	79,70	80,00					
	10	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		Nilai	93,4	93,4	94,00	94,00	94,5					
	11	Penilaian dan analisis laporan keuangan		Nilai	86,00	86,25	86,5	86,75	87,00					
SP77	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima pada BPSDMI		Pusat							564.536.728	585.600.848	590.000.000	600.780.000	607.000.000
	1	Nilai SAKIP BPSDMI		Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80,00					
	2	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan BPSDMI		Nilai	86,00	86,25	86,5	86,75	87,00					
	3	Indeks Profesional ASN pada BPSDMI		Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	4	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada BPSDMI		Indeks	93,4	93,4	94,00	94,00	94,5					
	5	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada BPSDMI		Nilai	70,1	73,00	76,00	79,00	82,00					
	6	Tingkat Penerapan SPBE & Kesiapan Statistik Sektoral pada BPSDMI		Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
	7	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh BPSDMI		Persen	60,00	62,00	64,00	68,00	70,00					
	8	Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pada BPSDMI		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
SP78	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Itjen		Pusat							44.260.223	51.460.992	52.908.113	54.479.958	56.057.862
	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Kementerian Perindustrian		Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30					
	2	Pemantauan Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Internal (audit) oleh Satuan Kerja												
	3	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian		Persen	13,2	20,00	30,00	40,00	50,00					
	4	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal		Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80,00					
	5	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal		Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	6	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal		Indeks	93,4	93,4	94,00	94,00	94,5					
	7	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal		Nilai	70,1	73,00	76,00	79,00	82,00					
	8	Tingkat Kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal		Persen	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00					
	9	Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal		Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
	10	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	11	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal		Nilai	86,00	86,25	86,5	86,75	87,00					
SP79	Terwujudnya Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian yang Efektif		Pusat							253.322.002	261.920.981	285.611.748	310.793.490	322.676.581
	1	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi		Persen	100	100	100	100	100					
	2	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Kinerja Pegawai		Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	3	Nilai SAKIP		Nilai	79,45	79,45	79,70	79,70	80,00					
	4	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional		Indeks	94,80	94,80	94,85	94,85	95,00					
	5	Indeks Sistem Merit		Nilai	330,50	330,50	331,00	331,00	331,00					
	6	Indeks Profesionalitas ASN		Indeks	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70					
	7	Indeks Berakhlak		Persen	67,25	67,25	68,00	68,00	69,00					
	8	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran		Indeks	93,40	93,40	94,00	94,00	94,50					
	9	Tingkat Akuntabilitas Keuangan		Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP					
	10	Tingkat Maturitas SPIP		Indeks	3,70	3,70	3,75	3,75	3,80					
	11	Indeks Pengelolaan Aset		Indeks	3,80	3,80	3,80	3,80	3,90					
	12	Indeks Tata Kelola Pengadaan		Indeks	86,45	86,45	87,19	87,19	87,20					
	13	Indeks Reformasi Hukum		Indeks	98,80	98,80	98,80	98,80	98,80					
	14	Indeks Kualitas Kebijakan		Indeks	66,00	66,00	67,00	67,00	68,00					
	15	Indeks Pelayanan Publik		Indeks	4,55	4,55	4,60	4,60	4,70					
	16	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik		Nilai	87,30	87,30	87,60	87,60	88,10					

[illegible]

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	1	Persentase kesesuaian jumlah peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian yang ditetapkan dengan program penyusunan peraturan perundang-undangan		Persen	68,00	69,00	70,00	71,00	72,00					
	2	Nilai pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)		Nilai	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00					
SK3	Terwujudnya perlindungan hukum terhadap institusi yang optimal													
	1	Persentase kesesuaian jumlah perkara hukum yang ditangani dengan yang dimohonkan		Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
SK4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Biro Hukum													
	1	Indeks Profesionalitas ASN		Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
	3	Nilai hasil pengawasan kearsipan		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
	4	Tingkat penerapan SPBE		Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
	5	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti		Persen	50,00	52,00	55,00	57,00	60,00					
	6	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Umum dan Protokolera serta Sarana dan Prasarana Perkantoran (1825)			Pusat							121.307.021	113.781.559	124.435.000	138.440.000	138.485.000
SK1	Terwujudnya layanan umum yang efektif, efisien, dan akuntabel													
	1	Indeks Pengelolaan Administrasi dan Agenda Pimpinan		Indeks	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8					
	2	Tingkat Kepuasan Pasien Klinik Utama Kementerian Perindustrian		Persen	76,61	77,61	78,61	79,61	80,61					
	3	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Perpustakaan		Indeks	3,4	3,42	3,44	3,48	3,5					
SK2	Terwujudnya layanan pengadaan yang efektif, efisien, dan transparan													
	1	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian Perindustrian		Nilai	87,00	87,00	87,19	87,19	87,20					
	2	Tingkat Kepuasan Layanan Pengadaan		Persen	91,50	91,6	91,7	91,8	91,9					
SK3	Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai													
	1	Nilai Intensitas Konsumsi Energi		Indeks	72,00	71,00	70,00	69,00	68,00					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		(IKE) Gedung Kantor Pusat Kementerian												
	2	Laporan terhadap kerusakan gedung dan utilitas gedung yang dilaporkan melalui aplikasi e-komplain ditindaklanjuti hingga selesai		Persen	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00					
	3	Indeks pengelolaan gedung IMC yang sesuai dengan standar Bangunan Gedung Hijau (BGH)		Indeks	133,00	134,00	135,00	136,00	137,00					
SK4	Terwujudnya pengelolaan layanan administrasi yang modern dan akuntabel													
	1	Tingkat Digitalisasi Arsip Kementerian Perindustrian		Nilai	95,00	95,00	95,00	95,00	95,10					
	2	Nilai hasil pengawasan kearsipan Kementerian Perindustrian		Nilai	70,10	73,00	76,00	79,00	82,00					
	3	Nilai hasil pengawasan kearsipan internal Sekretariat Jenderal		Nilai	70,1	73,00	76,00	79,00	82,00					
SK5	Terwujudnya peningkatan tata kelola organisasi Biro Umum													
	1	Nilai SAKIP Biro Umum		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,50					
	2	Nilai hasil pengawasan kearsipan internal Biro Umum		Nilai	95,29	95,3	95,3	95,4	95,5					
	3	Tingkat Penerapan SPBE		Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
	4	Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa di Biro Umum		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	5	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Biro Umum		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
Kegiatan Pengelolaan Organisasi, SDM, dan Reformasi Birokrasi (1826)			Pusat							10.563.034	10.037.863	11.541.012	13.164.089	15.098.601
SK1	Terwujudnya ASN yang Kompeten dan Berintegritas													
	1	Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN Kementerian Perindustrian		Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	2	Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal		Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	3	Indeks Sistem Merit Kementerian Perindustrian		Skor	330,5	330,5	331,00	331,00	332,00					
	4	Indeks Ber-AKHLAK		Persen	68,00	68,5	69,00	69,5	70,00					
SK2	Terwujudnya Organisasi dan Tata Laksana yang Tepat Fungsi, Tepat Proses, dan Tepat Ukuran													
	1	Persentase Penyederhanaan		Persen	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00					

[illegible]

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Pengelolaan BMN Kementerian Perindustrian													
	1	Indeks Pengelolaan Aset		Indeks	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80					
SK4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Biro Keuangan													
	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Keuangan		Nilai	79,50	79,60	79,70	79,80	79,90					
	2	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Telah Ditindaklanjuti		Persen	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00					
	3	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan		Nilai	71,60	71,65	71,70	71,75	71,80					
	4	Tingkat Penerapan SPBE		Persen	90,00	90,10	90,20	90,30	90,40					
	5	Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan		Indeks	81,30	81,31	81,32	81,33	81,34					
Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (1828)			Pusat							9.304.999	9.018.418	10.070.400	11.449.468	12.024.223
SK1	Terwujudnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja													
	1	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional		Indeks	94,8	94,8	94,85	94,85	95,00					
	2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Perindustrian		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
SK2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan													
	1	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Layanan Koordinasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Industri Lintas Sektor Dan Daerah		Skala (1-5)	4,25	4,30	4,40	4,45	4,50					
	2	Persentase Penyiapan Bahan Pimpinan Sesuai Dengan Topik dan Tepat Waktu		Persen	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5					
	3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Jenderal		Nilai	81,00	81,5	82,00	82,5	83,00					
SK3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Manajemen Internal													
	1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan		Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perencanaan		Nilai	80,9	81,25	81,5	81,75	82,00					
	3	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan		Nilai	91,00	91,25	91,5	92,00	92,5					
	4	Tingkat Penerapan Sistem		Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Pemerintahan Berbasis Elektronik Biro Perencanaan												
	5	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang dan/atau Jasa Biro Perencanaan		Persen	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00					
	6	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Pada Biro Perencanaan yang Telah Ditindaklanjuti		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi (1829)			Pusat							14.138.329	16.206.122	18.891.310	20.788.140	22.859.456
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Manajemen Internal													
	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pusdatin		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,45					
	2	Indeks Profesionalitas ASN		Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	3	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran		Indeks	92,7	92,71	92,72	92,73	92,74					
	4	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
	5	Indeks SPBE Kementerian Perindustrian		Indeks	3,50	3,50	3,60	3,60	3,65					
	6	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/atau di Pusdatin		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	7	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti oleh Pudatin		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
	8	Indeks Pembangunan Statistik Kementerian Perindustrian		Indeks	3,04	3,05	3,06	3,07	3,08					
Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (1831)			Pusat							11.485.037	15.004.258	17.369.026	19.286.793	21.835.951
SK1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian													
	1	Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian		Indeks	4,58	4,58	4,60	4,60	4,65					
	2	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian		Nilai	87,30	87,30	87,40	87,40	87,50					
	3	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian		Indeks	91,50	91,50	91,50	91,50	91,70					
	4	Tingkat kepuasan fasilitasi hubungan kelembagaan		Indeks	3,25	3,26	3,27	3,28	3,29					
	5	Tingkat Interaksi (Engagement rate) akun media sosial Kemenperin dengan Masyarakat		Persen	4,15	4,17	4,19	4,21	4,25					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	6	Persentase pemberitaan positif sektor industri di media massa		Persen	99,25	99,30	99,35	99,40	99,45					
	7	Persentase rekomendasi strategi komunikasi yang ditindaklanjuti		Persen	86,3	86,4	86,5	86,7	86,8					
	8	Persentase kehadiran undangan media massa dalam peliputan pimpinan Kemenperin		Persen	90,00	90,5	91,00	91,5	92,00					
SK2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Manajemen Internal													
	1	Rata-Rata Nilai Indeks Profesionalitas ASN Biro Humas		Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	2	Nilai SAKIP Biro Humas		Nilai	80,71	80,72	80,73	80,74	80,75					
	3	Nilai Pengawasan Kearsipan		Nilai	87,00	87,1	87,2	87,3	87,4					
	4	Tingkat Penerapan SPBE		Persen	80,00	80,1	80,2	80,3	80,4					
	5	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal pada Biro Humas yang telah ditindaklanjuti		Persen	50,00	50,1	50,2	50,3	50,4					
	6	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah di Biro Hubungan Masyarakat		Persen	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00					
Kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/ Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I (1841)			Pusat							2.500.000	3.499.999	3.604.999	3.713.150	3.824.542
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan													
	1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30					
	2	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat I		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
SK2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik													
	1	Nilai SAKIP Inspektorat I		Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80,00					
	2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat I		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat I Yang Akuntabel dan Berkualitas													
	1	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat I		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
Kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi,			Pusat							2.500.000	3.502.048	3.609.260	3.719.796	3.833.761

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/ Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II (1842)														
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan													
	1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II		Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30					
	2	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat II		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
SK2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik													
	1	Nilai SAKIP Inspektorat II		Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80,00					
	2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat II		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat II Yang Akuntabel dan Berkualitas													
	1	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat II		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
Kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/ Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III (1843)			Pusat							2.500.000	3.500.000	3.605.001	3.713.151	3.824.545
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan													
	1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III		Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30					
	2	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat III		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
SK2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik													
	1	Nilai SAKIP Inspektorat III		Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80,00					
	2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat III		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat III Yang Akuntabel dan Berkualitas													
	1	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat III		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
Kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi,			Pusat							2.500.000	3.500.000	3.605.000	3.713.151	3.824.544

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/ Kegiatan Kementerian Perindsutrian Cakupan Tugas Inspektorat IV (1844)														
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan													
	1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV		Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30					
	2	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat IV		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
SK2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik													
	1	Nilai SAKIP Inspektorat IV		Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80,00					
	2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat IV		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat IV Yang Akuntabel dan Berkualitas													
	1	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat IV		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (4905)			Pusat							9.345.922	13.160.000	14.260.000	14.840.000	15.228.350
SK1	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kinerja													
	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
	2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
	3	Tingkat Penerapan SPBE		Nilai	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
	4	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti		Nilai	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal (6036)			Pusat							34.260.223	37.229.169	38.247.184	39.376.941	40.499.388
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan													
	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Kementerian Perindustrian		Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30					
	2	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
	3	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas		Persen	13,2	20,00	30,00	40,00	50,00					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Kementerian Perindustrian												
SK2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik													
	1	Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal		Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80,00					
	2	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal		Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	3	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
	4	Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal		Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas													
	1	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal		Indeks	93,4	93,4	94,00	94,00	95,00					
	2	Tingkat Kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal		Persen	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00					
	3	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Sekretariat Inspektorat Jenderal		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	4	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal		Nilai	86,00	86,25	86,5	86,75	87,00					
Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Agro (6037)			Pusat							38.450.002	55.876.000	57.520.000	64.850.000	71.880.000
SK1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro													
	1	Nilai SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro		Nilai	79,50	79,55	79,60	79,65	79,70					
	2	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Agro		Indeks	83,14	83,15	83,16	83,17	83,18					
	3	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro		Indeks	94,75	94,76	94,77	94,78	94,79					
	4	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Agro		Nilai	91,76	91,77	91,78	91,79	91,80					
	5	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro		Nilai	93,06	93,08	93,10	93,12	93,14					
	6	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		(SPBE) dan Kesiapan Statistik Sektoral Direktorat Jenderal Industri Agro												
	7	Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro		Persen	93,59	93,60	93,61	93,62	93,63					
	8	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
	9	Persentase pemberitaan positif sektor industri agro di media massa		Persen	94,20	94,25	94,30	94,35	94,40					
	10	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN		Persen	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00					
	11	Tingkat kepuasan pegawai atas ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana		Persen	85,30	85,35	85,40	85,45	85,50					
	12	Tersedianya SOP yang up to date dan relevan		Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (6038)			Pusat							48.265.000	83.953.815	86.453.815	86.453.815	86.453.815
SK1	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Industri Kimia Hulu yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima													
	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Kimia Hulu		Nilai	79,50	79,75	80,00	80,25	80,50					
SK2	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima													
	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi		Nilai	79,50	79,75	80,00	80,25	80,50					
SK3	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima													
	1	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Industri Tekstil, Kulit dan Alas		Nilai	79,50	79,75	80,00	80,25	80,50					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Kaki yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima												
SK4	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima													
	1	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima		Nilai	79,50	79,75	80,00	80,25	80,50					
SK5	Terwujudnya Birokrasi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima													
	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Nilai	79,5	79,75	80,00	80,25	80,5					
	2	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Indeks	81,3	81,55	81,8	82,05	82,3					
	3	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Indeks	94,00	94,25	94,50	94,75	95,00					
	4	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Unit Pengolah Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Nilai	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00					
	5	Tingkat Penerapan SPBE Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Nilai	80,00	80,25	80,5	80,75	81,00					
	6	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
	7	Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan		Persen	93,00	93,5	94,00	94,5	95,00					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Jasa Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil												
	8	Persentase Nilai Pengelolaan BMN terhadap Penetapan Status Penggunaan BMN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Persen	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00					
	9	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Nilai	86,00	86,25	86,5	86,75	87,00					
SK6	Terfasilitasinya Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil dalam rangka Penguatan Iklim Usaha, Peningkatan Akses Pasar, dan Penyebarluasan Informasi													
	1	Efektifitas Regulasi Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Indeks	82,5	83,00	83,5	84,00	84,5					
	2	Tingkat Partisipasi pada Kerjasama Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Persen	96,5	97,00	97,5	98,00	98,5					
	3	Isu Aktual/Strategis Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang difasilitasi oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Rekomendasi	2	2	2	2	2					
	4	Tingkat Interaksi (Engagement Rate) Akun Media Sosial Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Nilai	4,05	4,1	4,15	4,2	4,25					
Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (6039)			Pusat							49.211.312	104.618.622	111.629.066	131.850.000	147.800.000
SK1	Terwujudnya Birokrasi dan Tata Kelola Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang baik													
	1	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika		Indeks	93,4	93,4	93,5	93,5	93,6					
	2	Penilaian dan Analisis Keuangan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika		Nilai	75,00	75,25	75,50	75,75	76,00					
	3	Indeks Hasil Pengawasan		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		kearsipan Sekretariat Direktorat Jenderal ILMATE												
	4	Indeks Hasil Pengawasan kearsipan Direktorat Industri Logam		Persen	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
	5	Indeks Hasil Pengawasan kearsipan Dit. IET		Persen	60,1	63,00	65,00	67,00	72,00					
	6	Indeks Hasil Pengawasan kearsipan Dit. IPAMP		Persen	60,1	63,00	65,00	67,00	72,00					
	7	Indeks Hasil Pengawasan kearsipan Dit. IMATAP		Persen	60,1	63,00	65,00	67,00	72,00					
	8	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker di lingkungan Ditjen ILMATE		Persen	50,00	52,00	55,00	57,00	60,00					
	9	Nilai SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal ILMATE		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
	10	Nilai SAKIP Direktorat Industri Logam		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,50					
	11	Nilai SAKIP Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
	12	Nilai SAKIP Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,50					
	13	Nilai SAKIP Direktorat Industri Elektronika dan Telematika		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,50					
	14	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal ILMATE		Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	15	Tingkat Peningkatan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika		Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
	16	Persentase penggunaan produk dalam negeri dengan pengadaan barang dan/atau jasa pada Setditjen ILMATE		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	17	Persentase penggunaan produk dalam negeri dengan pengadaan barang dan/atau jasa pada Dit. Industri Logam		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	18	Persentase penggunaan produk dalam negeri dengan pengadaan barang dan/atau jasa pada Dit. IET		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	19	Persentase penggunaan produk dalam negeri dengan pengadaan		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		barang dan/atau jasa pada Dit. IPAMP												
	20	Persentase penggunaan produk dalam negeri dengan pengadaan barang dan/atau jasa pada Dit. IMATAP		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
SK2	Terfasilitasinya Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dalam rangka Penguatan Iklim Usaha dan Akses Pasar													
	1	Realisasi industri yang menggunakan fasilitas insentif Pemerintah		Jumlah Perusahaan	6,00	6,00	8,00	8,00	19,00					
	2	Tersusunnya usulan posisi kerja sama Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dan harmonisasi Tarif		Jumlah Usulan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00					
	3	Usulan Program Legislasi Ditjen ILMATE yang telah masuk dalam/selesai tahap harmonisasi		Legislasi	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00					
Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka (6040)			Pusat							84.564.438	137.404.021	138.004.021	141.404.021	141.404.021
SK1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka													
	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
	2	Rata-rata indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka		Nilai	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Unit Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka		Nilai	93,4	93,4	93,5	93,5	93,6					
	4	Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap total aset lancar Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka		Nilai	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00					
	5	Nilai hasil pengawasan kearsipan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
	6	Tingkat Penerapan SPBE dan		Nilai	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Statistik Sektorat Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka												
	7	Efektivitas layanan kehumasan pemberitaan sektor IKM		Persen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00					
	8	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	9	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
	10	Efektivitas regulasi di Ditjen IKMA		Persen	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00					
	11	Persentase SOP yang direviu dan ditindaklanjuti dalam rangka penguatan organisasi dan tata laksana di lingkungan Ditjen IKMA		Persen	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00					
	12	Tingkat kepuasan pegawai atas ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana		Nilai	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00					
	13	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	75,00	75,25	75,5	75,75	76,00					
	14	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat IKM Pangan Furnitur dan Bahan Bangunan		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
	15	Nilai hasil pengawasan kearsipan Direktorat IKM Pangan Furnitur dan Bahan Bangunan		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
	16	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Direktorat IKM Pangan Furnitur dan Bahan Bangunan		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	17	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
	18	Nilai hasil pengawasan kearsipan Direktorat IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
	19	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Direktorat IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	20	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut												
	21	Nilai hasil pengawasan kearsipan Direktorat IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
	22	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Direktorat IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	23	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Aneka		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
	24	Nilai hasil pengawasan kearsipan Direktorat Aneka		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
	25	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Direktorat Aneka		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
SK2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia													
	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,45					
	2	Rata-rata indeks Profesionalitas ASN Satker Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia		Nilai	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia		Nilai	93,4	93,4	93,5	93,5	93,6					
	4	Nilai hasil pengawasan kearsipan Satker Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia		Nilai	70,1	73,00	76,00	79,00	82,00					
	5	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	6	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	75,00	75,25	75,5	75,75	76,00					
	7	Tingkat Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral Balai		Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia												
SK3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya													
	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,45					
	2	Rata-rata indeks Profesionalitas ASN Satker Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya		Nilai	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya		Nilai	93,4	93,4	93,5	93,5	93,6					
	4	Nilai hasil pengawasan kearsipan Satker Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya		Nilai	70,1	73,00	76,00	79,00	82,00					
	5	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
	6	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	75,00	75,25	75,5	75,75	76,00					
	7	Tingkat Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya		Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (6041)			Pusat							57.970.000	85.683.500	100.747.000	115.771.175	133.044.852
SK1	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi pada Layanan Prima Set Ditjen KPAII													
	1	Nilai SAKIP		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
	2	Indeks Profesionalitas ASN		Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	3	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran		Indeks	93,4	93,4	93,5	93,5	93,6					
	4	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
	5	Tingkat Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektoral		Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
	6	Persentase Penggunaan Produk		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					

[illegible]

[illegible]

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Pelayanan Publik													
	1	Persentase Jenis Layanan yang Datanya Terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI		Persen	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00					
	2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)		Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
	3	Indeks Pelayanan Publik		Indeks	4,13	4,16	4,19	4,22	4,25					
	4	Indeks Manfaat Kerja Sama		Indeks	4,1	4,1	4,1	4,12	4,12					
	5	Satker yang memperoleh Indeks Pelayanan publik minimal A		Persen	41,00	50,00	58,00	66,00	75,00					
SK4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien													
	1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00					
	2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan		Nilai	70,1	73,00	76,00	79,00	82,00					
SK5	Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi													
	1	Nilai Minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
	2	Nilai Minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	93,4	93,4	93,5	93,5	93,6					
	3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	86,00	86,25	86,50	86,75	87,00					
Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (6043)			Pusat							564.536.728	585.600.848	590.000.000	600.780.000	607.000.000
SK1	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima di lingkungan BPSDMI													
	1	Nilai SAKIP		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
	2	Nilai Laporan Keuangan		Nilai	86,00	86,25	86,5	86,75	87,00					
	3	Nilai Profesional ASN		Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7					
	4	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran		Indeks	93,4	93,4	93,5	93,5	93,6					
	5	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan		Nilai	70,1	73,00	76,00	79,00	82,00					
	6	Tingkat Penerapan SPBE & Kesiapan Statistik Sektoral		Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
	7	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker di lingkungan Kementerian Perindustrian		Persen	60,00	62,00	64,00	68,00	70,00					
	8	Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET						ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah												
Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Industri Produk Halal (6561)			Pusat							8.262.673	9.035.000	10.140.000	10.920.000	11.350.000
SK1	Meningkatnya Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri													
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di PPIH		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					
SK2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan serta Evaluasi Kinerja													
	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PIH		Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,5					
SK3	Terwujudnya tata kelola keuangan, BMN, Sarana dan Prasarana PIH yang efektif dan efisien													
	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		Nilai	50,00	52,00	55,00	57,00	60,00					
SK4	Tersedianya Data dan Informasi Publik yang berkualitas													
	1	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan PIH		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					
	2	Tingkat Penerapan SPBE		Indeks	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00					
Kegiatan Peningkatan Kompetensi ASN (6893)			Pusat							10.845.733	11.575.000	12.420.000	13.350.000	14.865.000
SK1	Terfasilitasinya ASN Bidang Industri yang Professional dan Berkepribadian Melalui Unit Pendidikan dan Pelatihan Aparatur													
	1	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik		Persen	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00					
	2	Tingkat kepuasan layanan pembinaan jabatan fungsional bidang industri		Persen	80,00	85,00	90,00	92,00	95,00					
Kegiatan Pengawasan Efektifitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Investigatif terhadap Kegiatan Kementerian Perindustrian (7886)			Pusat							0	3.500.000	3.605.000	3.713.150	3.824.545
SK1	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik													
	1	Nilai SAKIP Inspektorat Investigasi		Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80,00					
	2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Investigasi		Nilai	60,1	63,00	66,00	69,00	72,00					

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
SK2	Organisasi Fit for purpose													
	1	Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian Yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)		Persen	95,00	96,00	97,00	99,00	100,00					
	2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi		Persen	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00					
	3	Persentase atas temuan ADTT yang Ditindaklanjuti		Persen	80,00	80,25	80,45	80,6	81,00					
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Investigasi Yang Akuntabel dan Berkualitas													
	1	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Investigasi		Persen	91,00	91,3	91,5	91,7	92,00					

B. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Sumber Pendanaan Lainnya Yang Sah Terhadap Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Kementerian Perindustrian 2025-2029

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
02.13.01-Industri Halal dan UMKM Halal	01 - Presentase Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk Halal		4,46	5,19	6,23	6,69	7,00	Persen	6.000	21.580	23.950	26.750	29.000	-	-	-	-	-	6.000	21.580	23.950	26.750	29.000
02.13.01.05-Penguatan Halal Value Chain									5.500	19.480	21.750	24.450	26.000	-	-	-	-	-	5.500	19.480	21.750	24.450	26.000
EC.6054.PBK.003 - Implementasi Industri Halal Sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam		Ditjen IKFT	-	5	5	5	5	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6699.PEH.002 - Indonesia Halal Industry Award		Setjen	1	1	1	1	1	kegiatan	1.000	4.750	5.000	5.250	6.000	-	-	-	-	-	1.000	4.750	5.000	5.250	6.000
EC.6699.QDI.001 - Fasilitasi dan Pembinaan Industri Halal		Setjen	1.000	5.000	7.000	8.000	10.000	Industri	4.500	12.730	14.750	17.200	18.000	-	-	-	-	-	4.500	12.730	14.750	17.200	18.000
02.13.01.06-Penguatan Promosi Industri Halal									500	2.100	2.200	2.300	3.000	-	-	-	-	-	500	2.100	2.200	2.300	3.000
EC.6699.PEH.001 - Promosi Industri Halal		Setjen	4	4	4	4	5	kegiatan	500	2.100	2.200	2.300	3.000	-	-	-	-	-	500	2.100	2.200	2.300	3.000
02.14.02-Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	03 - Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0		87	103	119	139	156	perusahaan	19.897	58.150	62.150	67.150	71.150	-	-	-	-	-	19.897	58.150	62.150	67.150	71.150
02.14.02.01-Pengembangan Industri dan Perangkat Digital									12.650	39.100	43.100	48.100	52.100	-	-	-	-	-	12.650	39.100	43.100	48.100	52.100
EC.6058.QDI.001 - Pendampingan Implementasi Industri 4.0, Industri Hijau dan Industri Halal sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi		Ditjen IKFT	15	30	30	30	30	Industri	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6058.QDI.002 - Pendampingan Implementasi Industri 4.0 sektor Industri Semen Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam		Ditjen IKFT	10	30	30	30	30	Industri	1.400	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	1.400	10.000	10.000	10.000	10.000
EC.6058.QDI.004 - Pendampingan Implementasi 4.0 Sektor Industri Kimia		Ditjen IKFT	5	6	7	8	9	Industri	1.250	1.500	2.000	2.500	3.000	-	-	-	-	-	1.250	1.500	2.000	2.500	3.000
EC.6058.QDI.005 - Sertifikasi Industri 4.0 Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil		Ditjen IKFT	20	40	40	40	40	Industri	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
EC.6063.QDI.005 - Industri yang Terfasilitasi melalui Pengembangan Pusat Industri Gim dan Animasi Nasional		Ditjen ILMATE	6	2	3	4	5	Industri	2.000	1.000	1.500	2.000	2.500	-	-	-	-	-	2.000	1.000	1.500	2.000	2.500
EC.6070.QDI.001 - Industri Sektor Elektronik yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan		Ditjen ILMATE	4	4	4	4	4	Industri	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EC.6071.PEF.076 - Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri		Ditjen IKMA	-	6	6	6	6	orang	-	1.200	1.200	1.200	1.200	-	-	-	-	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
EC.6071.QDI.075 - Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas Pemanfaatan Insentif dalam rangka Mendukung Akselerasi Implementasi Making Indonesia 4.0 pada Industri		Ditjen IKMA	-	30	30	30	30	Industri	-	1.200	1.200	1.200	1.200	-	-	-	-	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
EC.6071.QDI.076 - Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Aneka		Ditjen IKMA	-	6	6	6	6	Industri	-	1.200	1.200	1.200	1.200	-	-	-	-	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
EC.6077.QDI.003 - Perusahaan Industri yang bertransformasi menuju Industri 4.0		BSKJI	5	10	15	20	25	Industri	2.500	5.000	8.000	12.000	15.000	-	-	-	-	-	2.500	5.000	8.000	12.000	15.000

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
02.14.02.02- Penguatan Pengembangan Ekonomi Digital UMKM									7.247	19.050	19.050	19.050	19.050	-	-	-	-	-	7.247	19.050	19.050	19.050	19.050
EC.6071.QDI.012 - IKM PPBB yang Mendapatkan Fasilitasi Esmart IKM / Literasi Digital		Ditjen IKMA	500	500	500	500	500	Industri	750	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	750	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6071.QDI.017 - IKM KSK yang Mendapatkan Fasilitasi Esmart IKM / Literasi Digital		Ditjen IKMA	350	503	503	503	503	Industri	525	1.600	1.600	1.600	1.600	-	-	-	-	-	525	1.600	1.600	1.600	1.600
EC.6071.QDI.023 - Penerapan <i>Making Indonesia</i> 4.0 pada IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut		Ditjen IKMA	814	1.000	1.000	1.000	1.000	Industri	1.220	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	1.220	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6071.QDI.028 - Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Rangka Penerapan <i>Making Indonesia</i> 4.0		Ditjen IKMA	107	163	163	163	163	Industri	4.752	7.250	7.250	7.250	7.250	-	-	-	-	-	4.752	7.250	7.250	7.250	7.250
EC.6071.QDI.042 - IKM Pangan Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Fasilitasi Implementasi 4.0		Ditjen IKMA	-	3	3	3	3	Industri	-	600	600	600	600	-	-	-	-	-	-	600	600	600	600
EC.6071.QDI.054 - IKM Kimia, Sandang dan Kerajinan yang Mendapatkan		Ditjen IKMA	-	3	3	3	3	Industri	-	600	600	600	600	-	-	-	-	-	-	600	600	600	600
EC.6071.QDI.063 - IKM LMEA yang mendapatkan Fasilitasi Implementasi 4.0		Ditjen IKMA	-	5	5	5	5	Industri	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6071.QDI.064 - Penumbuhan dan Pengembangan IKM <i>Startup</i> Berbasis Teknologi		Ditjen IKMA	-	20	20	20	20	Industri	-	4.000	4.000	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
02.15.01- Penerapan Efisiensi Sumber Daya dan Peningkatan Daur Ulang	01 - Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau		152	164	176	188	200	Persen	8.642	15.100	21.400	24.400	29.800	-	-	-	-	-	8.642	15.100	21.400	24.400	29.800

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	02 - Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri		11	12	13	14	15	Persen															
02.15.01.01- Pengembangan Kapasitas Industri Manufaktur dalam Penerapan Ekonomi Sirkular									4.942	6.400	9.600	11.000	12.400	-	-	-	-	-	4.942	6.400	9.600	11.000	12.400
EC.6053.PBK.003 - Pemanfaatan Teknologi Recycling Plastik Daur Ulang		Ditjen IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	742	800	800	800	800	-	-	-	-	-	742	800	800	800	800
EC.6053.PBK.012 - Kajian Pemanfaatan Teknologi Material Recovery Daur Ulang Pelumas Bekas		Ditjen IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	559	600	600	600	600	-	-	-	-	-	559	600	600	600	600
EC.6054.QDI.001 - Pendampingan Persiapan Penerapan Pedoman Tata Cara PET Daur Ulang Untuk Kemasan Pangan dan/atau Ban Vulkanisir Ban Komersial		Ditjen IKFT	5	10	10	10	10	Industri	941	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	941	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6062.QDI.019 - Industri Remanufaktur yang Terfasilitasi dalam rangka Ekonomi Sirkular Industri		Ditjen ILMATE	-	-	2	3	3	Industri	-	-	2.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	2.000	3.000	3.000
EC.6078.PBK.003 - Kebijakan Penerapan Ekonomi Sirkuler di Sektor Industri		BSKJI	1	1	2	2	3	Rekomendasi Kebijakan	1.000	1.000	2.000	2.000	3.000	-	-	-	-	-	1.000	1.000	2.000	2.000	3.000
EC.6078.QDI.001 - Perusahaan Industri yang terfasilitasi Sertifikasi Industri Hijau		BSKJI	5	7	9	10	11	Industri	1.700	2.000	2.200	2.600	3.000	-	-	-	-	-	1.700	2.000	2.200	2.600	3.000
02.15.01.02- Penerapan Industri Hijau									3.700	8.700	11.800	13.400	17.400	-	-	-	-	-	3.700	8.700	11.800	13.400	17.400
EC.6078.PBK.002 - Kebijakan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di sektor industri		BSKJI	1	2	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan	500	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6078.PEB.001 - Festival Industri Hijau Nasional Tahun 2025		BSKJI	2	2	3	3	4	forum	1.200	1.200	1.800	1.800	2.400	-	-	-	-	-	1.200	1.200	1.800	1.800	2.400
EC.6078.PFA.001 - Rancangan Standar Industri		BSKJI	3	4	5	6	7	NSPK	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	-	-	-	-	-	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6078.QD1.007 - Lembaga jasa Industri dan IKM Hijau yang terfasilitasi		BSKJI	3	15	20	25	35	Industri	1.000	5.000	7.000	8.100	11.000	-	-	-	-	-	1.000	5.000	7.000	8.100	11.000
02.19.04-Peningkatan upaya dekarbonisasi industri	01 - Penurunan emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas		6,75	6,79	6,85	6,90	6,93	juta ton CO2 Eq	2.750	13.000	15.000	15.000	16.000	-	-	-	-	-	2.750	13.000	15.000	15.000	16.000
02.19.04.02-Kebijakan dan capaian aksi mitigasi perubahan iklim di sektor IPPU									2.750	13.000	15.000	15.000	16.000	-	-	-	-	-	2.750	13.000	15.000	15.000	16.000
EC.6053.PBK.002 - Akselerasi Dekarbonisasi Sektor Industri Semen, Keramik dan Kaca Nasional		Ditjen IKFT	-	3	3	3	3	Rekomendasi Kebijakan	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
EC.6053.PBK.005 - Fasilitasi Percepatan Substitusi Bahan Bakar dan Bahan Baku Alternatif Rendah Karbon Bagi Industri Semen		Ditjen IKFT	-	2	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6053.PBK.007 - Rekomendasi Dekarbonisasi Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Dalam Mendukung Net Zero Emission (NZE) 2050		Ditjen IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	750	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	750	3.000	3.000	3.000	3.000
EC.6078.PBK.005 - Percepatan Dekarbonisasi dan Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Industri untuk Pemenuhan Enhanced NDC dan Menuju Net Zero Economy		BSKJI	1	1	2	2	3	Rekomendasi Kebijakan	1.000	1.000	2.000	2.000	3.000	-	-	-	-	-	1.000	1.000	2.000	2.000	3.000
EC.6078.PBK.007 - Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Industri		BSKJI	1	1	1	2	2	Rekomendasi Kebijakan	1.000	5.000	6.000	6.000	6.000	-	-	-	-	-	1.000	5.000	6.000	6.000	6.000

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
02.22.04- Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut	003 - Utilisasi Industri Pengolahan Garam Industri		52,50	55,12	57,87	60,76	63,79	Persen	2.000	16.388	18.000	20.500	22.500						2.000	16.388	18.000	20.500	22.500
	004 - Utilisasi Industri Pengolahan Hasil Laut		45	50	55	60	65	Persen															
02.22.04.01- Pengembangan Garam Industri Terintegrasi									1.000	13.388	15.000	17.000	19.000						1.000	13.388	15.000	17.000	19.000
EC.6057.PBK.001 - Fasilitasi dalam rangka penumbuhan dan pengembangan Industri Garam Industri		Ditjen IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	5.000	6.000	7.000	8.000	-	-	-	-	-	-	5.000	6.000	7.000	8.000
EC.6057.QDI.005 - Verifikasi Penyaluran dan Distribusi Garam Industri ke Industri		Ditjen IKFT	-	100	100	100	100	Industri	-	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
EC.6057.QDI.006 - Pendampingan Industri Pengolahan Garam Dalam Negeri Dalam Pemenuhan Spesifikasi Industri Aneka Pangan, Farmasi dan Kosmetik		Ditjen IKFT	7	7	7	7	7	Industri	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6060.QDI.002 - Pemenuhan Spesifikasi Garam Industri untuk Sektor Aneka Pangan, Farmasi dan Kosmetik		Ditjen IKFT	-	7	7	7	7	Industri	-	2.388	3.000	4.000	5.000	-	-	-	-	-	-	2.388	3.000	4.000	5.000
02.22.04.03- Pengembangan Produk Olahan Laut dan Bioprospeksi Sumber Daya Kelautan									1.000	3.000	3.000	3.500	3.500	-	-	-	-	-	1.000	3.000	3.000	3.500	3.500
EC.6045.QDI.001 - Hilirisasi Industri Berbasis Perikanan		Ditjen IA	-	1	1	1	1	Industri	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6051.QDI.001 - Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan		Ditjen IA	3	6	6	8	8	Industri	1.000	2.000	2.000	2.500	2.500	-	-	-	-	-	1.000	2.000	2.000	2.500	2.500

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
02.22.05- Penguatan Industri Transportasi Laut	001 - Volume Reparasi Kapal		11,2	11,4	11,8	12,0	12,2	Ribu DWT (kumulatif)		1.000	6.500	8.000	9.500							1.000	6.500	8.000	9.500
	002 - Volume Produksi Pembuatan Kapal		1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	Ribu DWT (kumulatif)															
	003 - Nilai Ekspor Industri Perkapalan		858,02	939,41	966,55	1.171,68	1.315,25	Ribu USD															
02.22.05.01- Pengembangan Industri Galangan Kapal sebagai Industri Berteknologi Tinggi										1.000	6.500	8.000	9.500							1.000	6.500	8.000	9.500
EC.6062.PBK.009 - Kebijakan Penyusunan Peta Jalan Nol Emisi Karbon Pada Industri		Ditjen ILMATE	1	2	2	3	4	Rekomendasi Kebijakan			3.500	3.500	4.000								3.500	3.500	4.000
EC.6062.QDI.008 - Industri maritim yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing		Ditjen ILMATE	-	1	2	3	4	Industri		1.000	3.000	4.500	5.500							1.000	3.000	4.500	5.500
05.01.01- Pengembangan Hilirisasi Nikel	01 - Kapasitas Produksi Industri Olahan Nikel		33,64	33,74	33,74	33,74	33,74	juta ton /tahun	2.917	4.000	11.000	14.000	17.000						2.917	4.000	11.000	14.000	17.000
05.01.01.01- Pengembangan Industri Stainless Steel										1.500	3.000	4.000	5.000							1.500	3.000	4.000	5.000
EC.6062.QDI.033 - Industri Logam Dalam Negeri Yang Terfasilitasi Dalam Mendukung Hilirisasi		Ditjen ILMATE	-	2	2	2	2	Industri		1.500	3.000	4.000	5.000							1.500	3.000	4.000	5.000
05.01.01.02- Pengembangan Industri Nickel Sulfate, Katoda, dan Battery Precursor Berbasis Nikel									1.667	1.500	5.000	6.000	7.000						1.667	1.500	5.000	6.000	7.000
EC.6062.QDI.005 - Industri Pemurnian dan Pengolahan Logam Dasar Beserta Turunannya yang Termonitor dan		Ditjen ILMATE	25	23	50	50	50	Industri	1.667	1.500	5.000	6.000	7.000						1.667	1.500	5.000	6.000	7.000
05.01.01.06- Harmonisasi Kebijakan Industri Nikel									1.250	1.000	3.000	4.000	5.000						1.250	1.000	3.000	4.000	5.000

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6062.PBK.019 - Kebijakan Penguatan Industri Logam Berbasis Pengolahan Nikel		Ditjen ILMATE	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	1.250	1.000	3.000	4.000	5.000	-	-	-	-	-	1.250	1.000	3.000	4.000	5.000
05.01.02-Pengembangan Hilirisasi Tembaga	01 - Kapasitas Produksi Industri Olahan Tembaga		1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	ribu ton/tahun	1.000	5.000	7.000	9.000	10.500	-	-	-	-	-	1.000	5.000	7.000	9.000	10.500
05.01.02.01-Tata Kelola Industri Tembaga dan Ketersediaan Bahan Baku									-	1.000	3.000	4.000	5.000	-	-	-	-	-	-	1.000	3.000	4.000	5.000
EC.6062.PBK.020 - Kebijakan Penguatan Industri Logam Berbasis Pengolahan		Ditjen ILMATE	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	1.000	3.000	4.000	5.000	-	-	-	-	-	-	1.000	3.000	4.000	5.000
05.01.02.02-Pengembangan Industri Hilir/Antara Olahan Tembaga									1.000	4.000	4.000	5.000	5.500	-	-	-	-	-	1.000	4.000	4.000	5.000	5.500
EC.6062.PBK.014 - Rencana Aksi Pengembangan Industri Prioritas dan Strategis Sektor Industri Logam. Mesin. Alat Transportasi dan Elektronika		Ditjen ILMATE	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	1.000	4.000	4.000	5.000	5.500	-	-	-	-	-	1.000	4.000	4.000	5.000	5.500
05.01.03-Pengembangan Hilirisasi Bauksit	01 - Kapasitas Produksi Industri Olahan Bauksit		6,27	15,27	16,27	16,87	17,47	juta ton/tahun	1.250	1.000	3.000	4.000	5.000	-	-	-	-	-	1.250	1.000	3.000	4.000	5.000
05.01.03.01-Tata Kelola Industri dan Ketersediaan Bahan Baku Industri Bauksit									1.250	1.000	3.000	4.000	5.000	-	-	-	-	-	1.250	1.000	3.000	4.000	5.000
EC.6062.PBK.021 - Kebijakan Penguatan Industri Logam Berbasis Pengolahan Bauksit		Ditjen ILMATE	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	1.250	1.000	3.000	4.000	5.000	-	-	-	-	-	1.250	1.000	3.000	4.000	5.000
05.01.04-Pengembangan Hilirisasi Timah	01 - Kapasitas Produksi Industri Olahan Timah		142,1	247,3	257,3	257,3	257,3	ribu ton/tahun	-	-	3.000	4.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	3.000	4.000	5.000
05.01.04.01-Tata Kelola Industri dan Ketersediaan Bahan Baku Industri Timah									-	-	3.000	4.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	3.000	4.000	5.000

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
EC.6062.PBK.027 - Kebijakan Penguatan Industri Logam Berbasis Pengolahan Timah		Ditjen ILMATE	-	-	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	-	3.000	4.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	3.000	4.000	5.000	
05.01.05- Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit	02 - Ragam Produk Hilir Sawit		208	223	233	243	250	produk	3.506	15.500	15.500	15.500	15.500						3.506	15.500	15.500	15.500	15.500	
	04 - Rasio Ekspor Produk Hilir Kelapa Sawit terhadap Bahan Baku		92	93	93	93	94	persen																
05.01.05.01- Peningkatan Produktivitas Kebun Kelapa Sawit dan Kualitas Bahan Baku									750	7.500	7.500	7.500	7.500		-	-	-	-	-	750	7.500	7.500	7.500	7.500
EC.6047.PBK.002 - Standar Kualitas dan Spesifikasi Teknis atas Bahan Baku dan/atau Komoditas Turunan Kelapa Sawit		Ditjen IA	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	750	2.000	2.000	2.000	2.000		-	-	-	-	-	750	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6047.QIH.004 - Pengawasan dan Pengendalian di Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia		Ditjen IA	-	20	20	20	20	Badan usaha	-	2.500	2.500	2.500	2.500		-	-	-	-	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
EC.6051.QDI.004 - Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan		Ditjen IA	-	10	10	10	10	Industri	-	3.000	3.000	3.000	3.000		-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
05.01.05.02- Sustainability dan Traceability									756	2.000	2.000	2.000	2.000		-	-	-	-	-	756	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6047.QDB.001 - Fasilitas Sertifikasi Ketertelusuran Keberlanjutan Produk Hilir Kelapa Sawit dan Rantai Pasoknya Melalui Pembentukan Lembaga Sertifikasi (LS) ISPO Hilir		Ditjen IA	1	1	1	1	1	Lembaga	756	2.000	2.000	2.000	2.000		-	-	-	-	-	756	2.000	2.000	2.000	2.000
05.01.05.04- Pengembangan Industri Oleokimia									2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		-	-	-	-	-	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
EC.6045.QDI.006 - Fasilitas Prototyping Produk Betacarotene dan Tocopherol alami berbasis minyak sawit		Ditjen IA	1	1	1	1	1	Industri	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		-	-	-	-	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target					Satuan	Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6049.QD1.001 - Pengembangan Industri Bahan Bakar Terbarukan Generasi Kedua (HVO/SAF - Hydrogenated Vegetable Oil/Sustainable Aviation Fuel) Berbahan Baku Technical Oil		Ditjen IA	1	1	1	1	1	Industri	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.01.05.05- Dekarbonisasi Industri dan Ekonomi Sirkular di Industri Sawit									-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6047.PBK.001 - Pembinaan Industri Hijau dan Penurunan NZE di Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia dan Pakan		Ditjen IA	-	2	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
05.01.06- Pengembangan Hilirisasi Kelapa	04 - Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa		55	60	65	70	75	persen	1.000	9.300	9.300	9.800	9.800	-	-	-	-	-	1.000	9.300	9.300	9.800	9.800
05.01.06.03- Peningkatan Produktivitas Kelapa									1.000	4.500	4.500	5.000	5.000	-	-	-	-	-	1.000	4.500	4.500	5.000	5.000
EC.6045.QDH.006 - Peningkatan Nilai Tambah Air Kelapa		Ditjen IA	-	5	5	5	5	Badan usaha	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6045.QD1.003 - Pengembangan Industri		Ditjen IA	1	1	1	1	1	Industri	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6046.PBK.005 - Peningkatan Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa		Ditjen IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	1.500	1.500	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500	2.000	2.000
05.01.06.05- Peningkatan Sentra IKM Pengolahan Kelapa									-	2.800	2.800	2.800	2.800	-	-	-	-	-	-	2.800	2.800	2.800	2.800
EC.6071.QDD.009 - Peningkatan Sentra IKM Pengolahan Kelapa		Ditjen IKMA	-	4	4	4	4	Kelompok Masyarakat	-	2.800	2.800	2.800	2.800	-	-	-	-	-	-	2.800	2.800	2.800	2.800
05.01.06.07- Integrasi Rantai Pasok di Dalam Negeri dan Ekspor									-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6044.PBK.009 - Fasilitas Pusat Penyedia Bahan Baku Industri Tempurung Kelapa		Ditjen IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
05.01.07- Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	03 - Utilisasi Industri Pengolahan Rumput Laut		53,76	58,01	62,26	66,51	70,76	persen		1.000	1.000	1.000	1.000							1.000	1.000	1.000	1.000
05.01.07.02- Pengembangan Industri dan Hilirisasi Rumput Laut										1.000	1.000	1.000	1.000							1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6045.QDI.002 - Hilirisasi Industri Berbasis Rumput Laut		Ditjen IA		1	1	1	1	Industri		1.000	1.000	1.000	1.000							1.000	1.000	1.000	1.000
05.01.08- Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong	02 - Kapasitas Produksi Pati Sagu		100.000	150.000	210.000	260.000	320.000	ton/tahun		5.975	5.975	6.475	6.975							5.975	5.975	6.475	6.975
05.01.08.02- Pengembangan Industri Hilir Sagu dan Singkong										5.975	5.975	6.475	6.975							5.975	5.975	6.475	6.975
EC.6045.QDI.004 - Pengembangan Industri Pengolahan Sagu		Ditjen IA		1	1	1	1	Industri		1.000	1.000	1.500	2.000							1.000	1.000	1.500	2.000
EC.6071.QDI.045 - IKM Pangan yang Mendapatkan Fasilitas dalam rangka Hilirisasi Sagu / Singkong		Ditjen IKMA		50	50	50	50	Industri		4.975	4.975	4.975	4.975							4.975	4.975	4.975	4.975
05.01.09- Pengembangan Industri Kimia	01 - Kapasitas Produksi Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara		60.234,97	60.444,74	66.955,52	74.308,78	79.668,38	Ribu ton	17.768	134.300	139.450	147.100	151.900						17.768	134.300	139.450	147.100	151.900
	02 Pertumbuhan PDB Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia		6,08	6,51	6,96	7,31	7,34	Persen															
05.01.09.01-Mega Proyek Industri Kimia Dasar									2.500	15.000	17.000	19.000	20.000						2.500	15.000	17.000	19.000	20.000
EC.6057.PBK.006 - Penyusunan Peta Jalan dalam Rangka Hilirisasi		Ditjen IKFT		1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan		5.000	6.000	7.000	7.000							5.000	6.000	7.000	7.000
EC.6057.PEA.001 - Fasilitasi Investor Dalam Rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni		Ditjen IKFT	1	1	1	1	1	kegiatan	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000						1.000	1.500	2.000	2.500	3.000

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6057.PEA.002 - Fasilitasi Investor Dalam Rangka Pembangunan Industri Petrokimia Berbasis Gasifikasi Batubara di Tanjung Enim		Ditjen IKFT	1	1	1	1	1	kegiatan	500	1.500	2.000	2.500	3.000	-	-	-	-	-	500	1.500	2.000	2.500	3.000
EC.6057.PEA.003 - Fasilitasi Investor Dalam Rangka Pembangunan Fasilitas Coal to Ammonia di Kutai Timur		Ditjen IKFT	1	1	1	1	1	kegiatan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6060.PBK.003 - Fasilitasi Pembangunan pabrik Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi dan Gas Alam (Olefin dan turunannya)		Ditjen IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
EC.6060.PBK.004 - Pembangunan pabrik Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Batu Bara (gasifikasi batubara)		Ditjen IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
05.01.09.02- Revitalisasi Industri Pupuk untuk Mendukung Swasembada Pangan									-	5.000	6.000	6.500	7.500	-	-	-	-	-	-	5.000	6.000	6.500	7.500
EC.6057.PBK.005 - Fasilitasi dalam rangka Percepatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pupuk dan Pestisida		Ditjen IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	3.000	3.500	4.000	4.500	-	-	-	-	-	-	3.000	3.500	4.000	4.500
EC.6060.QD1.005 - Revitalisasi Industri Pupuk dan Hilirisasi gas bumi untuk pembangunan pabrik pupuk untuk mendukung program ketahanan pangan nasional		Ditjen IKFT	-	1	1	1	1	Industri	-	2.000	2.500	2.500	3.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.500	2.500	3.000
05.01.09.04- Dekarbonisasi Industri dan Ekonomi Sirkular di Industri Kimia									1.250	2.850	2.950	3.550	3.650	-	-	-	-	-	1.250	2.850	2.950	3.550	3.650

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6053.PBK.013 - Akselerasi Dekarbonisasi Sektor Industri Kimia Hulu		Ditjen IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	1.500	1.500	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500	2.000	2.000
EC.6057.PBK.012 - Fasilitas Investor dalam Rangka Pembangunan Industri White Bio Plastik di Indonesia		Ditjen IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	500	550	600	650	700	-	-	-	-	-	500	550	600	650	700
EC.6057.PBK.014 - Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Hidrogen Hijau serta Ammonia Hijau pada Industri Dalam Negeri		Ditjen IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	750	800	850	900	950	-	-	-	-	-	750	800	850	900	950
05.01.09.05-Tata Kelola Kebijakan Pengembangan Industri Kimia dan Bahan Galian Nonlogam									3.341	23.000	23.600	24.450	25.550	-	-	-	-	-	3.341	23.000	23.600	24.450	25.550
EC.6053.PBK.011 - Penyusunan Rencana Aksi Manajemen Pengelolaan Produk Karet Hilir dan End-of life Tyre (ELT)		Ditjen IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	1.191	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	-	-	-	1.191	1.500	1.500	1.500	1.500
EC.6054.PBK.001 - Rekomendasi Kebijakan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) Sektor Industri Kimia Hulu		Ditjen IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	900	950	1.000	1.050	1.100	-	-	-	-	-	900	950	1.000	1.050	1.100
EC.6054.PBK.002 - Rekomendasi Kebijakan Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) Sektor Industri Kimia Hulu		Ditjen IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	500	550	600	650	700	-	-	-	-	-	500	550	600	650	700
EC.6054.PBK.005 - Rekomendasi Kebijakan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) Sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam		Ditjen IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6054.PBK.006 - Rekomendasi Kebijakan Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) Sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam		Ditjen IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6057.PBK.004 - Rekomendasi Kebijakan Terkait Penerapan Harga Gas Bumi Tertentu Untuk Industri		Ditjen IKFT		1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan		3.000	3.500	4.000	4.000							3.000	3.500	4.000	4.000
EC.6057.PBK.015 - Rekomendasi Kebijakan Dampak Sosio-Ekonomi Daftar Pestisida dalam Annex III Prior Informed Concern (PIC) Konvensi Rotterdam		Ditjen IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	750	1.000	1.000	1.250	1.250						750	1.000	1.000	1.250	1.250
EC.6057.PBK.018 - Rekomendasi Kebijakan Terkait Penerapan Harga Gas Bumi Tertentu Untuk Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam		Ditjen IKFT		1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan		2.000	2.000	2.000	2.000							2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6057.PBK.022 - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu Untuk Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam		Ditjen IKFT		1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan		3.000	3.000	3.000	3.000							3.000	3.000	3.000	3.000
EC.6058.QDI.007 - Pendampingan Pemenuhan Standar Halal Bagi Produk Bahan Baku Plastik		Ditjen IKFT		2	2	3	3	Industri		1.000	2.000	2.000	3.000							1.000	2.000	2.000	3.000
EC.6059.PBK.001 - Neraca Komoditas Sektor Industri Kimia Hulu		Ditjen IKFT		1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan		5.000	5.000	5.000	5.000							5.000	5.000	5.000	5.000
EC.6059.PBK.006 - Kajian Dampak Pemberlakuan Kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ZODOL)		Ditjen IKFT		1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan		3.000	2.000	2.000	2.000							3.000	2.000	2.000	2.000
05.01.09.06-Peningkatan Daya Saing Sektor Industri Kimia dan Bahan Galian Nonlogam									9.177	67.450	68.900	72.600	74.200						9.177	67.450	68.900	72.600	74.200
EC.6054.PBK.004 - Rekomendasi Kebijakan Mengenai Pembatasan Kadungan Timbal (Pb) dalam Produk Cat Dibawah 90 ppm		Ditjen IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	559	600	600	600	600						559	600	600	600	600

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6054.QIH.002 - Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pemenuhan dan Kepatuhan Kebijakan di Bidang Perindustrian Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi		Ditjen IKFT		1	1	1	1	Badan usaha		1.000	1.000	1.000	1.000							1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6054.QIH.003 - Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pemenuhan dan Kepatuhan Kebijakan di Bidang Perindustrian Sektor Industri Kimia Hulu		Ditjen IKFT		1	1	1	1	Badan usaha		500	600	700	700							500	600	700	700
EC.6054.QIH.004 - Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pemenuhan dan Kepatuhan Kebijakan di Bidang Perindustrian Sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam		Ditjen IKFT		20	20	20	20	Badan usaha		1.500	1.500	1.500	1.500							1.500	1.500	1.500	1.500
EC.6055.PBK.002 - Fasilitasi dalam Rangka Penerapan dan Peningkatan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam		Ditjen IKFT		1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan		4.000	4.000	4.000	4.000							4.000	4.000	4.000	4.000
EC.6055.PBK.003 - Fasilitasi dalam Rangka Penerapan dan Peningkatan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Industri Kimia Hulu		Ditjen IKFT		1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan		2.000	2.500	3.000	3.000							2.000	2.500	3.000	3.000
EC.6055.QDI.002 - Pendampingan Produk Prioritas Dalam Mendukung Percepatan ke Dalam e- katalog Sektoral		Ditjen IKFT	1	5	5	5	5	Industri	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000						1.000	5.000	5.000	5.000	5.000

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6055.QD1.005 - Pendampingan Produk Dengan Nilai TKDN Tinggi Untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		Ditjen IKFT	-	10	10	10	10	Industri	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
EC.6056.PBK.002 - Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Industri Kimia Hilir dan Farmasi		Ditjen IKFT	2	2	-	-	-	Rekomendasi Kebijakan	703	750	-	-	-	-	-	-	-	-	703	750	-	-	-
EC.6056.PBK.003 - Optimalisasi Pemanfaatan Skema Kerjasama Bilateral - Multilateral (regional maupun internasional) dalam rangka Mendorong Competitiveness Produk Industri Kimia Hulu		Ditjen IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	1.000	1.000	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.500	1.500
EC.6057.PBK.002 - Rekomendasi Kebijakan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan Industri Bahan Baku Obat		Ditjen IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	1.000	1.250	1.500	1.750	2.000	-	-	-	-	-	1.000	1.250	1.500	1.750	2.000
EC.6057.PBK.007 - Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Anorganik (soda ash, lithium hidroksida, lithium karbonat, soda kaustik dan HCL, garam industri)		Ditjen IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6057.PBK.008 - Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Organik		Ditjen IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6057.PBK.011 - Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hulu Lainnya		Ditjen IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6057.PBK.013 - Penyusunan Kerangka Insentif Dalam Rangka Pengembangan Industri Kimia Hilir dan Farmasi		Ditjen IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	703	750	750	750	750	-	-	-	-	-	703	750	750	750	750
EC.6057.PBK.017 - Rekomendasi Kebijakan Fiskal dan Non Fiskal Sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam		Ditjen IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6057.PBK.019 - Peningkatan Daya Saing Sektor Industri Kimia Hulu		Ditjen IKFT	-	3	3	3	3	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	3.000	4.000	5.000	-	-	-	-	-	-	2.000	3.000	4.000	5.000
EC.6057.PBK.020 - Analisis Dampak Kebijakan Fiskal dan Non Fiskal terhadap Kinerja Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam		Ditjen IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6057.PEA.004 - Fasilitasi Percepatan Pembangunan Industri Petrokimia berbasis Minyak Bumi		Ditjen IKFT	-	1	1	1	1	kegiatan	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
EC.6057.PEA.005 - Fasilitasi Percepatan Pembangunan Industri Petrokimia melalui Hilirisasi Gas Bumi		Ditjen IKFT	-	1	1	1	1	kegiatan	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
EC.6057.PEA.006 - Fasilitasi Penyediaan Pasokan Bioetanol untuk Bahan Bakar Nabati (Biofuel) dalam Rangka Mendukung Ketahanan Energi Nasional		Ditjen IKFT	-	1	1	1	1	kegiatan	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
EC.6059.PBK.005 - Penyusunan Peta Kemampuan Industri Kimia Hilir dan Farmasi untuk Mendukung Pertumbuhan dan Penguasaan Pasar		Ditjen IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	700	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	-	-	-	700	1.500	1.500	1.500	1.500
EC.6059.PBK.008 - Penguatan Rantai Pasok Industri Dalam Negeri Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		Ditjen IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	500	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6060.PBK.002 - Hilirisasi Industri Bahan Galian Nonlogam		Ditjen IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	750	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	750	5.000	5.000	5.000	5.000
EC.6060.PBK.006 - Hilirisasi Silika Menjadi Wafer Silikon Dalam Rangka Kemandirian Industri Photovoltaic (PV) Module dan Semikonduktor Dalam Negeri		Ditjen IKFT	1	2	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500	-	-	-	-	-	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
EC.6060.PBK.007 - Hilirisasi Grafit untuk mendukung Ekosistem Industri Electric Vehicle (EV) Nasional		Ditjen IKFT	1	2	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-	-	-	-	-	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
EC.6060.PBK.009 - Penyediaan Bahan Baku Industri dan Energi		Ditjen IKFT	-	2	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan	-	3.000	3.000	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	4.000	4.000
EC.6060.PBK.010 - Akselerasi Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri Kimia Hulu dan Akselerasi Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Ekspor Impor Produk Industri Kimia Hulu		Ditjen IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	1.000	1.250	1.500	1.750	-	-	-	-	-	-	1.000	1.250	1.500	1.750
EC.6081.QMA.002 - Integrasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil		Ditjen IKFT	1	1	1	1	1	layanan	762	2.500	2.500	2.500	2.500	-	-	-	-	-	762	2.500	2.500	2.500	2.500
EC.6082.QDB.001 - Fasilitasi Kelembagaan Otoritas Nasional Senjata Kimia		Ditjen IKFT	1	1	1	1	1	Lembaga	500	600	700	800	900	-	-	-	-	-	500	600	700	800	900
05.01.09.07- Pengembangan Produk Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam									1.500	21.000	21.000	21.000	21.000	-	-	-	-	-	1.500	21.000	21.000	21.000	21.000
EC.6053.PBK.004 - Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Pengembangan Industri Keramik Maju (Advanced Ceramics)		Ditjen IKFT	1	3	3	3	3	Rekomendasi Kebijakan	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6053.PBK.008 - Analisis Sustainability Industri Asbestos Berbasis Chrysotile		Ditjen IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	500	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	500	3.000	3.000	3.000	3.000
EC.6057.PBK.021 - Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pengolahan Bahan Galian Nonlogam		Ditjen IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	6.000	6.000	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
EC.6059.PBK.003 - Penyusunan Kebijakan Peningkatan Efisiensi Alur Aliran Material dan Barang Sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam		Ditjen IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
EC.6060.PBK.008 - Optimalisasi Penggunaan Aspal Buton sebagai Upaya Swasembada Aspal Nasional		Ditjen IKFT	-	3	3	3	3	Rekomendasi Kebijakan	-	6.000	6.000	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
05.01.10- Pembangunan Industri Semikonduktor	01 Pertumbuhan PDB Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik		7,50	9,09	10,76	10,85	11,42	Persen	11.000	46.500	51.000	54.500	58.000	-	-	-	-	-	11.000	46.500	51.000	54.500	58.000
05.01.10.01- Penyiapan Rantai Pasok Industri Semikonduktor									11.000	16.500	21.000	24.500	28.000	-	-	-	-	-	11.000	16.500	21.000	24.500	28.000
EC.6062.PBK.018 - Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Penguatan Struktur Bahan Baku Komoditas Industri Elektronika dan Telematika		Ditjen ILMATE	1	1	2	3	4	Rekomendasi Kebijakan	1.500	1.000	1.500	2.000	2.500	-	-	-	-	-	1.500	1.000	1.500	2.000	2.500
EC.6062.QDI.001 - Industri Komponen yang terfasilitasi dalam rangka penguatan struktur		Ditjen ILMATE	2	1	2	3	4	Industri	1.500	1.000	1.500	2.000	2.500	-	-	-	-	-	1.500	1.000	1.500	2.000	2.500
EC.6062.QDI.007 - Industri Telekomunikasi dan Informasi yang Terfasilitasi		Ditjen ILMATE	-	2	2	2	2	Industri	-	2.000	3.500	4.500	5.500	-	-	-	-	-	-	2.000	3.500	4.500	5.500

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6062.QDI.009 - Industri yang terfasilitasi melalui Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Program Nasional IMEI Control		Ditjen ILMATE	25	28	30	32	34	Industri	6.000	7.000	7.500	8.000	8.500	-	-	-	-	-	6.000	7.000	7.500	8.000	8.500
EC.6062.QDI.015 - Industri Semikonduktor Nasional yang terfasilitasi Dalam Rangka Pendalaman Struktur Industri Elektronika		Ditjen ILMATE	4	2	3	4	5	Industri	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	-	-	-	-	-	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
EC.6062.QDI.034 - Industri Yang Terfasilitasi Dalam Rangka Pengawasan dan Pengendalian Sektor Elektronika dan Telematika		Ditjen ILMATE	-	-	1	2	3	Industri	-	-	1.000	1.500	2.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.500	2.000
EC.6063.QDI.006 - Industri yang Terfasilitasi melalui Engineering Center TIK Untuk IP Lokal		Ditjen ILMATE	1	1	1	1	1	Industri	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
05.01.10.03-Riset dan Pengembangan Semikonduktor									-	30.000	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
EC.6063.QDI.007 - Industri Terfasilitasi Melalui Penguatan Alat Uji EMC		Ditjen ILMATE	1	1	-	-	-	Industri	-	30.000	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
05.01.11-Pengembangan Industri Kosmetik dan Farmasi	01 Pertumbuhan PDB Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional		11,48	11,48	11,91	11,78	11,86	Persen	3.726	8.230	8.230	8.230	8.230	-	-	-	-	-	3.726	8.230	8.230	8.230	8.230
05.01.11.01-Penguatan Industri Bahan Baku Kosmetik dan Farmasi									3.726	6.730	6.730	6.730	6.730	-	-	-	-	-	3.726	6.730	6.730	6.730	6.730
EC.6053.PBK.009 - Pemetaan Kemampuan Industri dan Hilirisasi Bahan Baku Komoditas Sektor Farmasi		Ditjen IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	751	800	800	800	800	-	-	-	-	-	751	800	800	800	800
EC.6053.PBK.010 - Peningkatan Hilirisasi Produksi dan Promosi Obat Bahan Alam		Ditjen IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	751	1.300	1.300	1.300	1.300	-	-	-	-	-	751	1.300	1.300	1.300	1.300

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6055.PBK.001 - Verifikasi Kemampuan Industri Kosmetik Dalam Rangka Pemetaan, Pengembangan, dan Hilirisasi Industri		Ditjen IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	800	900	900	900	900	-	-	-	-	-	800	900	900	900	900
EC.6071.QDD.002 - Sentra dan UPT IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang mendapat Fasilitas		Ditjen IKMA	3	5	5	5	5	Kelompok Masyarakat	1.425	3.730	3.730	3.730	3.730	-	-	-	-	-	1.425	3.730	3.730	3.730	3.730
05.01.11.06-Branding Kosmetik Halal untuk Perluasan Pasar Ekspor									-	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
EC.6071.QDI.053 - Industri Kecil dan Menengah yang Mengikuti Program Kompetisi IKM Kosmetik		Ditjen IKMA	-	30	30	30	30	Industri	-	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.12-Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)	01 - Persentase Produksi Kendaraan Listrik Roda Empat terhadap Total Produksi Kendaraan Roda Empat		1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	Persen	6.642	16.800	34.000	43.000	50.000	-	-	-	-	-	6.642	16.800	34.000	43.000	50.000
05.01.12.01-Penguatan Rantai Pasok Industri di Dalam Negeri (termasuk IKM)									1.000	7.000	8.000	9.500	10.500	-	-	-	-	-	1.000	7.000	8.000	9.500	10.500
EC.6067.PBK.001 - Evaluasi Kebijakan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika		Ditjen ILMATE	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	1.000	3.000	4.000	5.500	6.500	-	-	-	-	-	1.000	3.000	4.000	5.500	6.500
EC.6071.QDI.062 - IKM LMEA yang mendapatkan Fasilitas dalam rangka penguatan rantai pasok industri KBLBB		Ditjen IKMA	-	10	10	10	10	Industri	-	4.000	4.000	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
05.01.12.03-Pengembangan Ekosistem Industri EV									5.642	9.800	26.000	33.500	39.500	-	-	-	-	-	5.642	9.800	26.000	33.500	39.500

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6062.PBK.007 - Kebijakan dan Rencana Strategis Pembangunan dan Program Industri Prioritas Sektor Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan		Ditjen ILMATE	-	1	2	3	4	Rekomendasi Kebijakan	-	1.000	2.000	3.000	4.000	-	-	-	-	-	-	1.000	2.000	3.000	4.000
EC.6062.PBK.008 - Kebijakan Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor		Ditjen ILMATE	2	2	2	3	4	Rekomendasi Kebijakan	-	2.500	3.500	3.500	4.000	-	-	-	-	-	-	2.500	3.500	3.500	4.000
EC.6062.QDI.012 - Industri Kendaraan Bermotor yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing		Ditjen ILMATE	1	1	5	6	7	Industri	1.500	2.000	5.000	6.000	7.000	-	-	-	-	-	1.500	2.000	5.000	6.000	7.000
EC.6062.QDI.017 - Industri Baterai Nasional yang Terfasilitasi Dalam Rangka Penguatan Struktur Industri Dalam Negeri		Ditjen ILMATE	4	2	3	4	5	Industri	1.642	1.000	1.500	2.000	2.500	-	-	-	-	-	1.642	1.000	1.500	2.000	2.500
EC.6070.QDI.002 - Industri Sektor Otomotif yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan		Ditjen ILMATE	2	2	10	10	15	Industri	1.000	1.000	3.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	1.000	1.000	3.000	5.000	5.000
EC.6966.PBK.001 - Kebijakan Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)		Ditjen ILMATE	1	1	2	3	4	Rekomendasi Kebijakan	-	800	3.000	3.000	4.000	-	-	-	-	-	-	800	3.000	3.000	4.000
EC.6966.QDI.001 - Industri KBLBB yang terfasilitasi melalui pengembangan ekosistem		Ditjen ILMATE	3	1	3	4	5	Industri	1.500	1.500	4.000	6.000	7.000	-	-	-	-	-	1.500	1.500	4.000	6.000	7.000
EC.6966.QDI.002 - Fasilitasi Penguatan Sistem Rantai Pasok Industri KBLBB Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global (GVC)		Ditjen ILMATE	-	1	2	3	4	Industri	-	-	4.000	5.000	6.000	-	-	-	-	-	-	-	4.000	5.000	6.000
05.01.13- Pengembangan Industri Dirgantara	01 - Utilisasi Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya		60	63,25	65,78	69,50	70,00	Persen	2.900	12.500	29.000	37.500	52.000	-	-	-	-	-	2.900	12.500	29.000	37.500	52.000

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
05.01.13.01- Penguatan Industri Pesawat Terbang, Komponen, dan Rantai Pasok Kedirgantaraan									1.500	4.500	10.000	12.500	17.000	-	-	-	-	-	1.500	4.500	10.000	12.500	17.000
EC.6062.QDI.003 - Industri Drone yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing		Ditjen ILMATE	1	1	1	1	1	Industri	-	1.000	2.500	3.000	4.500	-	-	-	-	-	-	1.000	2.500	3.000	4.500
EC.6062.QDI.004 - Industri MRO Pesawat yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing		Ditjen ILMATE	-	1	2	3	4	Industri	-	2.500	3.500	4.500	5.500	-	-	-	-	-	-	2.500	3.500	4.500	5.500
EC.6062.QDI.010 - Industri kedirgantaraan yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing		Ditjen ILMATE	1	1	3	4	5	Industri	1.500	1.000	4.000	5.000	7.000	-	-	-	-	-	1.500	1.000	4.000	5.000	7.000
05.01.13.03- Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Kedirgantaraan									1.400	8.000	19.000	25.000	35.000	-	-	-	-	-	1.400	8.000	19.000	25.000	35.000
EC.6068.QDI.005 - Industri yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor sektor Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan		Ditjen ILMATE	2	2	3	4	5	Industri	1.400	4.000	4.500	5.000	7.500	-	-	-	-	-	1.400	4.000	4.500	5.000	7.500
EC.6068.QDI.006 - Industri yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi sektor Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan		Ditjen ILMATE	-	-	3	4	5	Industri	-	-	10.000	15.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000	15.000	20.000
EC.6068.QDI.008 - Industri yang terfasilitasi Dalam Rangka Kerjasama Industri Internasional Sektor Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan		Ditjen ILMATE	2	2	3	4	5	Industri	-	4.000	4.500	5.000	7.500	-	-	-	-	-	-	4.000	4.500	5.000	7.500
05.01.14- Pengembangan Industri Mesin dan Perlengkapan	01 Pertumbuhan PDB Industri Mesin dan Perlengkapan	-	4,00	5,50	6,50	7,50	8,70	Persen	17.678	23.583	60.350	74.350	86.350	-	-	-	-	-	17.678	23.583	60.350	74.350	86.350
05.01.14.01- Pengembangan Industri EBT									1.000	1.500	5.500	6.500	6.500	-	-	-	-	-	1.000	1.500	5.500	6.500	6.500

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6062.PBK.026 - Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Peningkatan Daya Saing Industri Penunjang EBT		Ditjen ILMATE	-	-	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan	-	-	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000
EC.6062.QDI.018 - Industri Energi Baru Terbarukan yang terfasilitasi dalam mendukung Pengembangan Rantai Nilai Sektor Ketenagalistrikan		Ditjen ILMATE	2	2	4	6	8	Industri	1.000	1.500	3.500	4.500	4.500	-	-	-	-	-	1.000	1.500	3.500	4.500	4.500
05.01.14.02- Pengembangan Industri Alat Kesehatan									2.701	1.500	3.500	5.000	5.500	-	-	-	-	-	2.701	1.500	3.500	5.000	5.500
EC.6062.PBK.025 - Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Peningkatan Daya Saing Industri Alat Kesehatan sebagai pemenuhan Ketahanan Kesehatan Nasional		Ditjen ILMATE	-	-	1	2	2	Rekomendasi Kebijakan	-	-	1.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000	2.000	2.000
EC.6062.QDI.024 - Industri Alat Kesehatan yang Terfasilitasi dalam rangka Pemenuhan dan Kemandirian Ketersediaan Alat Kesehatan		Ditjen ILMATE	2	2	3	4	5	Industri	2.701	1.500	2.500	3.000	3.500	-	-	-	-	-	2.701	1.500	2.500	3.000	3.500
EC.6063.QDI.002 - Pengembangan Center Of Excellence Industri Alat Kesehatan		Ditjen ILMATE	-	-	-	-	-	Industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.14.03- Pengembangan Industri Alat Pertanian									1.500	1.500	4.500	5.000	5.500	-	-	-	-	-	1.500	1.500	4.500	5.000	5.500
EC.6062.PBK.024 - Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Peningkatan Daya Saing Industri Alat Mesin Pertanian		Ditjen ILMATE	-	-	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan	-	-	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000
EC.6062.QDI.025 - Industri Alat Mesin Pertanian yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan Mekanisasi		Ditjen ILMATE	3	2	3	4	5	Industri	1.500	1.500	2.500	3.000	3.500	-	-	-	-	-	1.500	1.500	2.500	3.000	3.500
05.01.14.04- Pengembangan Industri Alat Berat dan Mesin Perkakas									4.028	7.350	24.350	28.350	32.350	-	-	-	-	-	4.028	7.350	24.350	28.350	32.350

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6062.PBK.012 - Rekomendasi Kebijakan Sektor Industri Permesinan dalam rangka mendukung Menuju Indonesia Emas 2045		Ditjen ILMATE			2	2	2	Rekomendasi Kebijakan			2.000	2.000	2.000								2.000	2.000	2.000
EC.6062.QDI.011 - Industri Komponen Kereta Api yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing		Ditjen ILMATE	1	1	2	3	4	Industri	1.038	1.500	5.000	5.500	7.000						1.038	1.500	5.000	5.500	7.000
EC.6062.QDI.013 - Industri Komponen Alat Pertahanan yang Terfasilitasi dalam rangka meningkatkan daya saing		Ditjen ILMATE		1	2	3	4	Industri		500	5.500	5.500	6.500							500	5.500	5.500	6.500
EC.6062.QDI.016 - Industri Mold And Dies yang Terfasilitasi dalam mendukung Fokus Industri RPJMN 2025-2029		Ditjen ILMATE			2	3	4	Industri			2.000	2.500	3.000								2.000	2.500	3.000
EC.6062.QDI.026 - Industri Alat Berat yang Terfasilitasi dalam rangka Pengembangan Hilirisasi Berbasis SDA Unggulan		Ditjen ILMATE	3	2	6	8	10	Industri	1.500	1.500	4.000	6.000	6.000						1.500	1.500	4.000	6.000	6.000
EC.6062.QDI.027 - Industri Mesin Perkakas yang Terfasilitasi dalam menunjang Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Kemampuan Kerja hasil Pendidikan Berkualitas yang merata		Ditjen ILMATE			2	4	6	Industri			2.000	3.000	4.000								2.000	3.000	4.000
EC.6071.QDD.003 - Sentra IKM dan UPT Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapat Fasilitasi		Ditjen IKMA	3	8	8	8	8	Kelompok Masyarakat	1.490	3.850	3.850	3.850	3.850						1.490	3.850	3.850	3.850	3.850
05.01.14.05-Adopsi Teknologi, Smart Manufacturing, dan Pemanfaatan Riset/Inovasi di Industri Mesin dan Perlengkapan									8.450	11.733	22.500	29.500	36.500						8.450	11.733	22.500	29.500	36.500

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6062.QDI.022 - Industri yang Terverifikasi Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Supply Demand Sektor Industri Permesinan dalam rangka Mendukung Fokus Industri RPJMN 2025-2029		Ditjen ILMATE	40	40	60	80	80	Industri	2.000	2.233	3.500	4.000	4.500	-	-	-	-	-	2.000	2.233	3.500	4.000	4.500
EC.6062.QDI.028 - Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian yang terfasilitasi melalui pengawasan dan pengendalian		Ditjen ILMATE	-	-	20	40	60	Industri	-	-	1.000	2.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000	2.000	3.000
EC.6063.QDI.004 - Industri yang Terfasilitasi melalui Pembangunan Indonesia Manufacturing Center (One Stop Solution Manufacture)		Ditjen ILMATE	5	3	10	15	20	Industri	1.000	3.000	7.500	12.500	15.000	-	-	-	-	-	1.000	3.000	7.500	12.500	15.000
EC.6070.QDI.003 - Industri Sektor Permesinan dan Alat Mesin Pertanian yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan		Ditjen ILMATE	1	1	10	10	15	Industri	1.000	1.500	5.000	5.000	7.500	-	-	-	-	-	1.000	1.500	5.000	5.000	7.500
EC.6077.QDI.001 - Perusahaan Industri yang memanfaatkan Teknologi Industri		BSKJI	32	35	40	45	50	Industri	4.450	5.000	5.500	6.000	6.500	-	-	-	-	-	4.450	5.000	5.500	6.000	6.500
05.01.15-Peningkatan Industri Makanan dan Minuman	01 Pertumbuhan PDB Industri Makanan dan Minuman		5,43	6,00	7,30	7,70	8,00	Persen	37.051	146.050	157.000	164.900	173.380	-	-	-	-	-	37.051	146.050	157.000	164.900	173.380
05.01.15.01-Penguatan Rantai Pasok IKM dan Jaminan Ketersediaan Bahan Baku/Penolong di									4.000	20.825	21.025	21.225	21.425	-	-	-	-	-	4.000	20.825	21.025	21.225	21.425
EC.6044.PBK.001 - Neraca Komoditas Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan		Ditjen IA	5	5	5	5	5	Rekomendasi Kebijakan	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EC.6044.PBK.004 - Analisis kebutuhan bahan baku industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar		Ditjen IA	-	5	5	5	5	Rekomendasi Kebijakan	-	6.000	6.200	6.400	6.600	-	-	-	-	-	-	6.000	6.200	6.400	6.600

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6044.PBK.010 - Neraca Komoditas Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia dan Pakan		Ditjen IA	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
EC.6044.PBK.011 - Pengembangan Rantai Pasok Pakan Ternak Untuk Peningkatan Suplai Bahan Baku Industri		Ditjen IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6071.QDI.043 - IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Fasilitas Kemitraan		Ditjen IKMA	-	5	5	5	5	Industri	-	625	625	625	625	-	-	-	-	-	-	625	625	625	625
EC.6071.QDI.044 - IKM Pangan Intermediate yang Mendapatkan Pendampingan/Fasilitas Bantuan Mesin/Peralatan		Ditjen IKMA	-	30	30	30	30	Industri	-	4.200	4.200	4.200	4.200	-	-	-	-	-	-	4.200	4.200	4.200	4.200
05.01.15.02-Peningkatan Penerapan Standardisasi di Industri Makanan dan Minuman									1.000	4.000	4.160	4.300	4.460	-	-	-	-	-	1.000	4.000	4.160	4.300	4.460
EC.6047.QDH.002 - Perencanaan dan Pembinaan Standar di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar		Ditjen IA	-	20	21	22	23	Badan usaha	-	3.000	3.160	3.300	3.460	-	-	-	-	-	-	3.000	3.160	3.300	3.460
EC.6047.QIH.003 - Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pemenuhan dan Kepatuhan Kebijakan Di Bidang Perindustrian Sektor Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan		Ditjen IA	15	20	20	20	20	Badan usaha	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.01.15.03-Peningkatan Adopsi Teknologi dan Pemanfaatan Riset/Inovasi Industri Makanan dan Minuman									23.600	66.000	71.100	76.200	81.300	-	-	-	-	-	23.600	66.000	71.100	76.200	81.300
EC.6046.QDH.001 - Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Minuman dan Bahan Penyegar		Ditjen IA	10	25	25	25	25	Badan usaha	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6046.QDH.002 - Restrukturisasi Mesin dan / atau Peralatan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan		Ditjen IA	9	15	20	25	30	Badan usaha	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	-	-	-	-	-	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000
EC.6046.QDH.004 - Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri Pakan dan Oleokimia		Ditjen IA	-	20	20	20	20	Badan usaha	-	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
EC.6046.QDI.002 - Pengembangan Industri Pangan Fungsional Berbasis Hasil Perkebunan		Ditjen IA	-	1	1	1	1	Industri	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6046.QDI.003 - Pengembangan Industri Pangan Fungsional Berbasis Hasil Tanaman Pangan		Ditjen IA	-	1	1	1	1	Industri	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6051.QDI.002 - Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegetar		Ditjen IA	9	10	11	12	13	Industri	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300	-	-	-	-	-	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
EC.6051.QDI.003 - Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan		Ditjen IA	9	10	10	10	10	Industri	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
05.01.15.04-Penerapan Ekonomi Sirkular dan Industri Hijau di Industri Makanan dan Minuman									-	3.500	4.100	4.200	4.300	-	-	-	-	-	-	3.500	4.100	4.200	4.300
EC.6045.QDI.007 - Penguatan Ekosistem Industri Makanan Berkelanjutan dan Hijau		Ditjen IA	-	1	1	1	1	Industri	-	1.500	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	1.500	2.000	2.000	2.000
EC.6047.QDH.001 - Pembinaan Industri Hijau dan Implementasi Ekonomi Sirkular di Sektor Industri		Ditjen IA	-	20	21	22	23	Badan usaha	-	2.000	2.100	2.200	2.300	-	-	-	-	-	-	2.000	2.100	2.200	2.300
05.01.15.05-Fasilitasi Pengembangan Industri dan Peningkatan Daya Saing Produk Makanan dan Minuman									8.451	51.725	56.615	58.975	61.895	-	-	-	-	-	8.451	51.725	56.615	58.975	61.895

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6045.QDH.001 - Hilirisasi Industri Pengolahan Kakao dan Coklat		Ditjen IA	20	30	40	45	50	Badan usaha	3.000	4.500	6.000	6.500	7.500	-	-	-	-	-	3.000	4.500	6.000	6.500	7.500
EC.6045.QDH.002 - Penguatan Struktur dan Peningkatan Daya Saing Industri Pengolahan Susu		Ditjen IA	-	15	15	15	15	Badan usaha	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
EC.6045.QDH.003 - Pengembangan dan Penguatan Struktur Industri Pengolahan Hasil Hortikultura		Ditjen IA	-	10	10	10	10	Badan usaha	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
EC.6045.QDH.004 - Hilirisasi produk Berbasis Teh		Ditjen IA	-	10	10	10	10	Badan usaha	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
EC.6045.QDH.005 - Peningkatan Daya Saing Industri Pengolahan Kopi		Ditjen IA	-	10	10	10	10	Badan usaha	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6045.QDI.005 - Pengembangan Industri Pakan Berbasis Bahan Baku Lokal Dalam Rangka Substitusi Bahan Baku Impor		Ditjen IA	-	1	1	1	1	Industri	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6045.SDA.001 - Diversifikasi produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar		Ditjen IA	-	20	22	24	26	produk	-	3.000	3.160	3.300	3.460	-	-	-	-	-	-	3.000	3.160	3.300	3.460
EC.6046.PBK.002 - Pengembangan Inovasi Produk Hilir Berbasis Hasil Hutan dan Perkebunan		Ditjen IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	4.000	4.000	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
EC.6046.QDI.001 - Fasilitasi Pengembangan Industri Food Ingredients		Ditjen IA	1	1	1	1	1	Industri	900	1.000	1.000	1.500	2.000	-	-	-	-	-	900	1.000	1.000	1.500	2.000
EC.6047.QIH.001 - Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pemenuhan dan Kepatuhan		Ditjen IA	20	30	32	33	35	Badan usaha	1.000	1.500	1.580	1.650	1.750	-	-	-	-	-	1.000	1.500	1.580	1.650	1.750
EC.6049.PBK.001 - Penyusunan posisi runding dan optimalisasi kejasama industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar		Ditjen IA	-	-	3	3	3	Rekomendasi Kebijakan	-	-	2.100	2.200	2.300	-	-	-	-	-	-	-	2.100	2.200	2.300

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6049.PEH.002 - Promosi dan Temu Bisnis dalam Rangka Peningkatan Ekspor Produk Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar		Ditjen IA	2	20	21	22	23	promosi	2.000	20.000	21.000	22.000	23.000	-	-	-	-	-	2.000	20.000	21.000	22.000	23.000
EC.6050.PBK.001 - Rekomendasi Kebijakan dan peraturan terkait peningkatan daya saing dan nilai tambah industri mintemgar		Ditjen IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	1.000	1.050	1.100	1.160	-	-	-	-	-	-	1.000	1.050	1.100	1.160
EC.6071.QDD.001 - Sentra IKM dan UPT Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan Yang Mendapat Fasilitas		Ditjen IKMA	4	3	3	3	3	Kelompok Masyarakat	1.551	1.425	1.425	1.425	1.425	-	-	-	-	-	1.551	1.425	1.425	1.425	1.425
EC.6071.QDI.041 - Peningkatan Kemampuan IKM Pangan berbasis Inovasi melalui Program IFI (Indonesia Food Innovation)		Ditjen IKMA	-	20	20	20	20	Industri	-	2.300	2.300	2.300	2.300	-	-	-	-	-	-	2.300	2.300	2.300	2.300
05.01.16- Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil	01 Pertumbuhan PDB Industri Tekstil dan Pakaian Jadi		3,50	5,48	5,56	5,85	6,32	Persen	80.038	242.011	229.911	230.946	232.136	-	-	-	-	-	80.038	242.011	229.911	230.946	232.136
	02 Produktivitas Tenaga Kerja Industri TPT		60,34	64,59	69,61	74,67	79,76	Persen															
	03 Penyerapan Tenaga Kerja Industri TPT		3.918.787	3.957.206	3.995.626	4.034.045	4.072.465	Orang															
05.01.16.01- Penguatan Rantai Pasok									2.200	22.500	23.400	24.435	25.625	-	-	-	-	-	2.200	22.500	23.400	24.435	25.625
EC.6057.PBK.003 - Rekomendasi Kebijakan Fiskal dan Non Fiskal Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas kaki		Ditjen IKFT	-	2	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6059.PBK.007 - Penyusunan Data Supply- Demand Sektor Tekstil, Kulit dan Alas Kaki		Ditjen IKFT	3	3	3	3	3	Rekomendasi Kebijakan	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6059.PBK.009 - Penyusunan Peta Kemampuan Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki		Ditjen IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
EC.6060.PBK.012 - Hilirisasi Sustainable Textile Material Berbasis Rayon dan Poliester		Ditjen IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.500	2.500	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
EC.6072.QIH.001 - Pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan sektor industri (KBLI) terkait kebijakan/regulasi dibidang perindustrian		Ditjen KPAII	20	30	40	50	60	Badan usaha	700	6.000	6.900	7.935	9.125	-	-	-	-	-	700	6.000	6.900	7.935	9.125
05.01.16.04-Adopsi Teknologi 4.0 dan Teknologi Rendah Emisi									18.300	160.000	160.000	160.000	160.000	-	-	-	-	-	18.300	160.000	160.000	160.000	160.000
EC.6053.QDI.001 - Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki		Ditjen IKFT	21	100	100	100	100	Industri	16.800	150.000	150.000	150.000	150.000	-	-	-	-	-	16.800	150.000	150.000	150.000	150.000
EC.6058.QDI.003 - Memfasilitasi Implementasi Industri 4.0 Sektor Tekstil dan Apparel		Ditjen IKFT	15	100	100	100	100	Industri	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
05.01.16.06-Peningkatan Akses terhadap Lembaga Pembiayaan									-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6071.QDI.080 - IKM yang Mendapatkan Peningkatan Akses Pembiayaan		Ditjen IKMA	-	20	20	20	20	Industri	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
05.01.16.07-Pengembangan Sustainable Textile dan Tekstil Budaya Lokal									52.538	39.665	26.665	26.665	26.665	-	-	-	-	-	52.538	39.665	26.665	26.665	26.665
EC.6057.PBK.010 - Pilot Project Inovasi Daur Ulang Pengolahan Pakaian Bekas Dalam Rangka Circular Economy		Ditjen IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	15.000	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target					Satuan	Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6057.QDI.002 - Implementasi Sustainability dan Circular Economy pada Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki		Ditjen IKFT	4	8	8	8	8	Industri	1.000	10.765	10.765	10.765	10.765	-	-	-	-	-	1.000	10.765	10.765	10.765	10.765
EC.6071.QDI.051 - Industri Kecil dan menengah Tekstil dan Produk Tekstil Budaya lokal yang Mendapatkan Fasilitas		Ditjen IKMA	-	150	150	150	150	Industri	-	900	900	900	900	-	-	-	-	-	-	900	900	900	900
EC.6071.RBL.002 - Prasarana Pembangunan Gedung Bali Creative Industrial Center		Ditjen IKMA	1	1	-	-	-	unit	51.538	13.000	-	-	-	-	-	-	-	-	51.538	13.000	-	-	-
05.01.16.08-Penguatan Branding Produk Tekstil dan Peningkatan Ekspor									7.000	18.846	18.846	18.846	18.846						7.000	18.846	18.846	18.846	18.846
EC.6054.QIH.001 - Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pemenuhan dan Kepatuhan Kebijakan di Bidang Perindustrian Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki		Ditjen IKFT	-	1	1	1	1	Badan usaha	-	500	500	500	500	-	-	-	-	-	-	500	500	500	500
EC.6055.PBK.006 - Rekomendasi kebijakan dalam rangka Peningkatan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Industri Tekstil, Kulit dan Alas kaki		Ditjen IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6055.PBK.007 - Rekomendasi kebijakan dalam rangka Penyiapan Industri Halal sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki		Ditjen IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
EC.6057.PBK.016 - Rekomendasi Kebijakan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki		Ditjen IKFT	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6057.QDI.008 - Peningkatan Keterkelulusan dan Keterkaitan dalam rangka Peningkatan Ekspor		Ditjen IKFT	-	2	4	6	8	Industri	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
EC.6071.QDI.036 - Pemberdayaan Industri Fashion dan Kriya BPIFK		Ditjen IKMA	170	260	260	260	260	Industri	6.000	8.346	8.346	8.346	8.346	-	-	-	-	-	6.000	8.346	8.346	8.346	8.346
05.01.17- Pengembangan Industri Alas Kaki	01 Pertumbuhan PDB Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki		3,80	4,00	6,00	6,10	6,20	Persen	44.104	7.500	7.500	7.500	7.500	-	-	-	-	-	44.104	7.500	7.500	7.500	7.500
05.01.17.04- Fasilitasi Peningkatan Daya Saing dan Ekspor Industri Alas Kaki									44.104	7.500	7.500	7.500	7.500	-	-	-	-	-	44.104	7.500	7.500	7.500	7.500
EC.6054.PBK.007 - Penyusunan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) SNI dan Pembinaan Standar Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki		Ditjen IKFT	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6071.QDI.038 - Penguatan Ekosistem IKM Alas Kaki Melalui Penumbuhan Wirausaha Industri, Penguatan Kapasitas Kelembagaan, Industri 4.0		Ditjen IKMA	100	60	60	60	60	Industri	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300	-	-	-	-	-	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
EC.6071.QDI.039 - Pengembangan Produk, Pendampingan IKM, Peningkatan Kreativitas, dan Informasi Pasar, Promosi dan Pemasaran		Ditjen IKMA	150	150	150	150	150	Industri	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	-	-	-	-	-	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
EC.6071.QDI.091 - IKM yang Mengikuti Program Inkubator Alas Kaki dan Kemitraan		Ditjen IKMA	-	10	10	10	10	Industri	-	800	800	800	800	-	-	-	-	-	-	800	800	800	800
EC.6071.RBL.001 - Prasarana Pembangunan Gedung Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia		Ditjen IKMA	1	-	-	-	-	unit	37.604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.604	-	-	-	-

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
05.01.18- Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja	01 Pertumbuhan PDB Industri Logam Dasar		11,49	13,58	14,54	14,72	14,90	Persen	5.182	8.000	17.000	21.500	26.500						5.182	8.000	17.000	21.500	26.500
	02 - Utilisasi Industri Logam Dasar		77	79	81	83	85	Persen															
05.01.18.01- Ketersediaan Bahan Baku Industri Logam Dasar yang Berkualitas dan Kompetitif									1.000	1.000	3.500	4.500	5.500						1.000	1.000	3.500	4.500	5.500
EC.6062.QDI.014 - Industri Logam Dalam Negeri yang terfasilitasi dalam pemenuhan kebutuhan logam infrastruktur untuk IKN		Ditjen ILMATE	5	5	5	5	5	Industri	1.000	1.000	3.500	4.500	5.500						1.000	1.000	3.500	4.500	5.500
05.01.18.02- Kepastian Pasokan dan Harga Energi untuk Industri Logam Dasar									1.182	2.500	5.000	6.000	7.000						1.182	2.500	5.000	6.000	7.000
EC.6062.PBK.015 - Neraca Penyediaan dan Permintaan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya		Ditjen ILMATE	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	1.182	2.500	5.000	6.000	7.000						1.182	2.500	5.000	6.000	7.000
05.01.18.03- Peningkatan Utilisasi Kapasitas Terpasang Industri Besi- Baja									1.000	1.500	3.000	4.000	5.000						1.000	1.500	3.000	4.000	5.000
EC.6062.QDI.002 - Industri logam yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas		Ditjen ILMATE	1	1	1	1	1	Industri	1.000	1.500	3.000	4.000	5.000						1.000	1.500	3.000	4.000	5.000
05.01.18.04- Pengembangan Industri Special Steel									2.000	3.000	5.500	7.000	9.000						2.000	3.000	5.500	7.000	9.000
EC.6062.PBK.010 - Kebijakan Pengembangan Industri Perkapalan		Ditjen ILMATE	1	1	2	3	4	Rekomendasi Kebijakan	1.000	1.000	2.000	3.000	4.000						1.000	1.000	2.000	3.000	4.000
EC.6062.PBK.011 - Evaluasi Kebijakan Peningkatan Utilisasi Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika		Ditjen ILMATE	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	1.000	2.000	3.500	4.000	5.000						1.000	2.000	3.500	4.000	5.000

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
05.01.19- Penguatan dan Pengembangan Jasa Industri	01 - Kontribusi Jasa Industri Terhadap PDB Nasional		3,12	3,18	3,23	3,29	3,35	Persen	1.800	1.900	2.000	2.200	2.500	-	-	-	-	-	1.800	1.900	2.000	2.200	2.500
05.01.19.01-Tata Kelola Kebijakan Jasa Industri									1.800	1.900	2.000	2.200	2.500	-	-	-	-	-	1.800	1.900	2.000	2.200	2.500
EC.6077.PBK.003 - Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Pengaturan Jasa Industri		BSKJI	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6077.PBK.006 - Peningkatan Kontribusi PDB Sektor Jasa Industri melalui pembinaan Industri		BSKJI	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	800	900	1.000	1.200	1.500	-	-	-	-	-	800	900	1.000	1.200	1.500
05.02.06- Pengembangan KI Bintan Inti Industrial Estate	01 - Nilai Investasi Perusahaan dan Industrial Estate Kawasan		1,73	1,81	3,04	4,01	4,99	Rp Triliun	-	1.000	1.150	1.323	1.521	-	-	-	-	-	-	1.000	1.150	1.323	1.521
05.02.06.05- Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)									-	1.000	1.150	1.323	1.521	-	-	-	-	-	-	1.000	1.150	1.323	1.521
EC.6074.QDH.013 - Pengembangan Kawasan Industri Tertentu sebagai Pusat Hilirisasi dan Daya Tarik Investasi Industri Tematik		Ditjen KPAII	-	5	5	5	5	Badan usaha	-	1.000	1.150	1.323	1.521	-	-	-	-	-	-	1.000	1.150	1.323	1.521
05.02.07- Pengembangan KI Krakatau Industrial Estate Cilegon	01 - Nilai Investasi Perusahaan dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Krakatau Industrial Estate Cilegon		5,99	5,99	6,00	6,11	6,22	Rp Triliun	1.000	1.750	2.013	2.314	2.662	-	-	-	-	-	1.000	1.750	2.013	2.314	2.662
05.02.07.02- Pembangunan/Peng embang an Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi (APBN dan DAK)									1.000	1.750	2.013	2.314	2.662	-	-	-	-	-	1.000	1.750	2.013	2.314	2.662
EC.6074.QDH.002 - Pengembangan dan Penataan Kawasan Industri		Ditjen KPAII	5	7	7	8	8	Badan usaha	1.000	1.750	2.013	2.314	2.662	-	-	-	-	-	1.000	1.750	2.013	2.314	2.662

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target					Satuan	Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
05.02.08- Pengembangan KIT Wilmar	01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Wilmar		13,14	13,27	13,38	13,46	13,55	Rp Triliun	850	1.500	1.725	1.984	2.281	-	-	-	-	-	850	1.500	1.725	1.984	2.281
05.02.08.02- Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)									850	1.500	1.725	1.984	2.281	-	-	-	-	-	850	1.500	1.725	1.984	2.281
EC.6074.QDH.003 - Fasilitasi Kawasan Industri dengan Zona Tematik		Ditjen KPAII	3	3	4	4	5	Badan usaha	850	1.500	1.725	1.984	2.281	-	-	-	-	-	850	1.500	1.725	1.984	2.281
05.02.09- Pengembangan KIT Batang	01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Batang		4,14	4,50	4,82	5,07	5,32	Rp Triliun	-	500	575	-	-	-	-	-	-	-	-	500	575	-	-
05.02.09.03- Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)									-	500	575	-	-	-	-	-	-	-	-	500	575	-	-
EC.6074.PBP.005 - Penyusunan Rancangan Permenperin Pedoman Teknis Kawasan Industri dan Kawasan Industri Prakarsa Pemerintah		Ditjen KPAII	-	1	1	-	-	Rekomendasi Kebijakan	-	500	575	-	-	-	-	-	-	-	-	500	575	-	-
05.02.10- Pembangunan KI Seafer	01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Seafer		0,73	0,77	1,43	1,94	2,46	Rp Triliun	-	3.600	4.140	4.761	5.475	-	-	-	-	-	-	3.600	4.140	4.761	5.475
05.02.10.03- Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)									-	3.600	4.140	4.761	5.475	-	-	-	-	-	-	3.600	4.140	4.761	5.475
EC.6074.QDH.008 - Pengembangan Rantai Pasok Industri Prioritas di Kawasan Industri RPJMN		Ditjen KPAII	-	5	5	5	5	Badan usaha	-	3.600	4.140	4.761	5.475	-	-	-	-	-	-	3.600	4.140	4.761	5.475

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
05.02.11- Pembangunan KI iSentra @Lamongan	01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI iSentra Lamongan		1,37	1,56	1,72	1,85	1,97	Rp Triliun		2.000	2.300	2.645	3.042							2.000	2.300	2.645	3.042
05.02.11.01- Perizinan KI iSentra @Lamongan										2.000	2.300	2.645	3.042							2.000	2.300	2.645	3.042
EC.6074.PBP.004 - Penataan Ruang Kawasan Peruntukan Industri dalam Mendukung Penguatan Hilirisasi Industri		Ditjen KPAIL		10	10	10	10	Rekomendasi Kebijakan		2.000	2.300	2.645	3.042							2.000	2.300	2.645	3.042
05.02.12- Pembangunan KI Ngawi	01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Ngawi		(tahap persiapan)	(tahap persiapan)	(tahap persiapan)	(tahap persiapan)	0,03	Rp Triliun		300	345	397	456							300	345	397	456
05.02.12.02- Penataan Ruang KI Ngawi										300	345	397	456							300	345	397	456
EC.6074.QDH.006 - Fasilitasi Percepatan Perizinan Berusaha Kawasan Industri RPJMN		Ditjen KPAIL		1	1	1	1	Badan usaha		300	345	397	456							300	345	397	456
05.02.13- Pengembangan KI KBS (Ketapang Bangun Sarana)	01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Ketapang		2,31	2,40	2,47	2,53	2,59	Rp Triliun		2.000	2.300	2.645	3.042							2.000	2.300	2.645	3.042
05.02.13.07- Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)										2.000	2.300	2.645	3.042							2.000	2.300	2.645	3.042
EC.6074.QDH.007 - Fasilitasi Peningkatan Investasi di Kawasan Industri (KI) RPJMN		Ditjen KPAIL		5	5	5	5	Badan usaha		2.000	2.300	2.645	3.042							2.000	2.300	2.645	3.042
05.02.14- Pengembangan KI Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI)	01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Kalimantan Industrial Park Indonesia		4,30	6,35	8,12	9,51	10,91	Rp Triliun	1.000	2.000	2.300	2.645	3.042						1.000	2.000	2.300	2.645	3.042

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
05.02.14.03- Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, dan Pengolahan Persampahan/Limb ah) (APBN dan DAK)									1.000	2.000	2.300	2.645	3.042	-	-	-	-	-	1.000	2.000	2.300	2.645	3.042
EC.6074.QDH.004 - Pembentukan Eco Industrial Park (KI Berawasan Lingkungan)		Ditjen KPAIL	5	6	7	8	10	Badan usaha	1.000	2.000	2.300	2.645	3.042	-	-	-	-	-	1.000	2.000	2.300	2.645	3.042
05.02.15- Pembangunan KI Indonesia Pomalaa Industry Park	01 - Nilai Investasi Perusahaan dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Indonesia Pomalaa Industry Park		1,05	1,05	1,24	4,26	7,29	Rp Triliun	500	1.000	1.150	1.323	1.521	-	-	-	-	-	500	1.000	1.150	1.323	1.521
05.02.15.08- Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)									500	1.000	1.150	1.323	1.521	-	-	-	-	-	500	1.000	1.150	1.323	1.521
EC.6074.QDH.005 - Pendampingan pemenuhan dan kepatuhan kawasan industri terhadap regulasi yang		Ditjen KPAIL	20	40	50	60	70	Badan usaha	500	1.000	1.150	1.323	1.521	-	-	-	-	-	500	1.000	1.150	1.323	1.521
05.02.16- Pengembangan KI Konawe	01 - Nilai Investasi Perusahaan dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Konawe		305,96	306,24	306,48	306,68	306,87	Rp Triliun	1.000	6.000	6.900	7.935	9.125	-	-	-	-	-	1.000	6.000	6.900	7.935	9.125
05.02.16.03- Pembangunan/Peng embang an Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi (APBN dan DAK)									1.000	6.000	6.900	7.935	9.125	-	-	-	-	-	1.000	6.000	6.900	7.935	9.125
EC.6074.PEA.001 - Koordinasi Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)		Ditjen KPAIL	3	6	6	6	6	kegiatan	1.000	6.000	6.900	7.935	9.125	-	-	-	-	-	1.000	6.000	6.900	7.935	9.125

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
05.02.17- Pengembangan KI Stardust	01 - Nilai Investasi Perusahaan dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Stardust		0,48	0,64	0,77	0,88	0,98	Rp Triliun	-	1.000	1.150	1.323	1.521	-	-	-	-	-	-	1.000	1.150	1.323	1.521
05.02.17.08- Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)									-	1.000	1.150	1.323	1.521	-	-	-	-	-	-	1.000	1.150	1.323	1.521
EC.6074.PBP.003 - Pemantauan Kawasan Industri Prioritas (PMO)		Ditjen KPAIL	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	1.000	1.150	1.323	1.521	-	-	-	-	-	-	1.000	1.150	1.323	1.521
05.02.18- Pengembangan KI Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP)	01 - Nilai Investasi Perusahaan dan Perusahaan Kawasan Industri di KI IHIP Huabao		9,16	11,33	13,20	14,67	16,15	Rp Triliun	1.000	1.500	1.725	1.984	2.281	-	-	-	-	-	1.000	1.500	1.725	1.984	2.281
05.02.18.03- Pengembangan Sarana Prasarana Penunjang (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, Pengolahan Persampahan/Limb ah) (APBN dan DAK)									1.000	1.500	1.725	1.984	2.281	-	-	-	-	-	1.000	1.500	1.725	1.984	2.281
EC.6074.PBP.001 - Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri		Ditjen KPAIL	2	3	3	3	3	Rekomendasi Kebijakan	1.000	1.500	1.725	1.984	2.281	-	-	-	-	-	1.000	1.500	1.725	1.984	2.281
05.02.19- Pengembangan KI Morowali	01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Morowali		467,46	468,21	468,86	469,37	469,89	Rp Triliun	-	2.500	2.875	3.306	3.802	-	-	-	-	-	-	2.500	2.875	3.306	3.802
05.02.19.01- Pembangunan/Peng embang an Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi (APBN dan DAK)									-	2.500	2.875	3.306	3.802	-	-	-	-	-	-	2.500	2.875	3.306	3.802
EC.6074.QDH.009 - Pengembangan Konektivitas Kawasan Industri RPJMN dengan Lokasi Bahan Baku dan Simpul Transportasi		Ditjen KPAIL	-	5	5	5	5	Badan usaha	-	2.500	2.875	3.306	3.802	-	-	-	-	-	-	2.500	2.875	3.306	3.802

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
05.02.20- Pembangunan KI Sumbawa Barat	01 - Nilai Investasi Perusahaan dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Sumbawa Barat		(tahap persiapan)	(tahap persiapan)	(tahap persiapan)	0,01	0,23	Rp Triliun	1.000	2.500	2.875	3.306	3.802	-	-	-	-	-	1.000	2.500	2.875	3.306	3.802
05.02.20.08- Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)									1.000	2.500	2.875	3.306	3.802	-	-	-	-	-	1.000	2.500	2.875	3.306	3.802
EC.6074.QDH.001 - Kawasan Industri (KI) di Luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi		Ditjen KPAIL	5	11	14	14	15	Badan usaha	1.000	2.500	2.875	3.306	3.802	-	-	-	-	-	1.000	2.500	2.875	3.306	3.802
05.02.21- Pengembangan KI Pulau Obi	01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Pulau Obi		2,53	5,04	7,21	8,91	10,62	Rp Triliun	-	1.000	2.000	2.500	3.000	-	-	-	-	-	-	1.000	2.000	2.500	3.000
05.02.21.08- Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)									-	1.000	2.000	2.500	3.000	-	-	-	-	-	-	1.000	2.000	2.500	3.000
EC.6074.QDH.010 - Peningkatan Kenyamanan Berusaha Melalui Kepatuhan Pelaksanaan Kebijakan di Kawasan Industri		Ditjen KPAIL	-	10	20	25	30	Badan usaha	-	1.000	2.000	2.500	3.000	-	-	-	-	-	-	1.000	2.000	2.500	3.000
05.02.22- Pengembangan KI Weda Bay	01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Weda Bay		349,49	352,65	355,38	357,52	359,67	Rp Triliun	-	2.000	2.300	2.645	3.042	-	-	-	-	-	-	2.000	2.300	2.645	3.042
05.02.22.08- Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)									-	2.000	2.300	2.645	3.042	-	-	-	-	-	-	2.000	2.300	2.645	3.042
EC.6074.QDH.012 - Fasilitasi Implementasi Simbiosis Industri dan Efisiensi Energi dalam Upaya Dekarbonisasi di Sektor Kawasan Industri		Ditjen KPAIL	-	2	2	2	2	Badan usaha	-	2.000	2.300	2.645	3.042	-	-	-	-	-	-	2.000	2.300	2.645	3.042

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target					Satuan	Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
05.02.23- Pembangunan KI Buli	01 - Nilai Investasi Perusahaan dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Buli		0,21	0,40	0,57	0,70	0,83	Rp Triliun	-	2.000	2.300	2.645	3.042	-	-	-	-	-	-	2.000	2.300	2.645	3.042
05.02.23.08- Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)									-	2.000	2.300	2.645	3.042	-	-	-	-	-	-	2.000	2.300	2.645	3.042
EC.6074.QDH.011 - Akreditasi Kawasan Industri dan Evaluasi Penerapan Standar Kawasan Industri		Ditjen KPAIL	-	30	30	30	30	Badan usaha	-	2.000	2.300	2.645	3.042	-	-	-	-	-	-	2.000	2.300	2.645	3.042
05.02.24- Pembangunan KI Fakfak	01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Fakfak		(tahap persiapan)	(tahap persiapan)	(tahap persiapan)	(tahap persiapan)	0,01	Rp Triliun	1.000	2.500	2.875	3.306	3.802	-	-	-	-	-	1.000	2.500	2.875	3.306	3.802
05.02.24.03- Penataan Ruang KI Fakfak									1.000	2.500	2.875	3.306	3.802	-	-	-	-	-	1.000	2.500	2.875	3.306	3.802
EC.6074.PBP.002 - Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang dikembangkan		Ditjen KPAIL	5	5	5	5	5	Rekomendasi Kebijakan	1.000	2.500	2.875	3.306	3.802	-	-	-	-	-	1.000	2.500	2.875	3.306	3.802
05.02.25- Pembangunan KI Takalar	01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Takalar		(tahap persiapan)	0,24	0,30	0,35	0,41	Rp Triliun	500	2.200	2.380	2.587	2.825	-	-	-	-	-	500	2.200	2.380	2.587	2.825
05.02.25.08- Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)									500	2.200	2.380	2.587	2.825	-	-	-	-	-	500	2.200	2.380	2.587	2.825
EC.6074.QMA.001 - Pengelolaan Data dan Informasi Perwilayahan Industri		Ditjen KPAIL	5	1	1	1	1	Data	500	2.200	2.380	2.587	2.825	-	-	-	-	-	500	2.200	2.380	2.587	2.825
05.05.02- Peningkatan Ekspor Produk Industri Berteknologi Menengah Tinggi	04 - Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi		8,6	9,3	10	10,7	11,4	persen	17.700	37.250	47.413	54.976	61.997	-	-	-	-	-	17.700	37.250	47.413	54.976	61.997
05.05.02.01- Pengembangan Pasar Ekspor Indonesia									2.000	10.500	11.750	13.614	14.605	-	-	-	-	-	2.000	10.500	11.750	13.614	14.605

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
EC.6046.PBK.006 - Fasilitasi Pengembangan Teknologi Produksi Lateks Pekat Bebas Ammonia menggunakan Bio Surfaktan		Ditjen IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.500	2.500	
EC.6046.PBK.007 - Fasilitasi dan Implementasi Pengembangan Teknologi Pengeringan Industri Pengolahan Karet melalui penggunaan Dryer berbasis CNG		Ditjen IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	1.500	2.000	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-	1.500	2.000	2.500	2.500	
EC.6046.PBK.008 - Komersialisasi Teknologi Produksi Lateks Pekat Bebas Ammonia menggunakan Surfaktan		Ditjen IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
EC.6073.PBK.008 - Pengamanan dan Penyelamatan IDN dari dampak Persaingan Global serta Partisipasi Aktif dalam Fora Internasional		Ditjen KPAIL	-	1	1	1	2	Rekomendasi Kebijakan	-	1.000	1.150	1.323	1.521	-	-	-	-	-	-	1.000	1.150	1.323	1.521	
EC.6073.QDH.002 - Peningkatan Partisipasi dalam Global Value Chain		Ditjen KPAIL	3	6	7	8	9	Badan usaha	1.000	3.000	3.450	3.968	4.563	-	-	-	-	-	-	1.000	3.000	3.450	3.968	4.563
EC.6073.QDH.003 - Pendampingan Industri dalam Akses Industri Internasional		Ditjen KPAIL	5	5	5	5	5	Badan usaha	1.000	1.000	1.150	1.323	1.521	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.150	1.323	1.521
05.05.02.02-Promosi Ekspor Produk Teknologi Menengah Tinggi									4.000	14.000	21.000	24.500	28.000	-	-	-	-	-	-	4.000	14.000	21.000	24.500	28.000
EC.6046.PBK.009 - Komersialisasi Teknologi Cat berbasis Binder dari Lateks Karet Alam		Ditjen IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.500	2.500	
EC.6046.PBK.010 - Komersialisasi Teknologi Bio-Isoprene berbasis Karet Alam (Produk Karet Kualitas Tinggi)		Ditjen IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6068.QDI.001 - Industri yang Terfasilitasi Melalui Pendampingan dalam rangka Peningkatan Investasi dan/atau Ekspor		Ditjen ILMATE	2	2	2	-	2	Industri	-	7.000	7.000	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000
EC.6068.QDI.002 - Industri yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor sektor Permesinan dan Alat Mesin Pertanian		Ditjen ILMATE	4	1	-	-	-	Industri	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500
EC.6068.QDI.007 - Industri yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor sektor Elektronika dan Telematika		Ditjen ILMATE	3	1	-	-	-	Industri	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
EC.6068.QDI.010 - Industri yang Terfasilitasi dalam rangka Promosi Investasi sektor Elektronika dan Telematika		Ditjen ILMATE	-	-	1	2	3	Industri	-	-	1.000	1.500	2.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.500	2.000
EC.6068.QDI.011 - Industri yang Terfasilitasi dalam rangka Peningkatan Ekspor dan Diversifikasi Produk sektor Elektronika dan Telematika		Ditjen ILMATE	-	-	1	2	3	Industri	-	-	1.000	1.500	2.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.500	2.000
EC.6068.QDI.012 - Industri yang terfasilitasi peningkatan Ekspor, Akses Pasar dan Kerjasama Internasional pada sektor Permesinan dan Alat Mesin Pertanian dalam rangka peningkatan Global Value Chain		Ditjen ILMATE	-	-	4	6	8	Industri	-	-	4.000	6.000	8.000	-	-	-	-	-	-	-	4.000	6.000	8.000
05.05.02.03-Fasilitasi Sertifikasi Produk dan Perlindungan HKI untuk Mendorong Ekspor Barang dan Jasa									7.300	7.500	8.625	9.919	11.407	-	-	-	-	-	7.300	7.500	8.625	9.919	11.407
EC.6073.PEH.002 - Partisipasi Indonesia pada Hannover Messe		Ditjen KPAIL	1	1	1	1	1	promosi	7.300	7.500	8.625	9.919	11.407	-	-	-	-	-	7.300	7.500	8.625	9.919	11.407
05.05.02.05-Optimalisasi Market Intelligence untuk Produk Ekspor Barang dan Jasa									4.400	5.250	6.038	6.943	7.985	-	-	-	-	-	4.400	5.250	6.038	6.943	7.985

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6073.PBK.004 - Industrial Intelligence dan Peluang Kerja Sama Industri di Luar Negeri		Ditjen KPAIL	3	3	3	3	3	Rekomendasi Kebijakan	4.400	5.250	6.038	6.943	7.985	-	-	-	-	-	4.400	5.250	6.038	6.943	7.985
05.05.04-Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis SDA	04 Diversifikasi produk industri berbasis SDA yang diolah		0,286	0,282	0,278	0,274	0,269		41.782	156.502	164.918	175.717	183.086						41.782	156.502	164.918	175.717	183.086
	05 - Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing		208	209	210	211	212	produk															
05.05.04.01-Kebijakan dan Fasilitasi Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis SDA									25.400	87.152	89.065	95.384	94.155	-	-	-	-	-	25.400	87.152	89.065	95.384	94.155
EC.6044.PBK.002 - Fasilitasi Pusat Logistik Bahan Baku untuk Industri Furnitur		Ditjen IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6044.PBK.003 - Pengembangan Pusat Flavor and Fragrance berbasis Minyak Atsiri		Ditjen IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6044.PBK.005 - Peningkatan Utilisasi Industri Karet Alam		Ditjen IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	1.000	1.000	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.500	1.500
EC.6044.PBK.006 - Penyusunan Rancangan Pembentukan Badan Karet Nasional		Ditjen IA	1	1	-	-	-	Rekomendasi Kebijakan	500	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	500	1.000	-	-	-
EC.6044.PBK.007 - Penyusunan Peta Jalan Pengelolaan Limbah Non-B3 Kelompok Kertas sebagai Bahan Baku Industri Dalam Negeri		Ditjen IA	1	1	-	-	-	Rekomendasi Kebijakan	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-
EC.6044.PBK.008 - Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam perbaikan tata kelola Limbah Non-B3 kelompok kertas yang berwawasan lingkungan		Ditjen IA	-	-	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	-	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6044.PBK.012 - Pengembangan Pusat Data dan Profil Karakteristik Minyak Atsiri Indonesia		Ditjen IA		1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan		6.000	2.000	2.000	2.000							6.000	2.000	2.000	2.000
EC.6044.QDI.001 - Fasilitas Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Hasil Hutan dan Perkebunan melalui Pusat Bahan Baku Industri berbasis Bambu		Ditjen IA		30	30	30	30	Industri		2.000	2.000	2.000	2.000							2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6044.QDI.002 - Fasilitas Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Hasil Hutan dan Perkebunan melalui Pusat Bahan Baku Industri berbasis Rotan		Ditjen IA		30	30	30	30	Industri		2.000	2.000	2.000	2.000							2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6044.QDI.003 - fasilitas Jaminan Pasokan KDU sebagai Bahan Baku Industri melalui Pembentukan Kemitraan Public-Private Partnership dan Perbaikan Rantai Pasok Penyediaan KDU Dalam Negeri		Ditjen IA		25	25	25	25	Industri		1.500	1.500	1.500	1.500							1.500	1.500	1.500	1.500
EC.6044.QDI.004 - Fasilitas Transisi Energi dan Pengelolaan Lingkungan di Industri Pulp dan Kertas dalam Upaya Penurunan GRK		Ditjen IA		1	1	1	1	Industri		1.000	1.000	1.000	1.000							1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6045.PBK.001 - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Untuk Menjamin Pasokan Bahan Baku Industri Hasil Hutan dan Perkebunan melalui Pusat Bahan Baku Industri berbasis Minyak Atsiri		Ditjen IA		1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan		2.000	2.000	2.000	2.000							2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6045.PBK.002 - Penyusunan Kebijakan Pengembangan Pusat Flavor and Fragrance berbasis Minyak Atsiri Nasional		Ditjen IA	2	2	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000						1.500	1.500	2.000	2.000	2.000

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6046.PBK.001 - Pengembangan Pusat Data dan Profil Karakteristik Minyak Atsiri Indonesia		Ditjen IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.500	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.500	2.000	2.000	2.000
EC.6046.PBK.003 - Pilot Project Pemanfaatan Cat berbasis Binder dari Lateks Karet Alam		Ditjen IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.500	2.500
EC.6046.PBK.004 - Peningkatan Kualitas Produk Karet Alam melalui Karet Alam Berkelanjutan		Ditjen IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6046.PBK.011 - Fasilitasi Pengembangan Teknologi Bio-Isoprene berbasis Karet Alam (Produk Karet Kualitas Tinggi)		Ditjen IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	1.500	2.000	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-	1.500	2.000	2.500	2.500
EC.6046.QDH.003 - Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Furnitur dan Kayu Olahan (Wood Working)		Ditjen IA	13	15	15	15	15	Badan usaha	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	-	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
EC.6046.SDA.001 - Pengembangan Inovasi Produk Hilir Berbasis Atsiri		Ditjen IA	-	10	12	12	12	produk	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6046.SDB.001 - Fasilitasi Pengembangan Produk Greenfiber, Greenpackaging, dan Greenprinting		Ditjen IA	-	1	1	1	1	Purwarupa	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6046.SDC.001 - Fasilitasi Pengembangan Konsep Desain Industri Furnitur		Ditjen IA	-	20	20	20	20	Desain	-	4.000	4.000	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
EC.6046.UAB.001 - Digitalisasi Rantai Pasok Industri Pengolahan Karet		Ditjen IA	-	1	1	1	1	Sistem Informasi	-	1.500	1.500	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500	2.000	2.000
EC.6046.UAB.002 - Pembangunan Platform Digital untuk Pengawasan dan Pengendalian Neraca Massa KDU sebagai bagian dari Tata Kelola Industri Kertas Berwawasan Lingkungan		Ditjen IA	-	-	1	1	-	Sistem Informasi	-	-	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500	-

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6047.QDH.003 - Perencanaan dan Pembinaan Standar di Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan		Ditjen IA	-	15	15	15	15	Badan usaha	-	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
EC.6047.QDI.001 - Fasilitasi dan Pendampingan Sertifikasi Sustainability Sumber Bahan Baku industri karet alam		Ditjen IA	-	1	1	1	1	Industri	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6047.QDI.002 - Fasilitasi dan Pendampingan Sertifikasi Sustainability Sumber Bahan Baku		Ditjen IA	-	1	1	1	1	Industri	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
EC.6047.QIH.002 - Pengawasan dan Pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan		Ditjen IA	20	30	30	30	30	Badan usaha	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6048.PBK.001 - Fasilitasi Industri Pengolahan Minyak Kemayoran Berbasis Kelompok Tani		Ditjen IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
EC.6048.PBK.002 - Komersialisasi Aspal Karet Berbasis Karet Alam		Ditjen IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6072.PBK.001 - Rekomendasi Kebijakan Teknis Dalam Meningkatkan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri		Ditjen KPAIL	8	10	11	12	14	Rekomendasi Kebijakan	2.150	3.000	3.450	3.968	4.563	-	-	-	-	-	2.150	3.000	3.450	3.968	4.563
EC.6072.PBK.002 - Pengamanan dan Penyelamatan IDN dari Dampak Persaingan Global serta Partisipasi Aktif dalam Fora Internasional		Ditjen KPAIL	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	1.000	1.150	1.323	1.521	-	-	-	-	-	-	1.000	1.150	1.323	1.521
EC.6072.PBK.003 - Penguatan Struktur Industri Melalui Kebijakan Non Fiskal		Ditjen KPAIL	-	1	1	2	2	Rekomendasi Kebijakan	-	1.000	1.150	1.323	1.521	-	-	-	-	-	-	1.000	1.150	1.323	1.521

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6072.PBK.004 - Pengembangan Kebijakan Tata Niaga Ekspor-Impor dalam rangka Jaminan Pemenuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong serta Dukungan Terhadap Kinerja Industri Dalam Negeri		Ditjen KPAIL		3	3	3	4	Rekomendasi Kebijakan		3.000	3.450	3.968	4.563							3.000	3.450	3.968	4.563
EC.6072.PBK.005 - Penyelesaian Hambatan Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal Sektor Industri		Ditjen KPAIL		1	1	2	2	Rekomendasi Kebijakan		1.000	1.150	1.323	1.521							1.000	1.150	1.323	1.521
EC.6072.PBK.006 - Peningkatan Kinerja Logistik Industri dalam rangka meningkatkan Daya Saing Industri Nasional		Ditjen KPAIL		1	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan		2.000	2.300	2.645	3.042							2.000	2.300	2.645	3.042
EC.6072.PBK.007 - Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri dalam rangka Meningkatkan Kepatuhan Industri Dalam Negeri		Ditjen KPAIL		2	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan		2.000	2.300	2.645	3.042							2.000	2.300	2.645	3.042
EC.6072.QDI.001 - Fasilitasi dan Pendampingan Peningkatan Daya Tahan		Ditjen KPAIL	10	6	8	10	12	Industri	1.550	1.200	1.380	1.587	1.825						1.550	1.200	1.380	1.587	1.825
EC.6072.QDI.002 - Fasilitasi dan Pendampingan Peningkatan Iklim Usaha		Ditjen KPAIL		9	11	13	15	Industri		1.800	2.070	2.381	3							1.800	2.070	2.381	3
EC.6073.PBK.001 - Perencanaan dan Pengembangan Jejaring Kerja Promosi Investasi		Ditjen KPAIL	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	700	750	863	992	1.141						700	750	863	992	1.141
EC.6075.QMA.001 - Layanan Data dan Informasi Bidang Industri		Setjen	2	2	2	2	2	layanan	1.623	902	2.102	2.852	2.602						1.623	902	2.102	2.852	2.602
EC.6075.RAN.001 - Pengembangan Sistem Informasi		Setjen	1	1	1	1	1	unit	3.377	6.000	7.200	7.877	7.812						3.377	6.000	7.200	7.877	7.812
05.05.04.02-Promosi Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis SDA									2.000	44.500	47.875	48.756	53.220						2.000	44.500	47.875	48.756	53.220

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6049.PBK.003 - Promosi Produk-produk Baru Industri Karet Hulu (Karet Hulu, Binder cat, Veneer Rotan)		Ditjen IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6049.PEH.001 - Promosi dan Temu Bisnis Pada Pameran Berskala Internasional dalam rangka Peningkatan Ekspor Produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan		Ditjen IA	1	1	1	1	1	promosi	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EC.6049.PEH.003 - Promosi dan Temu Bisnis dalam Rangka Peningkatan Ekspor Produk Industri Hasil Hutan dan Perkebunan		Ditjen IA	-	1	1	1	1	promosi	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6049.PEH.004 - Fasilitasi Promosi dan Temu Bisnis Dalam Rangka Peningkatan Ekspor Produk Kertas dan Pencetakan Ramah Lingkungan serta Perlindungan Produk Industri Kertas dan Pencetakan Dalam Negeri		Ditjen IA	-	3	3	-	-	promosi	-	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	-	-
EC.6049.PEH.005 - Promosi dan Temu Bisnis dalam Rangka Peningkatan Ekspor Produk Industri Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan		Ditjen IA	-	2	2	2	2	promosi	-	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
EC.6073.PEH.003 - Promosi Internasional Industri Manufaktur		Ditjen KPAlI	-	3	3	3	4	promosi	-	22.500	25.875	29.756	34.220	-	-	-	-	-	-	22.500	25.875	29.756	34.220
05.05.04.03-Kerja Sama untuk Peningkatan Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis									14.382	24.850	27.978	31.577	35.711	-	-	-	-	-	14.382	24.850	27.978	31.577	35.711
EC.6049.PBK.002 - Rekomendasi Peningkatan Kerjasama Di Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan		Ditjen IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6050.PBK.002 - Peningkatan Kontribusi ekspor produk sektor industri hasil hutan terhadap total		Ditjen IA	-	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
EC.6072.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan dan Ketahanan Industri		Ditjen KPAPII	2	-	-	-	-	layanan	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	-	-	-	-
EC.6072.UAC.001 - Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengawasan dan Pengendalian Industri		Ditjen KPAPII	50	100	120	140	150	orang	400	1.000	1.150	1.323	1.521	-	-	-	-	-	400	1.000	1.150	1.323	1.521
EC.6073.PBK.002 - Pembukaan Akses Industri Internasional melalui Pemanfaatan Perundingan Internasional di Bidang Industri (PTA/FTA/CEPA)		Ditjen KPAPII	6	6	7	8	9	Rekomendasi Kebijakan	2.500	6.000	6.900	7.935	9.125	-	-	-	-	-	2.500	6.000	6.900	7.935	9.125
EC.6073.PBK.003 - Analisis Potensi Pengembangan Akses Produk Industri		Ditjen KPAPII	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	500	600	690	794	913	-	-	-	-	-	500	600	690	794	913
EC.6073.PBK.005 - Penanganan Hambatan Akses Industri Internasional		Ditjen KPAPII	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	800	1.000	1.150	1.323	1.521	-	-	-	-	-	800	1.000	1.150	1.323	1.521
EC.6073.PBK.006 - Pemanfaatan Kerja Sama dan Bantuan Luar Negeri		Ditjen KPAPII	1	-	-	-	-	Rekomendasi Kebijakan	2.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.032	-	-	-	-
EC.6073.PBK.007 - Analisa Kebutuhan SDI dan Potensi Pemenuhan SDI dari Negara Mitra		Ditjen KPAPII	1	1	1	1	2	Rekomendasi Kebijakan	500	750	863	992	1.141	-	-	-	-	-	500	750	863	992	1.141
EC.6073.PEC.001 - Fasilitasi dan Penjajagan Kerjasama SDI dengan Negara Mitra		Ditjen KPAPII	2	2	2	3	3	Kesepakatan	975	1.000	1.150	1.323	1.521	-	-	-	-	-	975	1.000	1.150	1.323	1.521
EC.6073.PEC.002 - Pembukaan Akses Industri Internasional melalui Pemanfaatan Forum Kerja Sama Bilateral, Regional dan Multilateral		Ditjen KPAPII	2	2	2	2	2	Kesepakatan	3.000	6.000	6.900	7.935	9.125	-	-	-	-	-	3.000	6.000	6.900	7.935	9.125

KP/PP/RO	Penugasan Indikator	UKE I Pengampu RO	Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EC.6073.PEC.003 - Pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular di bidang Industri		Ditjen KPAIL	1	1	1	1	1	kegiatan	1.000	1.000	1.150	1.323	1.521	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.150	1.323	1.521
EC.6073.PEH.001 - Peningkatan Peluang Investasi Sektor Industri		Ditjen KPAIL	1	2	2	3	3	promosi	1.000	2.000	2.300	2.645	3.042	-	-	-	-	-	1.000	2.000	2.300	2.645	3.042
EC.6073.QDH.001 - Layanan Pendampingan Investasi Perusahaan Multinasional		Ditjen KPAIL	2	2	2	3	3	Badan usaha	975	1.500	1.725	1.984	2.281	-	-	-	-	-	975	1.500	1.725	1.984	2.281
05.05.06-Peningkatan Rantai Nilai Produk Elektronik dan Otomotif termasuk Electric Vehicle (EV)	01 - Tingkat partisipasi produk elektronik Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global		49	51	53	55	57	persen	4.056	12.000	12.500	18.000	12.000	-	-	-	-	-	4.056	12.000	12.500	18.000	12.000
	02 - Tingkat partisipasi produk otomotif termasuk Electric Vehicle (EV) Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global		23	25	28	33	36	persen															
05.05.06.04-Penyelenggaraan Forum Bisnis dan Business Matching bagi Pelaku Ekspor Indonesia untuk Masuk Dalam Rantai Pasok Global									4.056	12.000	12.500	18.000	12.000	-	-	-	-	-	4.056	12.000	12.500	18.000	12.000
EC.6068.QDI.003 - Industri yang Terfasilitasi Melalui Kerjasama Internasional Sektor Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika		Ditjen ILMATE	2	2	2	2	2	Industri	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EC.6068.QDI.004 - Industri yang Terfasilitasi Dalam Rangka Peningkatan Akses Pasar dan Pendampingan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika		Ditjen ILMATE	5	10	10	10	10	Industri	3.056	7.000	7.500	13.000	7.000	-	-	-	-	-	3.056	7.000	7.500	13.000	7.000
TOTAL									348.240	1.058.970	1.208.424	1.317.568	1.413.588	-	-	-	-	-	348.240	1.058.970	1.208.424	1.317.568	1.413.588

C. Kerangka Regulasi Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Mewujudkan tata kelola pengembangan industri yang lebih konduif dan relevan dengan kondisi terkini	Sekretariat Jenderal	1. Sekretariat Negara 2. Kementerian Hukum	2027
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan Industri	Sinkronisasi dan Koordinasi antar kementerian dan/atau lembaga dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional	1. Sekretariat Negara 2. Kementerian Hukum	2026
3.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035	Amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Sekretariat Jenderal	1. Sekretariat Negara 2. Kementerian Hukum	2026
4.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2025-2029	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035	Sekretariat Jenderal	1. Sekretariat Negara 2. Kementerian Hukum	2026
5.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Perwilayahan Industri	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional	1. Sekretariat Negara 2. Kementerian Hukum	2027

dan Optik;		
18. KBLI Kode 27 merupakan KBLI Sektor Industri Peralatan Listrik;		
19. KBLI Kode 28 merupakan KBLI Sektor Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL;		
20. KBLI Kode 29 merupakan KBLI Sektor Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer;		
21. KBLI Kode 30 merupakan KBLI Sektor Industri Alat Angkutan Lainnya;		
22. KBLI Kode 31 merupakan KBLI Sektor Industri Furnitur;		
23. KBLI Kode 32 merupakan KBLI Sektor Industri Pengolahan Lainnya; dan		
24. KBLI Kode 33 merupakan KBLI Sektor Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.		
INTERPRETASI HASIL PERHITUNGAN		
Semakin tinggi hasil perhitungan, menunjukkan semakin tinggi nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas dalam mendorong perekonomian nasional.		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Rp Triliun	Maksimasi	Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
S2	Tumbuh dan Berkembangnya Industri yang Inklusif						
S2.2	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	120,7	123,1	126,2	133,4	138,8	147,7
DEFINISI/DESKRIPSI							
Semakin tinggi tingkat produktivitas tenaga kerja sektor industri, maka semakin tinggi efisiensi perusahaan dalam memproduksi barang/jasa. Untuk itu, maka penyediaan Sumber Daya Manusia Industri yang terampil menjadi salah satu yang menjadi prioritas untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional.							
Nilai produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas merupakan pembagian antara nilai tambah sektor industri nonmigas dan jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas.							
SUMBER DATA							
Data PDB dan Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dipublikasikan oleh BPS dan diolah oleh Pusat Data dan Infomasi, Kementerian Perindustrian.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas didapatkan dengan pembagian antara PDB industri nonmigas harga konstan dan jumlah tenaga kerja di sektor industri nonmigas dari Sakernas.							
INTERPRETASI HASIL PERHITUNGAN							
Semakin tinggi hasil perhitungan, menunjukkan semakin tinggi produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas.							
SATUAN		KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA				
Rp Juta/ Orang/Tahun		Maksimasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri				

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
S2	Tumbuh dan Berkembangnya Industri yang Inklusif						
S2.3	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap Total Pekerja	13,80	14,15	14,68	15,02	15,47	15,70

DEFINISI/DESKRIPSI		
Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya saing dan kemandirian dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian industri nasional. Dengan semakin tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas merupakan salah satu indikasi bahwa industri nasional semakin mandiri, maju, dan berdaya saing. Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja dihitung menggunakan data Sakernas.		
SUMBER DATA		
Data Sakernas yang dipublikasikan oleh BPS.		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri pengolahan nonmigas dari Sakernas (KBLI 10-18 dan 20-33) dibagi Total Tenaga Kerja dikali 100 persen.		
INTERPRETASI HASIL PERHITUNGAN		
Semakin tinggi hasil perhitungan, menunjukkan semakin tinggi persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja.		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persen	Maksimasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
S2	Tumbuh dan Berkembangnya Industri yang Inklusif						
S2.4	Pertumbuhan PDB Industri Kecil dan Menengah	NA	5,26	5,38	5,45	5,60	6,02
DEFINISI/DESKRIPSI							
Peranan Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) terhadap perekonomian sangat vital, khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, IKM mampu menghidupkan potensi masyarakat dan dapat bertahan dari berbagai kondisi perekonomian. Oleh karena itu, peranan IKM tersebut perlu diukur secara berkala. Pertumbuhan PDB IKM merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur peranan IKM dalam perekonomian, berdasarkan pendekatan nilai tambah yang dihasilkan oleh IKM.							
SUMBER DATA							
Data pertumbuhan PDB IKM menggunakan data pendekatan nilai tambah IMK (Industri Mikro Kecil) dan IBS (Industri Besar Sedang), serta pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas yang dipublikasikan oleh BPS kemudian diolah Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Pertumbuhan PDB IKM dihitung menggunakan data pendekatan nilai tambah dengan formula: selisih nilai tambah IKM periode saat ini (t) dengan nilai tambah IKM periode sebelumnya (t-1), dibandingkan dengan nilai tambah IKM periode sebelumnya (t-1).							
INTERPRETASI HASIL PERHITUNGAN							
Semakin tinggi hasil perhitungan, menunjukkan semakin tinggi pertumbuhan PDB Industri Kecil dan Industri Menengah.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
S3	Meningkatnya Persebaran Industri						
S3.1	Persentase Nilai Tambah Sektor Industri yang Diciptakan di Luar Jawa	32,11	32,65	33,25	33,36	34,03	34,96
DEFINISI/DESKRIPSI							
Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa mencerminkan tingkat persebaran industri di provinsi-provinsi di luar pulau Jawa.							
SUMBER DATA							
Badan Pusat Statistik (BPS) dan diolah oleh Kementerian Perindustrian.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Total PDRB sektor industri Provinsi di luar Pulau Jawa dibagi PDB sektor industri dikalikan 100 persen.							
INTERPRETASI HASIL PERHITUNGAN							
Semakin tinggi hasil perhitungan, menunjukkan semakin tinggi persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka dan Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
S4	Meningkatnya Efisiensi Industri Melalui Pemanfaatan Teknologi						
S4.1	Perusahaan Dengan Nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) > 3.0	73	87	103	119	139	156
DEFINISI/DESKRIPSI							
INDI 4.0 adalah sebuah indeks acuan yang digunakan oleh industri dan pemerintah untuk mengukur tingkat kesiapan perusahaan menuju industri 4.0. INDI 4.0 terdiri atas lima pilar, yaitu manajemen dan organisasi (<i>management and organization</i>), orang dan budaya (<i>people and culture</i>), produk dan layanan (<i>product and services</i>), teknologi (<i>technology</i>), dan operasi pabrik (<i>factory operation</i>).							
SUMBER DATA							
Hasil asesmen INDI 4.0 dari SIINas yang telah diverifikasi oleh unit kerja terkait.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Dengan melakukan verifikasi hasil asesmen INDI 4.0 pada setiap industri dengan berlandaskan pada beberapa kriteria penilaian yang telah di tentukan. Perhitungan indikator ini bersifat akumulasi, sehingga capaian tahun sebelumnya juga dihitung sebagai bagian dari capaian pada tahun selanjutnya.							
INTERPRETASI HASIL PERHITUNGAN							
Semakin tinggi hasil perhitungan, menunjukkan semakin banyak perusahaan dengan nilai INDI 4.0 yang lebih dari 3.0.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Perusahaan	Maksimasi	Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Badan Standardisasi Kebijakan dan Jasa Industri					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	
S5	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan							
S5.1	Penurunan emisi GRK pada sektor industri yang	6,752	6,75	6,79	6,85	6,90	6,93	

	menjadi prioritas dekarbonisasi						
DEFINISI/DESKRIPSI							
Yang dimaksud dengan target nasional adalah target sektor <i>Industrial Process and Production Use</i> (IPPU) di tahun 2030 berkurang sebesar 7 Juta Ton CO2-Eq. Industri prioritas dekarbonisasi terbatas pada industri semen, pupuk, asam nitrat, baja, dan alumunium (sesuai data yang tersedia).							
SUMBER DATA							
Hasil evaluasi Pusat Industri Hijau berdasarkan data SIINas dan data verifikasi tenaga ahli verifikator. Data emisi GRK <i>Business as Usual</i> (BaU) pada tahun 2025-2029 dengan baseline tahun 2010. Data yang dihasilkan pada tahun ke-n adalah data realisasi pada tahun n-1. Sebagai contoh, data tahun 2025 adalah realisasi pada tahun 2024.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Realisasi emisi GRK industri prioritas dekarbonisasi pada tahun n-1. Sebagai contoh perhitungan adalah sebagai berikut: a. Tahun 2024 : BaU misal 20 juta ton CO2-Eq b. Tahun 2025 : BaU misal 24 juta ton CO2-Eq c. Tahun 2024 : Inventori (Hasil inventarisasi data) misal 13 juta ton CO2-Eq d. Tahun 2025 : misal 16 juta ton CO2-Eq e. Reduksi 2024 : 20-13 = 7 juta ton CO2-Eq f. Reduksi 2025 : 24-16 = 8 juta ton CO2-Eq							
INTERPRETASI HASIL PERHITUNGAN							
Semakin tinggi hasil perhitungan, menunjukkan semakin tinggi tingkat penurunan emisi GRK pada sektor industri prioritas dekarbonisasi.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Juta Ton CO2-Eq	Maksimasi	Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, dan Badan Standardisasi Kebijakan dan Jasa Industri					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
S5	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan						
S5.2	Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri	10	11	12	13	14	15
DEFINISI/DESKRIPSI							
Yang dimaksud dengan rasio penggunaan material sirkular/daur ulang adalah perbandingan antara volume/berat material daur ulang (<i>recycle content</i>) dengan volumen/berat bahan baku total.							
Sektor industri dibatasi pada subsektor pulp dan kertas, tekstil, kaca keramik, dan logam yang telah tersedia standar industri hijaunya.							
SUMBER DATA							
Sumber data dari SIINas yang diolah.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung proporsi input bahan baku yang berasal dari material daur ulang (<i>recycled content</i>) terhadap total input bahan baku di sektor industri pada akhir tahun berjalan, kemudian dikalikan 100 persen.							
INTERPRETASI HASIL PERHITUNGAN							
Semakin tinggi hasil perhitungan, menunjukkan rasio penggunaan material sirkular pada sektor industri semakin tinggi.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional dan Badan Standardisasi Kebijakan dan Jasa Industri					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
S6	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Industri Pengolahan Nonmigas						
S6.1	Kontribusi Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap Total Ekspor	74,25	74,60	74,85	75,10	75,30	75,60
DEFINISI/DESKRIPSI							
Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor, merupakan perbandingan nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap nilai ekspor nasional setiap tahunnya. Meningkatnya ekspor produk industri diindikasikan sebagai bentuk meningkatnya penguasaan pasar industri.							
SUMBER DATA							
Data ekspor nasional yang dipublikasikan oleh BPS.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap total ekspor adalah Ekspor Industri Pengolahan nonmigas dibagi total Ekspor Nasional dikali 100 persen.							
INTERPRETASI HASIL PERHITUNGAN							
Semakin tinggi hasil perhitungan, menunjukkan semakin tinggi kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap total ekspor.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, dan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka; Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
S6	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Industri Pengolahan Nonmigas						
S6.2	Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi	7,9	8,6	9,3	10	10,7	11,4
DEFINISI/DESKRIPSI							
Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi merupakan nilai ekspor dari pengelompokan HS produk industri berteknologi tinggi oleh UNIDO/OECD dibagi dengan total nilai ekspor Indonesia.							
SUMBER DATA							
Data ekspor sektor industri yang dipublikasikan oleh BPS.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi merupakan nilai ekspor dari 1520 HS code produk industri berteknologi tinggi dibagi dengan total nilai ekspor Indonesia.							
INTERPRETASI HASIL PERHITUNGAN							
Semakin tinggi hasil perhitungan, menunjukkan semakin tinggi kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi pada ekspor Indonesia.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, dan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029

S6	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Industri Pengolahan Nonmigas								
S6.3	Diversifikasi Produk Industri Berbasis SDA yang Diolah	0,294	0,286	0,282	0,278	0,274	0,269		
DEFINISI/DESKRIPSI									
Merupakan nilai yang digunakan untuk menunjukkan seberapa terdiversifikasi ekspor untuk produk berbasis SDA Indonesia. Dihitung dengan produk pada level HS 6 digit, serta didasarkan pada klasifikasi produk berdasar tingkat teknologi oleh Lall. Klasifikasi Lall merupakan klasifikasi produk industri yang dipublikasikan oleh <i>United Nation Trade and Development</i> (UNTAD).									
SUMBER DATA									
Data yang dirilis oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas									
CARA MENGHITUNG (FORMULA)									
Perhitungan menggunakan Indeks Herfindahl-Hirschman/ <i>Herfindahl-Hirschman Index</i> (HHI) dengan Nilai HHI yang dihasilkan adalah antara 0 – 1.									
INTERPRETASI HASIL PERHITUNGAN									
Nilai HHI yang semakin mendekati “1”, menunjukkan bahwa ekspor produk industri semakin terkonsentrasi pada sedikit jenis produk ekspor. Sebaliknya Nilai HHI semakin mendekati “0”, maka ekspor produk industri semakin terdiversifikasi.									
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB DATA					
-		Minimasi		Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, dan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
S6	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Industri Pengolahan Nonmigas						
S6.4	Jumlah Produk Industri Berbasis SDA yang Diolah yang Berdaya Saing	179	208	209	210	211	212
DEFINISI/DESKRIPSI							
Merupakan jumlah produk industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) yang diolah yang memiliki keunggulan komparatif. Produk industri yang berbasis SDA diklasifikasikan berdasarkan level HS 6 Digit dan klasifikasi Lall. Semakin banyak produk dari sektor industri berbasis (SDA) yang diolah yang memiliki daya saing, semakin kuat dan kompetitif sektor industri tersebut. Jumlah produk yang memiliki daya saing dapat mencerminkan tingkat inovasi, efisiensi, dan kualitas dari proses pengolahan sumber daya alam yang menciptakan produk yang dapat bersaing di pasar. Jika jumlah produk industri berbasis SDA yang berdaya saing meningkat maka akan semakin meningkatkan ekspor dan kontribusi ekspor secara keseluruhan terhadap PDB.							
SUMBER DATA							
Data yang dirilis oleh Kementerian PPN/Bappenas							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
<i>Revealed Comparative Advantage</i> dari Indonesia dalam produk industri berbasis sumber daya alam yang diolah (skor RCA) = (Total nilai ekspor Indonesia untuk produk industri berbasis sumber daya alam yang diolah / Total nilai ekspor Indonesia) / (Total nilai ekspor Dunia untuk produk industri berbasis sumber daya alam. yang diolah / Total nilai ekspor Dunia)							
INTERPRETASI HASIL PERHITUNGAN							
Semakin tinggi hasil perhitungan, menunjukkan semakin banyak produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing yang diekspor.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Produk	Maksimasi	Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat					

		Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, dan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka
--	--	--

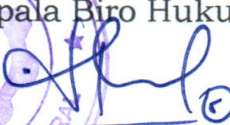
Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	
S7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Kementerian Perindustrian Yang Baik							
S7.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian	80,01	86,45	86,45	87,5	87,5	88,5	
DEFINISI/DESKRIPSI								
Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.								
SUMBER DATA								
Data Indeks RB yang dipublikasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB)								
CARA MENGHITUNG (FORMULA)								
Menghitung total nilai komponen pembentuk Indeks RB berdasarkan bobot yang telah ditentukan.								
INTERPRETASI HASIL PERHITUNGAN								
Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi nilai pelaksanaan RB Kementerian Perindustrian.								
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA						
Nilai	Maksimasi	Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal						

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

Ikana Yossye Ardianingsih

